

ANALISIS SEKTOR BASIS SI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017-2021

Putri Mawar Katuuk¹, Anderson G. Kumenaung², George M. V Kawung³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

Email: putrikatuuk@gmail.com, andersongkumenaung@unsrat.ac.id, georgekawung@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor basis di Kabupaten Minahasa Utara. Salah satu gambaran perkembangan perekonomian daerah biasanya di ukur dari perkembangan dan peningkatan produk domestic regional bruto atas dasar harga konstan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara yaitu Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021. Dengan metode analisis LQ, Shift Share dan Tipology Klassen. Dan hasil location quotient menunjukkan bahwa sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya merupakan sektor basis di Kabupaten Minahasa Utara. Dan dari hasil shift share menunjukkan bahwa sektor-sektor yang ada di Kabupaten Minahasa Utara mampu berkembang dan mengalami pergeseran pada setiap tahunnya serta memiliki daya saing yang tinggi dan untuk hasil analisis tipologi klassen menunjukkan bahwa sektor-sektor yang tergolong sektor maju dan berkembang pesat adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa lainnya

Kata Kunci: Sektor Basis, Sektor non Basis, Sektor Unggulan, Location Quotient (LQ), Shift Share (SS), Tipologi Klassen, Produk Domestik Regional Bruto (ADHK)

ABSTRACT

This study attempts to analyze Basis sector in North Minahasa. Basic problem occurring in the economy and the economy both at the center and the area. As the data used in research Product domestic bruto the constant price in 2017-2021 years in North Minahasa with the method analysis LQ, Shift Share and Tipology Klassen. As for the data used in this research was secondary data obtained from the central bureau of statistics north Sulawesi and regional gross domestic product on the constant prices of 2017-2021 years. With the method of analysis lq, the share and tipology klassen. And the research results show that the water supply, waste management, waste and recycling, in terms of retail and big trade; reparations cars and motorcycles, transportation and warehousing, the provision of accommodation and to eat and drink, information and communication, financial services and insurance, services company, administration, social security and defense must, healthcare and social activities and other service sector is kabupaten north minahasa bases. And from the shift suggests that share sectors in districts north minahasa capable of developing and diverted on each year and has high competitiveness and The results of the analysis shows that typologies klassen sectors is forward and booming sector is the electricity and gas, procurement water supply, waste management, waste and recycling, financial services and insurance, real estate, business services, administrative, defense and to social security, and health service and social activities other service sector

Keyword: Base sector, Non sector the base, superior sectors, Location Quotient (LQ), Shift Share (SS), Tipologi Klassen Product domestic regional bruto the constant price

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang terjadi di negara sedang berkembang pada umumnya termasuk didalamnya Indonesia, dari segala macam aspek kehidupan manusia kehidupan baik material maupun spiritual untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan

berdasarkan tujuan Negara yang tertuang dalam Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional tidak pernah lepas dari peran serta pembangunan daerah serta peran pemerintah, mengingat pembangunan daerah merupakan integrasi dari pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian di wilayah atau daerahnya masing-masing dengan upaya peningkatan kapasitas hidup masyarakat menjadi lebih baik, untuk itu perlu adanya perencanaan terlebih dahulu didalam proses pembangunan suatu negara.

Salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah membangun perekonomian wilayah tersebut agar memiliki daya saing yang tinggi agar terus tumbuh dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain. Dalam melakukan pembangunan ekonomi dibutuhkan berbagai kriteria khusus dalam menentukan sektor-sektor basis atau sektor unggulan. Terlebih di era globalisasi seperti saat ini, negara berkembang seperti Indonesia yang mengharuskan setiap wilayah memiliki potensi khusus yang harus dikembangkan agar tidak jauh tertinggal dengan perkembangan ekonomi di negara-negara maju.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Begitu pula dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya dengan cara mengadakan pembangunan disegala bidang. Sesuai dengan tujuan pembangunan dan keinginan rakyat demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual. Arah kebijakan ekonomi adalah mengembangkan perekonomian yang berorientasi pada kemajuan teknologi dan membangun kebasis kompetitif berdasarkan kebasis komperatif sebagai negara agraris. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berbasis dan sesuai dengan kompetisi produk basis setiap daerah terutama setelah adanya otonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Arsyad, 2015). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, sektor basis dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antardaerah dan antarsektor.

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan (Produk Domestik Bruto) PDB dan PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tenram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Arsyad, 2015). Sektor basis merupakan sektor perekonomian yang menjadi sektor dominan atau sektor yang menonjol dari suatu daerah. Dengan diketahui sektor basis suatu daerah maka pemerintah dan masyarakat daerah tersebut dapat terus mengembangkannya, sehingga sektor basis tersebut dapat menjadi sektor yang menguntungkan. Dan dengan adanya sektor basis maka dapat diketahui pula sektor-sektor yang tidak dominan dari daerah tersebut, sehingga pemerintah dapat mengupayakan atau mendorong sektor-sektor tersebut agar dapat menjadi sektor yang lebih kuat.

Sektor basis dapat diketahui salah satunya dengan menggunakan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2010). Beberapa kegunaan serta analisis yang dapat diperoleh dari data PDRB antara lain besaran PDRB dapat digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Secara struktur ekonomi, PDRB dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang dominan di suatu daerah. PDRB juga dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah pada suatu periode tertentu, dan dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia telah mengalami perubahan setelah dilakukannya sensus ekonomi pada tahun 2010 dengan 17 sektor

yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik, Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estat, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa lainnya.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang cakupan wilayahnya cukup besar dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang potensial, dan dari hasil pendapatan dari berbagai macam sektor-sektor lapangan usaha serta dengan adanya pembangunan daerah yang di lakukan pada masing-masing daerah baik kabupaten maupun kota, yang terbagi dari 4 kota dan 11 kabupaten didalamnya, dan dari ke 15 kabupaten/kota ada salah 1 daerah yang sekarang menjadi sasaran pembangunan dan wisata daerah yakni Kabupaten Minahasa Utara, dan jika di bandingkan dengan 11 kabupaten lainnya, nilai Produk Domestik Regional Bruto Minahasa Utara berada ke dua tertinggi setelah Kabupaten Minahasa, berikut dalam tampilan tabel 1.

Tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat dilihat berdasarkan data publikasi dari badan pusat statistic menunjukkan perkembangan yang cukup besar pada Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2019-2021, dan hal ini tentunya tidak lepas dari peranan sektor-sektor lapangan usaha yang mampu menunjang akan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.

Kabupaten Minahasa Utara (sering disingkat Minut) dengan pusat pemerintahan dan ibu kota di Airmadidi, terletak memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara dua kota, yaitu Manado dan kota pelabuhan Bitung. Kabupaten ini juga merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar jika dilihat dari kondisi geografis serta dilihat dari bagaimana perkembangan dan pergerakan sektor-sektor yang ada, dan untuk ukuran kondisi ekonomi dan perkembangan ekonomi yang terjadi di Minahasa utara dapat dilihat dari grafik perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan berikut :

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari angka 8288057 menyentuh angka 9884318, dan ini terjadi karena adanya peningkatan dari 17 sektor lapangan usaha yang mampu menunjang akan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto sehingga mampu bersaing dengan daerah-daerah yang ada di sekitar lingkup Provinsi Sulawesi Utara, Mengingat dewasa ini tingkat persaingan antar daerah maupun dengan dunia internasional sudah semakin ketat, maka sesuai dengan prinsip *Teori Ekonomi Regional*, maka potensi utama suatu daerah seharusnya dilihat dari sudut pandang Keuntungan Komperatif (*Comparative Advantage*) dari sektor, sub sektor dan komoditi tertentu secara relatif terhadap daerah lain (Sjafrizal, 2015 : 185).

Berdasarkan latar belakang dimana Kabupaten Minahasa Utara merupakan Kabupaten yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan namun disisi lain Kabupaten Minahasa Utara memiliki beberapa sektor yang dianggap kurang menguntungkan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai beberapa permasalahan sebagai berikut yaitu dalam menentukan sektor basis dan non basis di wilayah Kabupaten Minahasa Utara serta bagaimana kontribusi sektor unggulan, potensial, sektor berkembang bahkan yang tertinggal terhadap perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara. Penjelasan latar belakang maka penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti permasalahan yang terkait dengan judul penelitian “Analisis Sektor Basis di Kabupaten Minahasa Utara”

Perumusan Masalah

1. Sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis serta sektor unggulan perekonomian di wilayah Kabupaten Minahasa Utara ?
2. Bagaimana perubahan struktur perekonomian di wilayah Kabupaten Minahasa Utara ?
3. Sektor ekonomi manakah yang merupakan sektor maju, potensial, berkembang dan relative tertinggal di Kabupaten Minahasa Utara ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis yang ada serta sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Utara
2. Untuk mengetahui perubahan struktur perekonomian di wilayah Kabupaten Minahasa Utara
3. Untuk mengetahui sektor yang merupakan sektor maju, potensial, berkembang dan relative tertinggal di Kabupaten Minahasa Utara

Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai masalah-masalah perencanaan pembangunan dan perkembangan daerah serta upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kebijakan- kebijakan khususnya di Kabupaten Minahasa Utara
2. Menambah wawasan serta pengetahuan dalam ilmu ekonomi tentang Ekonomi Regional terkait gambaran potensi sektor ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara
3. Manfaat praktis, diharapkan pula bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dalam penelitian bidang ekonomi regional dengan ruang lingkup dan kajian yang berbeda

Landasan Teori**Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses meningkatnya kondisi ekonomi negara secara persisten menuju kondisi ekonomi yang lebih baik pada periode jangka waktu yang ditentukan (Wulandari & Zuhri, 2019).

Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Gilis et al (2004), Produk Nasional Bruto (PNB) adalah penjumlahan nilai produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) tanpa menghitung nilai produk antara

Sektor Basis Ekonomi

Teori basis dikemukakan oleh Harry W. Richardson yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad, 2000).

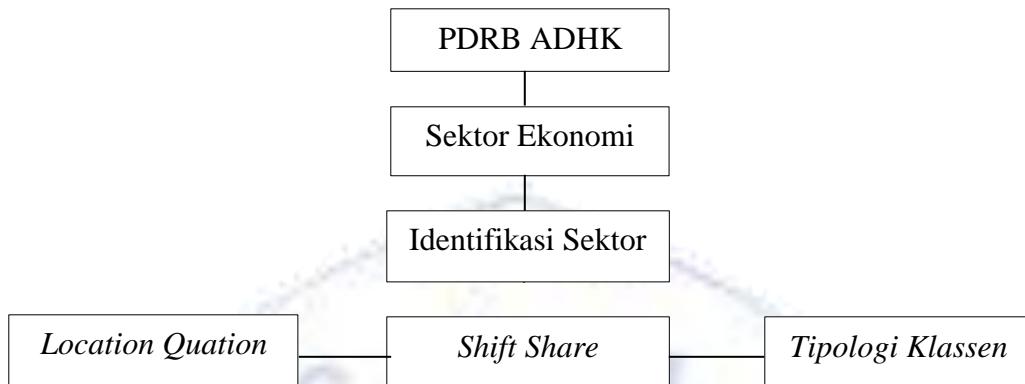
Sektor Unggulan

Menurut (Tri Widodo 2006) dalam bukunya berargumen bahwa sektor unggulan merupakan suatu sistem atau kondisi dimana pertumbuhan ataupun perkembangannya dapat mempengaruhi sektor komoditas lain, baik komoditi yang besifat suplay input ataupun komoditi yang mana memanfaatkan output yang dimiliki sebagai input dalam proses produksi.

Penelitian Terdahulu

Mohammad Setiawan 2016 “Analisis Sektor Ekonomi Basis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Batu” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor-sektor yang potensial dan untuk mengetahui sektor-sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif serta kriteria pertumbuhan tiap sektornya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga konstan. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada Kota Batu tahun 2008-2012. alat analisis yang digunakan untuk penelitian ini yaitu analisis kontrbusi sektoral, LQ, shift share, MRP dan tipologi klassen. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Batu berada pada puncak kemakmuran dari tahun 2008-2012 Kota ini selalu mengalami peningkatan. Sektor-sektor yang patut dikembangkan di Kota Batu yaitu sektor pertanian, listrik gas dan air bersih, perdagangan hotel dan restoran serta jasa-jasa. Karena dari empat sektor tersebut cukup berkontribusi dalam pembentukan nilai PDRB Kota Batu.

Kerangka Pemikiran



2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang tercakup dalam penelitian ini adalah data PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Minahasa Utara, demikian juga data PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan, disertai dengan data-data sekunder lain yang relevan dengan tujuan penulisan thesis ini..

Metode Analisis

Location Quotient

Location quotient merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk melengkapi analisis shift-share. Secara umum, analisis ini digunakan untuk menentukan sektor basis dan non basis, dengan tujuan untuk melihat keunggulan komparatif suatu daerah dalam menentukan sektor unggulannya. Dalam teknik ini, menurut Tarigan (2005) kegiatan ekonomi suatu daerah dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1. Sektor basis adalah sektor ekonomi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Artinya sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor unggulan;
2. Sektor non basis merupakan sektor ekonomi yang hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri, sektor seperti ini dikenal sebagai sektor non unggulan.

Rumusan Location Quotient (LQ) menurut Bendavid Val (Tarigan 2009), yang kemudian digunakan dalam penentuan sektor basis dan non basis di dalam penelitian ini, yang dinyatakan dalam persamaan berikut :

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}}{R_{Vj}} / \frac{X_i}{R_V}$$

Shift Share

Analisis shift-share digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya. Untuk mengkaji kinerja berbagai sektor ekonomi yang berkembang di suatu daerah dan membandingkan dengan perekonomian regional maupun nasional dapat digunakan teknik analisis Shift-Share. Dengan teknik ini, selain dapat mengamati penyimpangan-penyimpangan dari berbagai perbandingan kinerja perekonomian antar wilayah,

keunggulan kompetitif suatu wilayah juga dapat diketahui melalui teknik analisis Shift-share ini (Thoha dan Soekarni, 2000:52).

Metode analisis shift share diawali dengan mengukur perubahan nilai tambah bruto atau PDRB suatu sektor-i di suatu region-j (Dij) dengan formulasi :

$$Dij = PNij + PPij + PPWij$$

Tipologi Klassen

Analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah adalah Analisis Tipologi Klassen/Daerah (Tarigan, 2010). Kriteria yang digunakan terdiri dari empat; Kuadran I yakni daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*). Kuadran II yakni daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*). Kuadran III yakni daerah berkembang *cepat* (*high growth but low income*). Kuadran IV adalah daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis LocationQuotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor Ekonomi dalam PDRB yang dapat digolongkan ke dalam sektor basis dan non basis. LQ Merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di Kabupaten Minahasa Utara terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 1

Hasil Perhitungan Indeks *Location Quotient* Kabupaten Minahasa Utara
Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Dari Tahun 2017-2021

Sektor Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.74972	0.75203	0.75169	0.75755	0.77293	0.75678	non basis
Pertambangan dan Penggalian	0.46076	0.45371	0.45482	0.44322	0.40901	0.44431	non basis
Industri Pengolahan	0.75476	0.74133	0.74398	0.75473	0.76201	0.75136	non basis
Pengadaan Listrik dan Gas	0.96822	0.95443	0.98663	0.97802	0.99763	0.97698	non basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.71892	1.70512	1.73142	1.73270	1.72283	1.72220	Basis
Konstruksi	0.87615	0.88825	0.88774	0.91666	0.90139	0.89404	non basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.35799	1.35196	1.36767	1.37348	1.39833	1.36989	Basis
Transportasi dan Pergudangan	1.99340	1.99463	1.95841	1.96426	2.01641	1.98542	Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.13418	2.09871	2.05425	1.93685	1.96233	2.03726	basis/unggulan
Informasi dan Komunikasi	2.27258	2.26670	2.24259	2.29937	2.33421	2.28309	Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.24608	4.14062	4.14169	4.10795	4.09082	4.14543	basis/unggulan
Real Estate	0.62204	0.61525	0.60225	0.60844	0.62665	0.61493	non basis
Jasa Perusahaan	5.06148	5.08518	5.02396	5.06142	5.06578	5.05956	basis/unggulan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.93680	2.02649	2.03840	2.05587	2.03412	2.01834	basis/unggulan
Jasa Pendidikan	0.86207	0.86982	0.89177	0.88548	0.88444	0.87872	non basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.43996	1.47007	1.45006	1.44442	1.54597	1.47010	Basis
Jasa lainnya	2.60120	2.67657	2.84609	2.86606	2.71617	2.74122	basis/unggulan
PDRB	1	1	1	1	1	1	

Sumber : data olahan ms excel 2013

Berdasarkan hasil olahan analisis location quotient dapat dilihat bahwa yang menjadi sektor unggulan dari ke 17 sektor yang pertama adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai rata-rata 1.72220 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai rata-rata 1.36989, sektor Transportasi dan Pergudangan

dengan nilai rata-rata 1.98542, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai rata-rata 2.03726, sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai rata-rata 2.28309, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan nilai rata-rata yang tertinggi kedua dan unggul yakni sebesar 4.14543, sektor Jasa Perusahaan dengan nilai rata-rata yang tertinggi diantara 17 sektor lainnya yakni mencapai angka 5.05956, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan rata-rata nilai 2.01834, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai rata-rata 1.47010 dan sektor Jasa lainnya dengan nilai rata-rata yang di peroleh adalah sebesar 2.74122.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dan tabel perbandingan sektor basis diatas dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut : LQ lebih > 1 , maka ini merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi Kabupaten Minahasa Utara lebih tinggi dari tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Sektor basis atau unggulan mempunyai dampak yang positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi daerah sendiri (intraregional) dan sektor ekonomi daerah lainnya (interregional).

Sektor basis ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan di Kabupaten Minahasa Utara, tetapi mampu memenuhi kebutuhan daerah lainnya sehingga sektor basis (unggulan) merupakan sektor yang berpotensi ekspor. Untuk sektor non basis Berdasarkan hasil perhitungan LQ dan tabel penentuan sektor basis dan non basis diatas dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut : LQ lebih < 1 , merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat provinsi, dan Jika LQ = 1, maka tingkat spesialisasi kabupaten sama dengan tingkat provinsi.

Hasil Analisis Shift Share

Analisis shift share yaitu membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah dengan wilayah dalam hal ini Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil analisis *shift share* dengan pendekatan klasik yang menunjukkan secara keseluruhan sektor di Kabupaten Minahasa Utara memiliki nilai komponen N_{ij} yang positif. Hal ini menggambarkan pertumbuhan sektor-sektor tersebut secara positif dipengaruhi oleh pertumbuhan Provinsi. Dalam hal ini kebijakan umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara.

Tabel 2
Analisis Shift Share Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017-2021
(Juta Rupiah)

Sektor	N _{ij}	M _{ij}	C _{ij}	D _{ij}
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9.01871E-05	-6.67224E-05	99.99997654	1.7253E+20
Pertambangan dan Penggalian	7.92466E-05	9.34853E-06	99.9999114	5.2002E+19
Industri Pengolahan	4.09881E-05	5.43094E-06	99.99995358	1.9189E+20
Pengadaan Listrik dan Gas	0.0035558349	4.68726E-06	99.99643696	2.8796E+16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.003698429	2.64347E-06	99.99629893	2.6672E+16
Konstruksi	3.01076E-05	4.49696E-06	99.9999654	3.5043E+20
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.27928E-05	3.08251E-06	99.99996412	3.1034E+20
Transportasi dan Pergudangan	5.33674E-05	2.23338E-06	99.9999444	1.2304E+20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.000220153	2.23823E-06	99.99977761	7.4571E+18
Informasi dan Komunikasi	8.91078E-05	1.97883E-06	99.99990891	4.4982E+19
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.00011695	1.10447E-06	99.99988195	2.6444E+19
Real Estate	0.000116214	7.08551E-06	99.9998767	2.5479E+19
Jasa Perusahaan	0.005395085	8.55517E-07	99.99460406	1.2541E+16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.64926E-05	2.2149E-06	99.99993129	7.9916E+19
Jasa Pendidikan	0.000168861	5.10082E-06	99.99982604	1.2429E+19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.000104634	3.05115E-06	99.99989232	3.2403E+19
Jasa Lainnya	0.000264702	1.67083E-06	99.99973363	5.1780E+18
PDRB	2.31113E-06	2.31113E-06	99.99999538	3.4177E+22

Sumber : Data diolah M.S Excel 2013

Pengaruh pertumbuhan ekonomi Sulawesi utara (*national growth effect / national share*) terhadap perekonomian regional Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan nilai yang positif terhadap semua sektor ekonomi dengan total nilai output yakni sebesar 2.31113E-06, hal ini berarti bahwa pertumbuhan regional Minahasa Utara tumbuh lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan rata-rata provinsi Sulawesi utara. Dan untuk sektor yang memiliki pertumbuhan paling cepat di kabupaten Minahasa Utara adalah sektor informasi dan komunikasi dengan angka komponen Ns yang paling tinggi dari seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara yakni sebesar 8.91078E-05.

Pergeseran Proporsional (*proportional shift*) secara keseluruhan atau total maka perekonomian regional Kabupaten Minahasa Utara tergolong maju hal ini dapat dilihat dari nilai PS total yang positif yaitu sebesar 2.31113E-06, jika ditinjau secara sektoral hanya pertanian dan perikanan yang lambat kemajuan atau pertumbuhannya dibandingkan dengan sektor yang sama pada level perekonomian Provinsi Sulawesi utara sebab sektor ini memiliki nilai PS sektoral yang nilainya paling rendah yaitu sebesar (-6.67224E-05). sedangkan untuk sektor ekonomi lainnya sudah tergolong maju atau cepat pertumbuhannya dibandingkan sektor yang sama pada level perekonomian Sulawesi Utara sebab sektor-sektor ekonomi tersebut memiliki nilai positif dan cenderung lebih besar dari pertumbuhan sektor konstruksi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.

Pergeseran Diferensial (*Differential Shift*) secara keseluruhan atau total maka perekonomian regional kabupaten Minahasa Utara memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif regional yang tinggi atau kuat terhadap perekonomian Sulawesi Utara. Hal ini terlihat pada nilai DS total yang positif yakni sebesar 3.4177E+22. Secara sektoral ada salah satu sektor yang memiliki pertumbuhan lambat yaitu sektor transportasi dan pergudangan yaitu dengan nilai (1.2304E+20) namun diluar sektor ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara memiliki nilai DS yang positif. Sektor-sektor yang memiliki nilai positif ini berarti bahwa sektor ekonomi tersebut memiliki daya saing yang kuat atau memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi terhadap sektor yang sama pada level perekonomian di Sulawesi Utara. Nilai Dij yang positif baik secara sektoral maupun total mengandung arti bahwa selama kurun waktu tahun 2017-2021 maka perekonomian regional Kabupaten Minahasa Utara tetap mengalami pertambahan nilai absolute atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar 99.9999538.

Tipologi Klassen

Tabel 3
Kontribusi Sektoral Terhadap Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2017-2021

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26.5419	25.8470	25.9095	26.5202	25.3619
Pertambangan dan Penggalian	10.8967	11.3600	11.6409	11.9052	12.9872
Industri Pengolahan	13.3510	13.3973	12.6742	13.1768	13.6482
Pengadaan Listrik dan Gas	0.1276	0.1265	0.1265	0.1380	0.1390
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.0726	0.0714	0.0695	0.0731	0.0710
Konstruksi	15.2099	15.1668	15.1972	14.2577	14.8909
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.3725	9.3924	9.5630	9.4553	9.2233
Transportasi dan Pergudangan	4.3681	4.4423	4.5176	3.9217	3.7334
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.0887	1.1067	1.1001	0.8726	0.9321
Informasi dan Komunikasi	2.0769	2.1177	2.1876	2.3856	2.3099
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.9434	0.9171	0.9004	0.9714	0.9859
Real Estate	0.0156	0.0160	0.0166	0.0157	0.0154
Jasa Perusahaan	0.0156	0.0160	0.0166	0.0157	0.0154
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.6245	3.4396	3.2352	3.2036	3.1984
Jasa Pendidikan	2.8919	2.9480	3.0499	3.1400	3.0541
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.7210	2.7800	2.8577	3.1407	3.0454
Jasa Lainnya	0.6294	0.6454	0.6651	0.5966	0.6205
PDRB	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

Sumber : Data diolah M.S Excel 2013

Kontribusi sektor lapangan usaha Provinsi Sulawesi Utara dilihat secara keseluruhan dari 17 sektor, untuk kontribusi dari sektor-sektor yang mengalami peningkatan kontribusi dari masing-masing sektor lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara sisanya untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor jasa lainnya justru berbanding terbalik dan mengalami penurunan nilai dari tahun 2017-2021.

Tabel 4
Kontribusi Sektoral Terhadap Kabupaten Minahasa Utara
Tahun 2017-2021

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19.8996	19.4383	19.4763	20.0909	19.6034
Pertambangan dan Penggalian	5.0212	5.1545	5.2949	5.2770	5.3122
Industri Pengolahan	10.0774	9.9324	9.4299	9.9456	10.4007
Pengadaan Listrik dan Gas	0.1246	0.1217	0.1257	0.1359	0.1395
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.1267	0.1235	0.1220	0.1284	0.1239
Konstruksi	13.3269	13.4726	13.4919	13.0702	13.4231
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.7291	12.6994	13.0803	12.9879	12.8985
Transportasi dan Pergudangan	8.7095	8.8629	8.8491	7.7051	7.5300
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.3259	2.3248	2.2620	1.6920	1.8310
Informasi dan Komunikasi	4.7225	4.8026	4.9082	5.4876	5.3939
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.0106	3.8020	3.7334	3.9947	4.0373
Real Estate	3.7634	3.8198	3.7778	3.7781	3.6146
Jasa Perusahaan	0.0848	0.0872	0.0885	0.0847	0.0831
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.0221	6.9725	6.5966	6.5882	6.5079
Jasa Pendidikan	2.4939	2.5650	2.7207	2.7813	2.7019
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.9197	4.0884	4.1452	4.5379	4.7095
Jasa Lainnya	1.6401	1.7305	1.8957	1.7128	1.6879
PDRB	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

Sumber : data diolah

Kontribusi per sektor lapangan usaha terhadap produk domestic regional bruto atas dasar harga konstan, bila di lihat bahwa terhitung tahun 2017-2021 yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, ada sebagian sektor mengalami peningkatan angka kontribusi diantaranya sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri dan pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya.

Melalui hasil kontribusi sektoral baik di Provinsi Sulawesi Utara maupun Kabupaten Minahasa Utara dapat diketahui nilai rata-rata masing-masing yang ada di tampilkan pada gambar berikut :

Tabel 5
Hasil Typologi Klassen

Sektor Lapangan Usaha	g, gi	s, si	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,04 % > 2,37 %	19,70 % < 26,04 %	Masih bisa berkembang dan potensial
Pertambangan dan Penggalian	4,51 % > 1,07 %	5,21 % < 11,76 %	Masih bisa berkembang dan potensial
Industri Pengolahan	8,61 % > 1,20 %	9,96 % < 13,25 %	Masih bisa berkembang dan potensial
Pengadaan Listrik dan Gas	112,25 % > 12,02 %	0,13 % = 0,13 %	Maju dan berkembang pesat
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	108,07 % > 6,53 %	0,12 % > 0,07 %	Maju dan berkembang pesat
Konstruksi	11,55 % > 1,36 %	13,36 % < 19,94 %	Masih bisa berkembang dan potensial
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,14 % < 857, 98 %	12,88 % > 9,40 %	Maju tapi tertekan
Transportasi dan Pergudangan	7,19 % < 381,97 %	8,33 % > 4,20 %	Maju tapi tertekan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,79 % < 92,79	2,09 % > 1,02 %	Maju tapi tertekan
Informasi dan Komunikasi	4,39 % < 202, 6 %	5,06 % > 2,22 %	Maju tapi tertekan
Jasa Keuangan dan Asuransi	338 % > 86 %	3,92 % > 0,94 %	Maju dan berkembang pesat
Real Estate	3244 % > 556 %	3,75 % > 0,02 %	Maju dan berkembang pesat
Jasa Perusahaan	74,12 % > 1,44 %	0,09 % > 0,02 %	Maju dan berkembang pesat
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5821 % > 304 %	6,74 % > 3,34 %	Maju dan berkembang pesat
Jasa Pendidikan	2299 % > 275 %	2,65 % < 2,91 %	Masih bisa berkembang dan potensial
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3714 % > 266 %	4,28 % > 2,91 %	Maju dan berkembang pesat
Jasa lainnya	1501 % > 56 %	1,73 % > 0,63 %	Maju dan berkembang pesat

Sumber : data diolah

Hasil dari tipologi klassen dapat di jelaskan Dimana ada beberapa sektor yang tergolong maju dan berkembang pesat diantaranya sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan dampah limbah dan daur ulang, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan pertahanan jaminan sosial wajib, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya.

Tabel 6
 Perbandingan Hasil Analisis Location Quotient, Shift Share dan Tipologi Klassen
 Kabupaten Minahasa Utara

Sektor Lapangan Usaha	Basis/unggulan	Mij	Maju dan Berkembang pesat	
			g, gi	s, si
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.7567835	-6.67224E-05	17,04 > 2,37	19,70 < 26,04
Pertambangan dan Penggalian	0.4443060	9.34853E-06	4,51 > 1,07	5,21 < 11,76
Industri Pengolahan	0.7513611	5.43094E-06	8,61 > 1,20	9,96 < 13,25
Pengadaan Listrik dan Gas	0.9769848	4.68726E-06	112,25 > 12,02	0,13 = 0,13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.7221996	2.64347E-06	108,07 > 6,53	0,12 > 0,07
Konstruksi	0.8940365	4.49696E-06	11,55 > 1,36	13,36 < 19,94
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.3698858	3.08251E-06	11,14 < 857,98	12,88 > 9,40
Transportasi dan Pergudangan	1.9854191	2.23338E-06	7,19 < 381,97	8,33 > 4,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.0372631	2.23823E-06	1,79 < 92,79	2,09 > 1,02
Informasi dan Komunikasi	2.2830896	1.97883E-06	4,39 < 202, 6	5,06 > 2,22
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.1454316	1.10447E-06	338 > 86	3,92 > 0,94
Real Estate	0.6149276	7.08551E-06	3244 > 556	3,75 > 0,02
Jasa Perusahaan	5.0595619	8.55517E-07	74,12 > 1,44	0,09 > 0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.0183354	2.2149E-06	5821 > 304	6,74 > 3,34
Jasa Pendidikan	0.8787163	5.10082E-06	2299 > 275	2,65 < 2,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.4700971	3.05115E-06	3714 > 266	4,28 > 2,91
Jasa lainnya	2.7412202	1.67083E-06	1501 > 56	1,73 > 0,63

Dari hasil perbandingan dapat dilihat bahwa diantara ke 17 sektor PDRB yang ada sektor jasa perusahaan merupakan salah satu sektor yang tergolong sektor basis unggulan dengan nilai rata-rata yang di peroleh sebesar 5,0595619 kemudian juga termasuk dalam salah satu kategori sektor yang pergeserannya berjalan dengan cepat serta memiliki daya saing dengan nilai Pergeseran Diferensial (Differential Shift) sebesar 8.55517E-07 dan juga merupakan sektor yang maju dan berkembang pesat.

Pembahasan

Kondisi pandemi Covid-19 yang tidak kunjung menurun memberi dampak amat besar pada Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuna Hutapea (2020) dengan judul penelitian “Analisis Sektor Basis dan Non Basis serta daya saing ekonomi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Medan” menunjukkan hasil penelitian dimana dari hasil analisis location quotient terdapat 12 sektor basis yaitu: sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya dan jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang menunjukkan sektor basis di Kabupaten Minahasa Utara maka ada beberapa sektor yang memiliki kesamaan diantaranya sektor pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor jasa perusahaan, sementara untuk hasil penelitian dari Meylizha Herawaty Dalughu (2019) dengan judul penelitian “Analisis sektor basis di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010-2019” menunjukkan hasil bahwa sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan justru merupakan salah satu sektor basis dan unggulan di Kabupaten Sangihe, yang jika di bandingkan dengan Minahasa Utara sektor ini merupakan sektor non basis. Dan dari hasil Shift Share menjelaskan bahwa perekonomian regional Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan nilai yang positif terhadap semua sektor ekonomi Dan untuk sektor yang memiliki pertumbuhan paling cepat di kabupaten Minahasa Utara adalah sektor informasi dan komunikasi, Pergeseran Proporsional (proportional shift) secara keseluruhan atau total maka perekonomian regional Kabupaten Minahasa Utara tergolong maju, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldi Eko Wicaksono 2019

“Analisis Sektor Basis dan Non Basis pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Madiun Tahun 2013-3017” dimana sektor informasi komunikasi merupakan alih satu sektor yang memiliki pertumbuhan paling cepat. dan dari hasil analisis tipologi klasen diperoleh hasil dimana ada beberapa sektor yang dapat maju dan berkembang pesat, khususnya di daerah Kabupaten Minahasa Utara yakni sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan dampah limbah dan daur ulang, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan pertahanan jaminan sosial wajib, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya dan dari hasil analisis yang dilakukan di Sangihe dimana sektor maju dan berkembang pesat adalah sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, tentunya hal ini berbanding terbalik dengan Minahasa Utara dimana dalam hasil sektor ini merupakan salah satu sektor mau tetapi tertekan.

Peningkatan dari sektor-sektor yang ada dalam menunjang perekonomian daerah Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu tingkat keberhasilan yang yang diperoleh, dan diantara ke 17 sektor, sektor jasa perusahaan merupakan salah satu sektor yang memenuhi ketiga kategori baik unggulan, pergeseran diferensiasi bahkanpun merupakan sektor dengan tingkat kemajuan yang cepat. pergerakan jasa perusahaan di Kabupaten Minahasa Utara saat ini mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap daerah bahkan ke tingkat Provinsi Sulawesi Utara, hal ini di karenakan kondisi geografis Kabupaten Minahasa Utara yang strategis. Keunggulan geoekonomi bertumpu pada lokasi Likupang Timur di Kabupaten Minahasa Utara memiliki orientasi geografis wilayah berdekatan dengan Bandara Internasional Sam Ratulangi dan pelabuhan Bitung. KEK Likupang diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp.5T dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 65.300 tenaga kerja hingga tahun 2040. Keunggulan geostrategis wilayah yang dimiliki Likupang Timur yaitu sektor pariwisata dengan tema resor (resort) dan wisata budaya (cultural tourism). Seperti yang di ketahui bersama bahwa daerah Minahasa Utara pada saat ini menjadi salah satu daerah yang banyak diminati pengujung wisatawan dikarenakan minat masyarakat terhadap keindahan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa Utara yang berada di Sekitar Wilayah Likupang, yang dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata ternama di Provinsi Sulawesi Utara. Maka dari itu pemanfaatan asset geografis daerah ini mampu menarik para investor didalam membangun usaha yang wilayahnya berdekatan dengan sasaran wisata masyarakat, untuk itu jasa perusahaan memiliki peranan penting didalam keberlangsungan kegiatan ini yang dampaknya tidak hanya di rasakan oleh Kabupaten Minahasa Utara sendiri tetapi mampu memberi kontribusi yang besar terhadap perkembangan perekonomian di wilayah yang lebih luas Khususnya Provinsi Sulawesi Utara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil analisis *Location Quotient* menunjukkan bahwa sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor , sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan sektor jasa lainnya merupakan sektor basis unggulan di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pergeseran Proporsional secara keseluruhan atau total maka perekonomian regional Kabupaten Minahasa Utara tergolong maju, untuk sektor ekonomi lainnya sudah tergolong maju atau cepat pertumbuhannya dibandingkan sektor yang sama pada level perekonomian sulit sebab sektor-sektor ekonomi tersebut memiliki nilai positif dan cenderung lebih besar dari pertumbuhan sektor konstruksi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Pergeseran Diferensial secara keseluruhan atau total maka perekonomian regional kabupaten Minahasa Utara memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif regional yang tinggi atau kuat terhadap perekonomian Sulawesi Utara dan selama kurun waktu tahun 2017-2021 maka perekonomian regional kabupaten Minahasa Utara tetap mengalami pertambahan nilai absolute atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah.

- Hasil analisis Tipology Klassen menunjukkan bahwa sektor yang tergolong sektor maju dan tumbuh dengan cepat di Kabupaten Minahasa Utara adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya

Saran

- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam upaya meningkatkan PDRB agar lebih mengutamakan pengembangan sektor sektor unggulan dengan tidak mengabaikan sektor lain dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa lainnya memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian wilayah Kabupaten Minahasa Utara perlu mendapatkan prioritas pengembangan sehingga memberikan dampak yang positif bagi peningkatan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan lapangan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincoln. 2000. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : STIE YKPN.

Arsyad, Lincoln. 2015. Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Ayuna Hutapea 2020. “Analisis Sektor Basis dan Non Basis serta daya saing ekonomi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Medan” Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado

Aldi Eko Wicaksono 2019 “Analisis Sektor Basis dan Non Basis pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Madiun Tahun 2013-3017” Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

BPS Sulut 2017-2022

Gillis et all 2004. *Economic of Development, fourth edition*, W.W Norton & Company

Meylizha Herawaty Dalughu 2019 “Analisis sektor basis di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010-2019” jurnal Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi Manado

Mohammad Setiawan 2016 “Analisis Sektor Ekonomi Basis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Batu” <https://jimfeb.ub.ac.id/index>

Miftah Thoha. 2002. Perilaku Organisasi dan aplikasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sjafrizal. 2015. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers

Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi cetakan ke empat. Jakarta: PT. Bumi Aksara

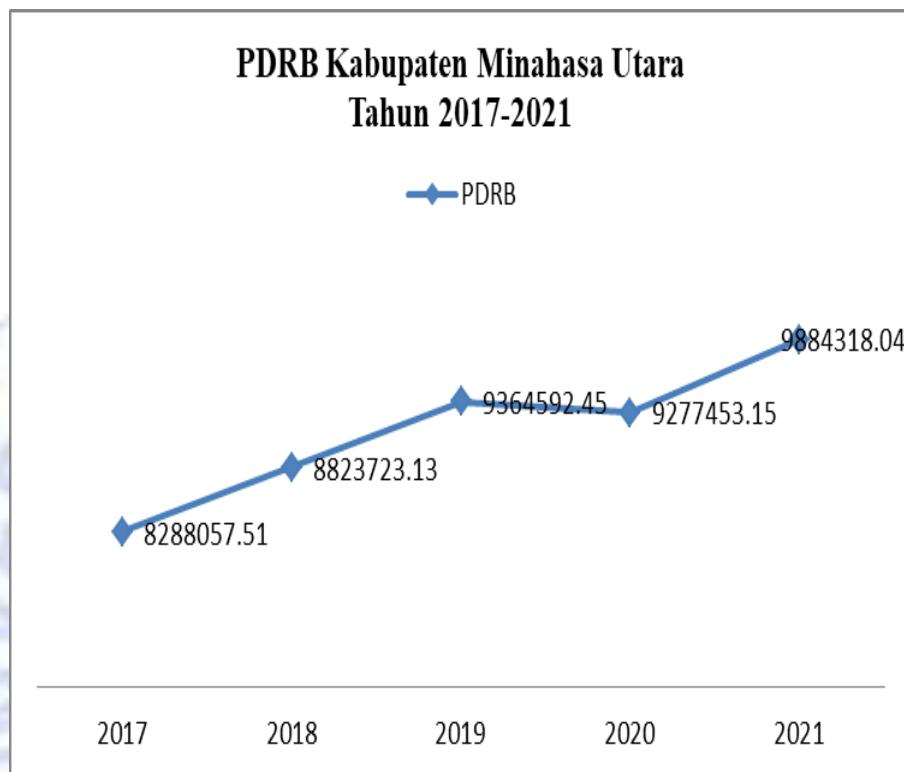
Tarigan, Robinson. 2007. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi cetakan ke empat. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). UUP STIM YKPN. Yogyakarta.

Wulandari, Iaili monita, & Zuhri, S. (2019). Pengaruh Perdagangan Internasional dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2007 - 2017. REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 4(2), 119–127. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP> ISSN:

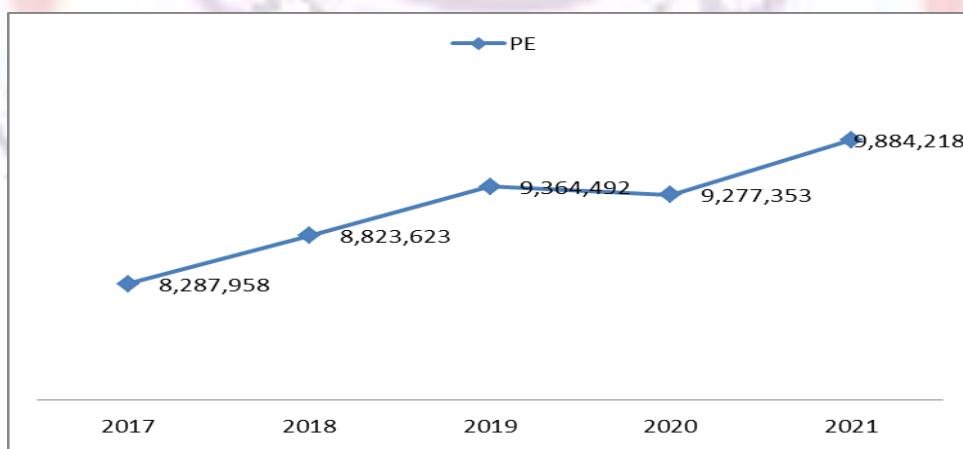
LAMPIRAN

Grafik 1
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto(ADHK) Minahasa Utara
Tahun 2017-2021



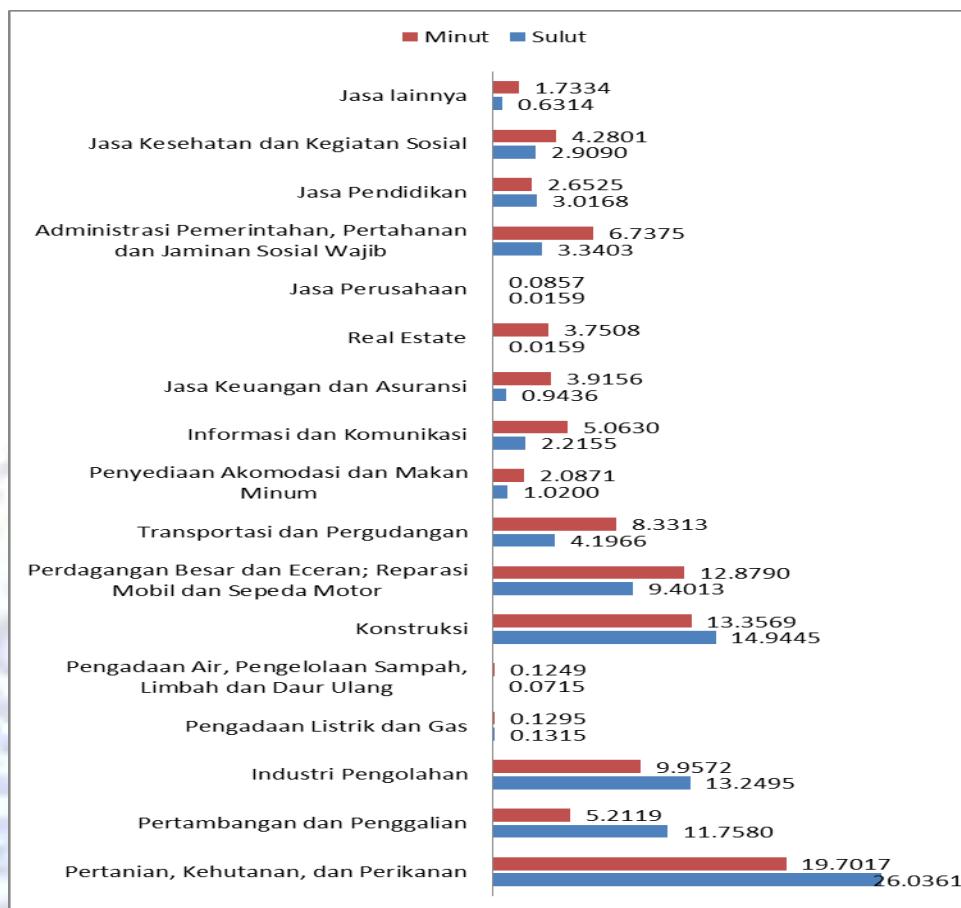
Sumber : BPS Minahasa Utara 2018-2022

Grafik 2
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara
Tahun 2017-2021



Sumber : Data diolah

Gambar 3
Perbandingan Rata-Rata Prov. Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa Utara



Sumber : Data Diolah M.S Excel 2013

ANALISIS AGLOMERASI INDUSTRI OLAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA KOTAMOBAGU

Johan Sofian Boulu¹, Vecky A. J. Masinambow², Een Novritha Walewangko³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi, Manado

E-mail: Sofian.boulu@gmail.com, veckymasinambow@yahoo.com, eenwalewangko@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konsentrasi aglomerasi industri olahan di Kota Kotamobagu, menganalisis pengaruh aglomerasi industri olahan terhadap PDRB ADHK per kapita, menganalisis pengaruh industri olahan terhadap PDRB ADHK per kapita, menganalisis pengaruh tenaga kerja yang bekerja di industri olahan terhadap PDRB ADHK per kapita menganalisis pengaruh industri olahan, jumlah industri olahan dan tenaga kerja yang bekerja di industri olahan terhadap PDRB ADHK per kapita. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait seperti BPS, Dinas Perindustrian dan Bappelitbangda. Data yang digunakan adalah data jumlah industri olahan, jumlah tenaga dan PDRB ADHK, Pertumbuhan Ekonomi, jumlah penduduk dan PDRB ADHK/kapita periode 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya aglomerasi industri olahan yang terjadi di Kotamobagu dalam meningkat pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB ADHK per kapita. Besaran aglomerasi di Kotamobagu mencapai diatas 10 selang 5 (lima) tahun terakhir atau memiliki rata-rata tingkat spesialisasi industri olahan sebesar 11,65. Sesuai dengan fungsinya bahwa Aglomerasi industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena menciptakan pola konsumsi yang berbeda antardaerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya.

Kata Kunci : Aglomerasi, Industri Olahan, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the concentration of agglomerations of processed industries in Kotamobagu City, analyze the influence of agglomerations of processed industries on the GRDP of ADHK per capita, analyze the influence of processed industries on ADHK GRDP per capita Kotamobagu City, analyze the effect of labor working in the processed industry on the GRDP ADHK per capita Kotamobagu City and analyze the influence of the processed industry, the number of processed industries and workers working in the processed industry on the GRDP of ADHK per capita Kotamobagu City. The type of data used is secondary data obtained from related agencies such as BPS, Dinas Perindustrian and Bappelitbangda. The data used are the number of processed industries, the number of ADHK manpower and GRDP, Economic Growth, population and GRDP ADHK/capita for the 2017-2021 period. The results showed that the importance of the agglomeration of processed industries that occurred in East Kotamobagu District in increasing economic growth proxied by ADHK GRDP per capita. The amount of agglomeration in Kotamobagu has reached above 10 lapse in the last 5 (five) years or has an average level of specialization in the processed industry of 11.65. In accordance with its function, industrial agglomeration in an area will accelerate economic growth, because it creates different consumption patterns between regions so that the development of industry in that area will affect the development of other regions.

Keywords: Agglomeration, Processed Industry, Economic Growth

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sejak pandemi COVID 19. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet menunjukkan adanya kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya (Jhingan, 2012). Di sisi lainnya pandemi menyebabkan berbagai aktivitas non ekonomi dan ekonomi menjadi terbatas, tentunya

berdampak pada penyedian barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan pendapatan sebuah perekonomian atau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi produksi. Pendekatan produksi lebih menekankan pada nilai tambah sektor-sektor pembentuk pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

Aglomerasi yang cukup tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah cenderung tumbuh lebih cepat. Kondisi tersebut akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Akan tetapi bagi daerah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan membuat daerah tersebut semakin terbelakang.

Aglomerasi merupakan pengelompokan industri di satu wilayah yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan usaha lain, disini terdapat industri yang sifatnya individu dan kelompok. Menurut Montgomery dalam (Kuncoro, 2002) aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen (Bradley dkk, 1996).

Pada masa pandemi industri kecil dan menengah merupakan kelompok industri yang dapat bertahan dalam kondisi kebijakan PPKM. Bahkan beberapa industri kecil dan menengah muncul setelah kebijakan bekerja dan belajar dari rumah. Ditunjang dengan kebijakan PEN yang memberikan banyak perhatian kepada UMKM dan IKM. Kontribusi industri kecil dan menengah cukup berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, disebutkan pada pasal 72 bahwa pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing dan menghasilkan barang jasa industri untuk diekspor. Industri kecil adalah salah satu upaya yang dapat membantu dalam peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Keberadaan industri kecil dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat aglomerasi industri olahan di Kota Kotamobagu?
2. Apakah aglomerasi industri olahan berpengaruh terhadap PDRB ADHK per kapita Kota Kotamobagu?
3. Apakah industri olahan berpengaruh terhadap PDRB ADHK per kapita di Kota Kotamobagu?
4. Apakah tenaga kerja yang bekerja di industri olahan berpengaruh terhadap PDRB ADHK per kapita di Kota Kotamobagu ?
5. Apakah aglomerasi industri olahan, jumlah industri olahan dan tenaga kerja yang bekerja di industri olahan berpengaruh terhadap PDRB ADHK per kapita di Kota Kotamobagu?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi konsentrasi aglomerasi industri olahan di Kota Kotamobagu.
2. Untuk menganalisis pengaruh aglomerasi industri olahan terhadap PDRB ADHK per kapita Kota Kotamobagu.
3. Untuk menganalisis pengaruh industri olahan terhadap PDRB ADHK per kapita Kota Kotamobagu
4. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja yang bekerja di industri olahan terhadap PDRB ADHK per kapita Kota Kotamobagu.
5. Untuk menganalisis pengaruh industri olahan, jumlah industry olahan dan tenaga kerja yang bekerja di industri olahan terhadap PDRB ADHK per kapita Kota Kotamobagu.

Manfaat Penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian dapat menambah referensi sebagai pengetahuan tentang pengembangan IKM menopang pemuliharaan ekonomi di Kota Kotamobagu secara khusus serta bagi daerah-daerah lain pada umumnya.

2. Diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu.
3. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sekaligus rujukan dalam upaya mengembangkan industri kecil menengah sebagai upaya peningkatan pendapatan rumah tangga

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu pengusaha (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Todaro (2011) yang mendefinisikan bahwa perencanaan ekonomi dapat digambarkan sebagai suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa variabel utama perekonomian nasional.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pada umumnya pertumbuhan ekonomi tersebut dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk melihat perkembangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan merupakan indikasi untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Perekonomian suatu negara dikatakan berhasil apabila kegiatan ekonominya lebih tinggi dari yang dicapai pada masa sebelumnya serta perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2000).

Teori Adam Smith

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan terakhir masa perindustrian. Dari tahapan tersebut kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa tanah memegang peranan penting dalam pertumbuhan. Dalam teori ini, Adam Smith meletakkan tenaga kerja sebagai input dalam proses produksi. Pembagian kerja merupakan hal utama dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan saling berhubungan satu sama lain. (Hasan dkk,2020)

Teori Rostow

W.W Rostow menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan menjadi lima tahapan, antara lain masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerak maju menuju kematangan, dan tahap konsumsi tinggi. Menurut Rostow, setiap Negara berada dalam satu dari lima tahapan tersebut. Tahap-tahap pertumbuhan tersebut sebenarnya berpangkal pada keadaan-keadaan dinamis dari permintaan, penawaran dan pola produksinya. Sektor-sektor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat teknologi dan kemauan para pengusaha dalam berinovasi, tetapi juga oleh kekuatan permintaan dalam hubungannya dengan harga. (Jhingan,2012).

Teori Pertumbuhan Arthur Lewis

Teori pertumbuhan struktural ini pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sector modern. Teori ini pertama kali ditulis oleh Arthur Lewis dengan judul artikel "Pembangunan ekonomi dengan penawaran tenaga kerja yang tidak terbatas". Pokok permasalahan yang dikaji lewis adalah adanya asumsi bahwa dalam perekonomian suatu Negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua struktur perekonomian yaitu perekonomian tradisional dan perekonomian modern. (Jhingan,2012).

Teori Neo Klasik

Teori Neo-klasik muncul untuk menjawab sanggahan teori dependensi yang cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat revolusioner. Para ekonom penganut teori ini mengatakan bahwa semakin besar campur tangan pemerintah dalam perekonomian maka semakin lambat laju pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu Negara. Para ekonom merekomendasikan agar Negara sedang berkembang menuju sistem perekonomian yang didasarkan pada pasar bebas. Namun teori ini hanya tepat diterapkan di Negara-negara maju daripada Negara sedang berkembang. (Hasan dkk,2020)

Penelitian Terdahulu

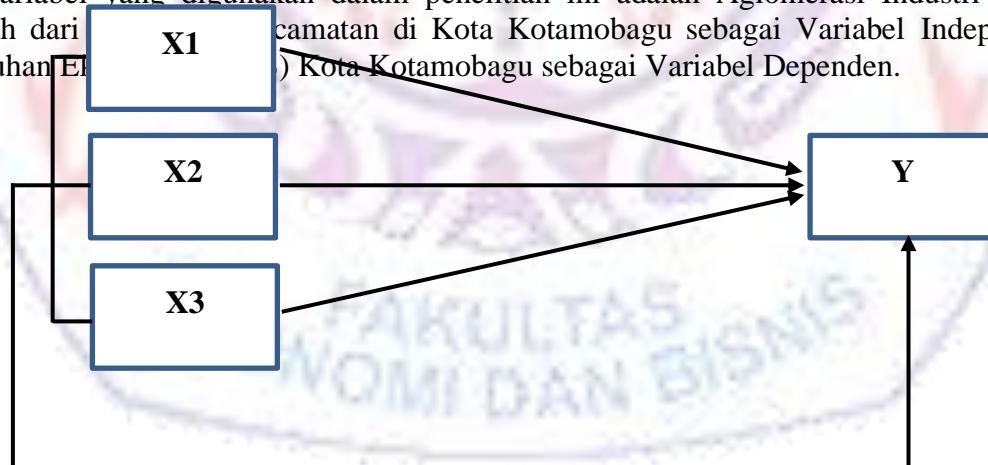
B. Saleh dan L. Warlina (2017) Melakukan penelitian dengan judul Identifikasi Karakteristik Aglomerasi Industri Pengolahan di Cikarang Kabupaten Bekasi Tahun 2006 dan 2013. Dengan hasil penelitian Terdapat 2 wilayah aglomerasi industri pengolahan di wilayah perkotaan cikarang pada tahun 2006 dan 3 wilayah aglomerasi industri pengolahan di wilayah perkotaan cikarang pada tahun 2013

Wijaya A, S.Suyanto, dkk (2018) Melakukan penelitian dengan judul Aglomerasi dan Pertumbuhan Produktivitas Industri Manufaktur Indonesia Periode 2008-2012 Fare Primont Productivity Index. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi ekonomi berupa lokalisasi memberi dampak positif pada pertumbuhan produktivitas sedangkan aglomerasi ekonomi berupa diversitas memberi dampak negatif pada pertumbuhan produktivitas industri manufaktur di Indonesia.

Alifia Nadia Tsamara dan Agus Sunan (2021). Melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Aglomerasi, Infrastruktur, Upah Minimum, Jumlah Orang Bekerja, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar Kab/Kota Jawa Timur Analisis Regresi Data Panel. Dengan hasil penelitian Menunjukkan adanya tren meningkat pada ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Aglomerasi mempengaruhi ketimpangan di Jawa Timur.

Kerangka Berpikir

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aglomerasi Industri Kecil dan Menengah dari 300000 penduduk di 100000 camatan di Kota Kotamobagu sebagai Variabel Independen dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu sebagai Variabel Dependen.



Gambar 1
Kerangka Berpikir

Hipotesis Penelitian

1. Diduga aglomerasi industri olahan (X1) berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita di Kota Kotamobagu (Y);
2. Diduga industri olahan (X2) berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita di Kota Kotamobagu (Y) ;

3. Diduga tenaga kerja yang bekerja di industri olahan (X3) berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita di Kota Kotamobagu (Y);
4. Diduga aglomerasi industri olahan dan tenaga kerja yang bekerja di industri olahan berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita di Kota Kotamobagu.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait seperti BPS, Dinas Perindustrian dan Bappelitbangda. Data yang digunakan adalah data jumlah industri olahan, jumlah tenaga dan PDRB ADHK, Pertumbuhan Ekonomi, jumlah penduduk dan PDRB ADHK/kapita periode 2017-2021 (lima tahun).

Metode Pengumpulan Data

Studi pustaka yaitu kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. PDRB ADHK per kapita adalah nilai PDRB ADHK per penduduk menurut kecamatan di Kota Kotamobagu, diukur dalam rupiah.
2. Aglomerasi adalah berkumpulnya industri olahan di Kota Kotamobagu diukur dalam satuan indeks.
3. Industri olahan adalah jumlah industri kecil menengah dan jenis usaha bidang olahan di Kota Kotamobagu.
4. Tenaga kerja adalah pekerja di industri olahan yang ada di Kota Kotamobagu diukur dalam satuan jiwa.

Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif, yang dilakukan dengan menguji secara statistik terhadap data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan analisis data panel, **yaitu** gabungan antara data deret waktu dan data kerat silang pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Model regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan variabel terikat berupa pertumbuhan ekonomi dan variabel bebas berupa aglomerasi industri, dan tenaga kerja.

Analisis Aglomerasi

Untuk menganalisa aglomerasi, digunakan indeks batas untuk membedakan faktor spesialisasi diwakili oleh angkatan kerja.

$$E_{ij}/(\sum_j E_{ij})/(\sum_j E_{ij})/(\sum_j \sum_j E_{ij})$$

Keterangan:

\sum_{ij} = total tenaga kerja pada sektor industri

$\sum_j E_{ij}$ = total tenaga kerja Kecamatan

$\sum_j E_{ij}$ = total tenaga kerja pada sektor industri Kota Kotamobagu

$\sum_j \sum_j E_{ij}$ = total tenaga kerja di Kota Kotamobagu

Uji Statistik Panel Data

Metode Analisa untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat adalah model regresi data panel. Data panel merupakan metode penelitian yang dikumpulkan secara cross section (data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu) dan time series (data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu) (Nachrowi Dan Hardius, 2006:309).

Pemilihan Model Data Panel

Menurut Widarjono (2018: 50), ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode Common Effect atau metode Fixed Effect. Kedua, uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode Fixed Effect atau metode Random Effect. Ketiga, uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara metode Common Effect atau metode Random Effect.

Uji Statistik F (Uji Chow)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode Fixed Effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode Common Effect.

Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau nilai probabilitas (PValue) $\alpha < 5\%$, maka H_0 ditolak, artinya model panel yang baik untuk digunakan adalah Fixed Effect Model, dan sebaliknya jika H_0 diterima, maka model Pooled Least Square yang dipakai dan dianalisis. Namun jika H_0 ditolak, maka model FEM harus diuji kembali untuk memilih apakah memakai model FEM atau REM baru dianalisis.

Uji Hausman

Pada dasarnya, Uji Hausman digunakan untuk melihat konsistensi pendugaan dengan OLS. Mengingat MER diduga dengan menggunakan metode tersebut, maka dalam pemodelan data panel, uji ini dapat digunakan untuk melihat kelayakan penggunaan model panel. Keputusan penggunaan FEM dan REM dapat pula ditentukan dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan dengan Hausman. Spesifikasi ini akan memberikan penilaian dengan menggunakan Chi-square statistik sehingga keputusan pemilihan model akan dapat ditentukan secara statistik.

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : Random Effect Model

H_1 : Fixed Effect Model

Setelah dilakukan pengujian ini, hasil dari Hausman test dibandingkan dengan Chi-square statistik dengan $df = k$, dimana k adalah jumlah koefesien variabel yang diestimasi atau nilai probabilitas (P-Value) $\alpha < 5\%$. Jika hasil dari Hausman test signifikan, maka H_0 ditolak, maka Fixed Effect Model yang digunakan.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Langrange Multiliper (LM) dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara Pooled Least Square Model dan Random Effect Model. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H_0 : Pooled Least Square Model

H_1 : Random Effect Model

Setelah dilakukan pengujian ini, hasil Langrange Multiplier test (Breusch-Pagan) dibandingkan dengan nilai probability. Jika nilai Breusch – Pagan $\alpha < 5\%$ maka H_0 ditolak, artinya model panel yang baik untuk digunakan adalah Random Effect Model (REM). Namun jika H_0 diterima maka model data panel yang baik digunakan adalah Pooled Least Square (PLS).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Priyatno, 2014: 163).

Uji Autokorelasi

Metode pengujian autokorelasi ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Uji tersebut digunakan untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung

nilai d statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik DW test. Jika nilai DW berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi (Priyatno, 2014: 165).

Uji Multikolonieritas

Uji ini diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Multikolinieritas artinya antara variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya (Priyatno, 2014: 164).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Daerah Penelitian

Kota Kotamobagu merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara yang terletak pada jarak \pm 180 km di selatan ibu kota Provinsi (Kota Manado). Kota Kotamobagu merupakan salah satu daerah pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow yang ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2007. Kota Kotamobagu dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten hasil pemekaran yaitu; Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (induk), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kondisi Geografis

Secara Geografis, Kotamobagu berada pada posisi antara $00^{\circ} 41' 16,29''$ dan $00^{\circ} 46' 14,88''$ Lintang Utara, serta antara $1240^{\circ} 15' 9,56''$ dan $1240^{\circ} 21' 1,93''$ Bujur Timur dengan keseluruhan luas wilayah 108,89 km². Kota Kotamobagu dibagi menjadi 4 kecamatan dan 33 desa/kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kotamobagu Selatan seluas 51,88% dari luas wilayah Kotamobagu dan terkecil adalah Kecamatan Kotamobagu Utara 9,24% dari luas wilayah Kotamobagu.

Kondisi Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPS Kota Kotamobagu 2022, jumlah penduduk Kota Kotamobagu Tahun 2021 mencapai 124.473 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,79 persen. Penduduk terbanyak pada tahun 2021 berada di Kecamatan Kotamobagu Barat, yaitu 41.949 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Kotamobagu Selatan sebanyak 33.661 jiwa dan Kecamatan Kotamobagu Timur sebanyak 31.145 jiwa. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Kotamobagu Utara sebanyak 17.718 Jiwa.

Kondisi Sosial Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu pada Tahun 2015 sampai 2021 mengalami fluktuasi. Posisi Tahun 2020 dimana terjadi pandemic covid-19 yang melanda seluruh dunia mengakibatkan perlambatan yang signifikan terlihat pada pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu Tahun 2020 sebesar 0,20. Namun, seiring dengan pelonggaran aktifitas masyarakat perlambatan Laju Pertumbuhan Ekonomi kota kotamobagu mengalami pertumbuhan yang positif.

Kemiskinan

Garis kemiskinan Kota Kotamobagu tahun 2020 sebesar Rp. 343.675 dan meningkat menjadi Rp. 363.777 pada tahun 2021. Jumlah penduduk miskin meningkat dari tahun 2020 sebanyak 7,06 ribu jiwa menjadi 7,56 ribu jiwa pada tahun 2021, sehingga persentase penduduk miskin naik menjadi 5,74%. Sedangkan pada tahun 2021, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp. 363.777 dan angka kemiskinan ikut meningkat menjadi 5,74 persen. Kondisi tersebut

disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 dan masih berlanjut hingga tahun 2021 yang berdampak pada Angka Kemiskinan Kota Kotamobagu.

Tingkat Pengangguran

Dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Kotamobagu telah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Namun pada tahun 2020 angka TPT sangat tinggi yakni 7,44 persen. Dengan berbagai program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu akhirnya menunjukkan capaian yang positif, ini ditunjukkan pada capaian TPT Tahun 2021 menurun menjadi 7,32 persen.

Hasil Penelitian

Analisa Aglomerasi Industri Pengolahan

Untuk menganalisa aglomerasi, digunakan indeks bahasa untuk membedakan faktor spesialisasi diwakili oleh angkatan kerja.

$$\frac{E_{ij}}{\sum_j E_{ij}} / \frac{\sum_j E_{ij}}{\sum_j \sum_j E_{ij}}$$

Keterangan:

Σ_{ij} = total tenaga kerja pada sektor industri

$\Sigma_j E_{ij}$ = total tenaga kerja Kecamatan

$\Sigma_j \Sigma_j E_{ij}$ = total tenaga kerja pada sektor industri Kota Kotamobagu

$\Sigma_j \Sigma_j E_{ij}$ = total tenaga kerja di Kota Kotamobagu

Tabel 1 Nilai Aglomerasi Industri Pengolahan di Kota Kotamobagu

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
Kotamobagu Barat	5,59	5,82	5,78	6,78	6,30
Kotamobagu Selatan	8,47	6,63	6,50	7,23	7,10
Kotamobagu Timur	12,66	13,11	11,73	10,33	10,41
Kotamobagu Utara	7,03	7,34	7,52	6,49	6,35

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 2022

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi aglomerasi industri pengolahan di Kecamatan Kotamobagu Timur.

Pengujian Model Regresi Data Panel

Model regresi data panel terdiri dari 3 yaitu Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Model Common Effect menyamaratakan setiap unit dalam analisis. Pada model Fixed Effect terdapat perbedaan pada efek individu. Sedangkan pada model Random Effect, perbedaan antar individu diakomodasi oleh error. Untuk memilih model yang tepat, kita dapat melakukan serangkaian uji dengan membandingkan satu model dengan model yang lain.

Langkah 1 : Pemilihan Model Regresi Data Panel
Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	172.015399	(3,13)	0.0000
Cross-section Chi-square	74.122528	3	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: YCAP

Method: Panel Least Squares

Date: 11/30/22 Time: 23:57

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.46E+08	19291292	7.542312	0.0000
X1	-9433335.	2725645.	-3.460955	0.0032
X2	-62835.44	70956.57	-0.885548	0.3890
X3	116023.3	93493.56	1.240976	0.2325
R-squared	0.517387	Mean dependent var		82913046
Adjusted R-squared	0.426897	S.D. dependent var		29982451
S.E. of regression	22697775	Akaike info criterion		36.89029
Sum squared resid	8.24E+15	Schwarz criterion		37.08943
Log likelihood	-364.9029	Hannan-Quinn criter.		36.92916
F-statistic	5.717627	Durbin-Watson stat		0.627368
Prob(F-statistic)	0.007418			

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 2022

Hasil olahan data menggunakan eviews diperoleh nilai prob Cross section Chi square = 0.0000 (<5%), sehingga keputusan yang diambil adalah tolak H_0 atau model Fixed Effect lebih baik dibanding Common Effect. Pengujian akan dilanjutkan ke uji Hausman.

Uji Hausman

Dengan uji ini kita bisa membandingkan model Random Effect dengan Fixed Effect. Hipotesis nol yang digunakan adalah Random Effect lebih baik dibanding Fixed Effect. Jika H_0 ditolak, maka model yang tepat untuk analisis adalah Fixed Effect (tidak perlu lagi melakukan uji Breusch Pagan). Namun jika gagal tolak H_0 , lanjutkan ke pengujian Breusch Pagan.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ01

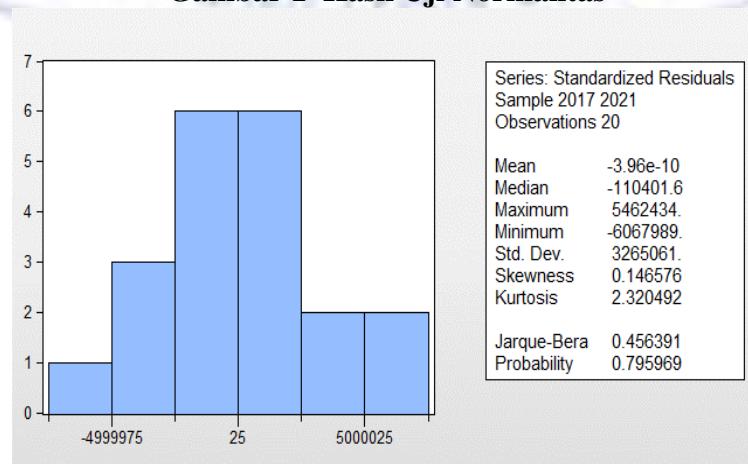
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.022275	3	0.0091

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	2069838.894	1884407.2291	167906311529.17	0.8862
X2	40246.8110	39141.286671	185494547.7256	0.9353
X3	19762.5250	19571.826958	224772228.7183	0.9899

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 2022

Langkah 2 : Pengujian Asumsi Klasik**Asumsi Normalitas****Gambar 1 Hasil Uji Normalitas**

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 2022

Asumsi Homoskedastisitas

Tabel 4 Uji Glejser

Dependent Variable: ABS(RESID01)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/01/22 Time: 00:07
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 4
 Total panel (balanced) observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2768301.	1525266.	1.814963	0.0883
X1	-234112.0	215503.1	-1.086351	0.2934
X2	-12188.67	5610.180	-2.172599	0.1452
X3	19574.65	7392.067	2.648062	0.1175
R-squared	0.338789	Mean dependent var	2496198.	
Adjusted R-squared	0.214811	S.D. dependent var	2025259.	
S.E. of regression	1794599.	Akaike info criterion	31.81532	
Sum squared resid	5.15E+13	Schwarz criterion	32.01446	
Log likelihood	-314.1532	Hannan-Quinn criter.	31.85419	
F-statistic	2.732669	Durbin-Watson stat	2.077014	
Prob(F-statistic)	0.078088			

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 2022

Asumsi Non Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Tabel 5 Uji Multikolinieritas
Correlation

	YCAP	X1	X2	X3
YCAP	1.000000	-0.682445	-0.339711	-0.228307
X1	-0.682445	1.000000	0.583625	0.540800
X2	-0.339711	0.583625	1.000000	0.913550
X3	-0.228307	0.540800	0.913550	1.000000

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 2022

Langkah 3 : Pengujian Keberartian Model

Model terbaik yang dipilih adalah fixed effect dengan uji stasioner data ada pada level turunan pertama sehingga model yang digunakan adalah

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it1} + \beta_2 X_{it2} + \beta_3 X_{it3} + e_i$$

Hasil olahan data menggunakan eviews adalah seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Hasil Regresi Data Panel

Dependent Variable: YCAP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/30/22 Time: 23:55
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 4
 Total panel (balanced) observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	47745625	14666681	3.255380	0.0063
X1	2069839.	728596.2	2.586353	0.0199
X2	40246.81	15653.71	2.571072	0.0232
X3	19762.53	17245.08	1.145980	0.2725
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.988141	Mean dependent var	82913046	
Adjusted R-squared	0.982668	S.D. dependent var	29982451	
S.E. of regression	3947267.	Akaike info criterion	33.48416	
Sum squared resid	2.03E+14	Schwarz criterion	33.83267	
Log likelihood	-327.8416	Hannan-Quinn criter.	33.55219	
F-statistic	180.5355	Durbin-Watson stat	2.026404	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel tetap. Hasil pengolahan menggunakan eviews dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,00000 atau signifikansi $\alpha = 0,01$. Artinya secara bersama-sama aglomerasi industri olahan, jumlah industri olahan dan tenaga kerja yang bekerja di industri tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan PDRB ADHK per kapita.

Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan uji t pada tabel analisis panel data dengan aplikasi eviews menunjukkan bahwa semua variabel terikat signifikan mempengaruhi variabel bebas secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Variabel aglomerasi industri olahan (X_1) memiliki koefisien regresi 2069839 dengan probabilitas sebesar 0,0199. Artinya pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, peningkatan aglomerasi industri olahan (X_1) secara signifikan akan meningkatkan Y (PDRB ADHK per kapita) Kota Kotamobagu.
2. Variabel jumlah olahan (X_2) memiliki koefisien regresi 40246,81 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0232. Artinya pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, peningkatan jumlah industri

olahan (X_2) signifikan mempengaruhi peningkatan Y (PDRB ADHK per kapita) Kota Kotamobagu.

3. Variabel tenaga kerja industri olahan (X_3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 19762,53 dengan nilai probabilitas 0,2725. Berarti variable ini secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Y (PDRB ADHK per kapita) Kota Kotamobagu.
4. Berdasarkan nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa pengaruh X_1 lebih besar dari X_2 dan X_3 dalam mempengaruhi Y.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya aglomerasi industri olahan yang terjadi di Kecamatan Kotamobagu Timur dalam meningkat pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB ADHK per kapita. Besaran aglomerasi di Kecamatan Kotamobagu Timur mencapai diatas 10 selang 5 (lima) tahun terakhir atau memiliki rata-rata tingkat spesialisasi industri olahan sebesar 11,65. Sesuai dengan fungsinya bahwa Aglomerasi industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya. Sesuai dengan teori Montgomerry yang menekankan pada konsentrasi spasial aktivitas ekonomi, teori lokasi dari Alfred Weber dimana industri menentukan lokasi optimal bagi perusahaannya serta Teori Ekonomi Geografi Baru dari Krugman yang menekankan pada efek-efek aglomerasi menyebabkan adanya kekuatan sentripetal (konsentrasi konsumsi dan produksi) dan sentrifugal (konsentrasi geografis dari pasar input lokal).

Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian Cholidah (2012) tentang kekuatan aglomerasi di Kabupaten Semarang, Wulandari dkk (2019), Firmando (2021), dan Sodik dan Iskandar (2007). Bagian penting dalam penelitian ini juga menekankan bahwa peran IKM khususnya industri olahan dan tenaga kerja yang bekerja di industri tersebut mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB per kapita. Tampak pada adanya peningkatan kontribusi industri pengolahan pada PDRB Kota Kotamobagu tahun 2019 hanya 3,82 % menjadi 4,11% tahun 2021. Dengan kondisi tahun 2020 terjadi pandemi COVID 19 masih mampu memberikan kontribusi yang meningkat walaupun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi terkontraksi. Hasil penelitian sejalan dengan teori pertumbuhan makro ekonomi Adam Smith yang menyatakan pentingnya peran produktivitas tenaga kerja sebagai input dalam proses produksi. Tenaga kerja yang bekerja di industri olahan menentukan produktivitas industri tersebut, juga teori pertumbuhan Arthur Lewis tentang pembangunan ekonomi dan tenaga kerja. Beberapa hasil penelitian yang sejalan diantaranya penelitian Zainal (2011), Alifia & Sunan (2021).

Kebijakan PEN (pemulihan ekonomi nasional) yang sangat menopang penguatan IKM membuat peran IKM bidang olahan juga tetap memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB per kapita Kota Kotamobagu. Sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa aglomerasi dalam perencanaan wilayah bersifat geografis (industri yang tumbuh berdasarkan peraturan atau rencana tata ruang wilayah yang dirumuskan), meningkatkan ekonomi suatu wilayah untuk pengembangan wilayah (mampu merencanakan ide/konsep untuk memudahkan investasi masuk), menentukan perumusan strategi pengembangan wilayah (merencanakan apa yang harus dilakukan untuk kemajuan/kejayaan wilayah tersebut), dan menentuan lokasi potensial (mampu melihat serta menilai lokasi yang unggul untuk perkembangan dan pembangunan wilayah).

Hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan aglomerasi industri olahan di Kecamatan Kota Kotamobagu Timur untuk bisa menjadi motor penggerak pemulihan dan penguatan ekonomi pasca pandemi COVID 19. Juga dalam menetapkan strategi menopang pencapaian Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa Tahun 2025, sehingga keberlanjutan peran aglomerasi bagi daerah terus meningkat.

Aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari beberapa aktivitas ekonomi dengan adanya fasilitas pendukung seperti transportasi, tenaga kerja, dan pelayanan pemerintahan yang saling berdekatan untuk melayani industri-industri. aglomerasi merupakan suatu bentuk spasial yang diasosiasikan dengan konsep penghematan bagi daerah. Industri yang lebih produktif disatu sisi

dan disisi lainnya menciptakan penghematan biaya produksi yang secara tidak langsung meningkatkan daya saing IKM Kota Kotamobagu.

Disisi lainnya pemerintah daerah yang sudah memiliki peraturan Wali Kota UMKM center akan lebih mengoptimalkan aglomerasi melalui strategi pengembangan IKM yang bersifat market penetration dan market development menuju ke Kota Kotamobagu sebagai penyangga perekonomian wilayah BMR.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Besaran aglomerasi di Kota Kotamobagu mencapai diatas 10 selang 5 (lima) tahun terakhir atau memiliki rata-rata tingkat spesialisasi industri olahan terbesar.
2. Secara parsial aglomerasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan PDRB ADHK per kapita di Kota Kotamobagu.
3. Secara parsial industri olahan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan PDRB ADHK per kapita di Kota Kotamobagu.
4. Secara parsial tenaga kerja di industri olahan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB ADHK per kapita di Kota Kotamobagu.
5. Secara simultan aglomerasi, jumlah industri olahan, tenaga kerja yang bekerja di dalamnya memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan PDRB ADHK per kapita di Kota Kotamobagu.

Saran

1. Pemerintah harus terus mengoptimalkan adanya aglomerasi industri olahan dengan memberikan peluang bagi pengembangan aktivitas ekonomi lainnya disekitarnya.
2. Program pemerintah yang mendorong produktivitas IKM perlu terus dioptimalkan di masa pandemic ini untuk menggerakkan perekonomian yang sempat melambat.

DAFTAR PUSTAKA

Alifia N. T. dan A. Sunan. 2021. *Analisis Pengaruh Aglomerasi, Infrastruktur, Upah Minimum, Jumlah Orang Bekerja, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar Kab/Kota Jawa Timur*, Repository Brawijaya Knowledge Garden (BKG) URI <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/187811>

Arsyad, L. 1992. *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta

Bradley, R. and J. S. 1996. *Growth in Australian Cities*. The Economic Record. The Economic Society of Australia, Vol. 74 (226).

Chollidah, N. 2012. *Analisis Konsentrasi Spasial dan Kekuatan Aglomerasi Industri Kecil Makanan Olahan di Kabupaten Semarang*, Economics Development Analysis Journal, Vol I, No.2, DOI: <https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.479>

Firmando M. E., 2021. *Analisis Aglomerasi Pada Koridor Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol. 20, No, 2.

Hassan M, Syahirul A, dkk, 2020. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung.

Jhingan M.L, 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta, Rajawali Pers

Kuncoro, M. 2002. *Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Malecki. 1991. *Technology and Economic Development: the Dynamics of Local Regional, and National Change*. New York: John Wiley & Sons, Inc

McGee T.G. 1991. *The Emergence of Desa-Kota Regions in Asia. Expanding a Hypothesis*. University of Hawai Press, Honolulu.

Nachrowi, dan Hardius Usman. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonomometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Priyatno, D. 2014. *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.

Sodik, J dan Iskandar D, 2007. *Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 8, Nomor 2, 117-129.

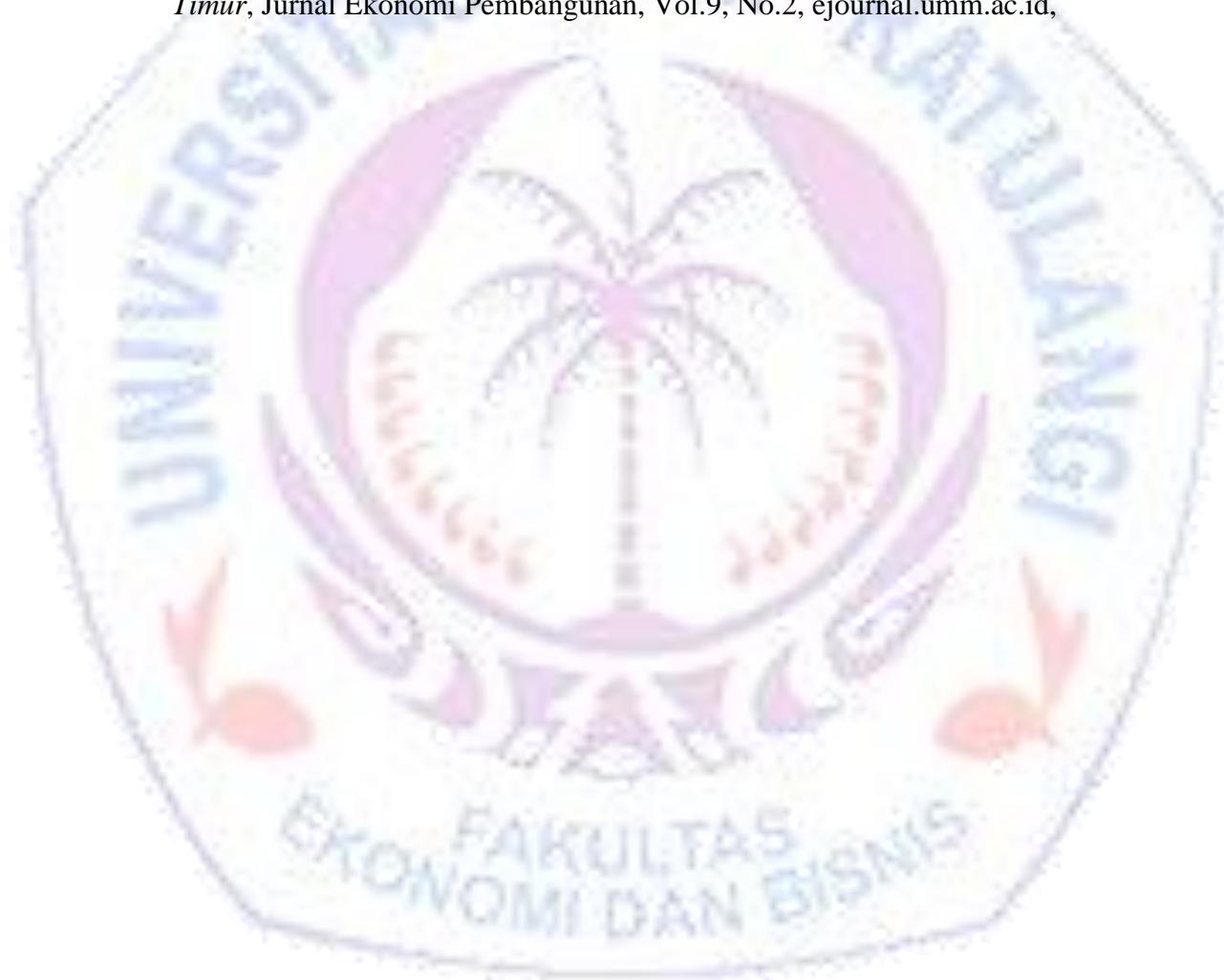
Sukirno S, 2000. *Makro Ekonomika Modern*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Todaro M dan Stephen C. Smith, 2009. *Economic Development*, Pearson Addison Wesley, The University of Michigan.

Widarjono, A. 2018. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wulandari, Y., E. K. Lestari, dan I W. Subagiarta, 2019. *Aglomerasi Industri Pengolahan di Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2011-2015*, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol.6, No.1.(76-80)

Zainal, A, 2011. *Analisis Spasial Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa tenggara Timur*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.9, No.2, ejournal.umm.ac.id,



ANALISIS PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, KEMISKINAN, DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MANADO

Julita Senewe¹, Paulus Kindangen², Daisy Shirly M. Engka³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado

E-mail: [1julitasenewe0611@student.unsrat.ac.id](mailto:julitasenewe0611@student.unsrat.ac.id), [2Pauluskindangen@unsrat.ac.id](mailto:Pauluskindangen@unsrat.ac.id),
[3daysiengka@unsrat.ac.id](mailto:daysiengka@unsrat.ac.id)

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan output. Pertumbuhan ekonomi dianggap penting karena, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menjelaskan tentang kemajuan ekonomi, perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, serta perubahan fundamental suatu negara dalam jangka relatif panjang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembangunan infrastruktur, kemiskinan dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil dalam penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa pembangunan infrasruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, rata – rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil Penelitian secara simultan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, kemiskinan, dan pendidikan, berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.

Kata Kunci: *Pembangunan infrastruktur, Kemiskinan, Pendidikan, Pertumbuhan ekonomi*

ABSTRACT

Economic growth is an indicator of how successful a country's economic development is and as a determinant of further development policies. A country can be said to experience economic growth if there is an increase in national income and an increase in output. Economic growth is considered important because it basically explains economic progress, economic development, economic welfare, and fundamental changes in a country in a relatively long term. The purpose of this study was to determine the effect of infrastructure development, poverty and education on economic growth in Manado City. The type of research used is quantitative.

The data used in this research is secondary data, and the analysis technique used in this research is multiple regression analysis. The results in this study partially show that infrastructure development has a positive and insignificant effect on economic growth, poverty has a negative and insignificant effect on economic growth, average years of schooling has a positive and significant effect on economic growth. This research results show that infrastructure development, poverty, and education, have a simultaneous effect on economic growth in Manado City.

Keywords: *Infrastructure development, Poverty, education, Economic growth*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan output. Kenaikan pendapatan nasional ini dapat dilihat dari besarnya kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang

dihadirkan setiap tahun. Bagi suatu daerah, untuk melihat pendapatan daerahnya dilihat dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan setiap tahun (Mankiw, 2007:182).

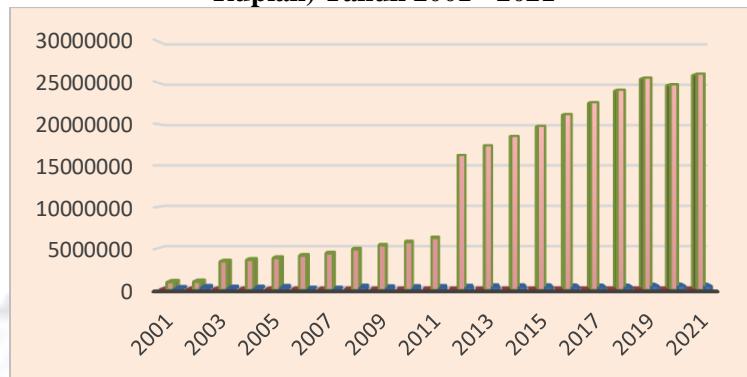
Pembangunan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan lainnya. Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia, dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran rakyat (Sukirno dalam Reza Noviya, 2018:1).

Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik (Todaro dalam Mirah 2020:87).

Pertumbuhan ekonomi dianggap penting karena, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menjelaskan tentang kemajuan ekonomi, perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, serta perubahan fundamental suatu negara dalam jangka relatif panjang. Simon Kuznets (1971) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat tak lepas dari pertambahan jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi di antaranya berupa sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), peningkatan modal yang digunakan, hingga kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi, selain sebagai tolok ukur keberhasilan atau kemunduran perekonomian suatu negara, juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang berkembang. Kegiatan ekonomi yang berkembang ini menandakan bahwa lapangan pekerjaan semakin banyak dan pendapatan masyarakat semakin meningkat (Ananda, 2019:1).

Kemajuan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor dominan. Hal ini dilakukan dengan asumsi proses perembesan ke bawah (trickle down effect) akan terjadi, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan tercapai. Meski demikian asumsi ini sering kali tidak berlaku apalagi tanpa usaha dan penanganan lebih lanjut. Kemajuan ekonomi secara makro seringkali dilihat dari besaran PDRB dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi (BPS PDRB Kota Manado, 2021:85). Peningkatan produk domestik bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan produk domestik regional bruto (PDRB) untuk tingkat daerah, merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dilakukan di wilayah/negara. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berikut adalah data yang digunakan dalam variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK), sebagai berikut:

Gambar 1
Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Kota Manado (Miliar Rupiah) Tahun 2001 - 2021



Sumber: BPS Kota Manado Dalam Angka, 2022 (data diolah)

Gambar 1 menunjukkan data produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan di Kota Manado mengalami fluktuasi. Dalam kurun waktu 21 tahun ditunjukkan bahwa pada tahun 2001 jumlah PDRB ADHK di Kota Manado sebesar 943.055 juta rupiah dan pada tahun 2012 naik signifikan sebesar 16.265.155 miliar rupiah dan pada tahun 2019 naik menjadi 25.581.644 miliar rupiah. Namun, pada tahun 2020 produk domestik regional bruto ADHK di Kota Manado menurun akibat pandemic covid-19 menjadi 24.780.882 miliar rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2021 naik lagi menjadi 26.056.517 miliar rupiah. Secara keseluruhan dalam 21 tahun data produk domestik regional bruto ADHK di Kota Manado, dari tahun 2001 sampai 2021 mengalami kenaikan secara terus menerus kecuali pada tahun 2020.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat erat kaitannya dengan infrastruktur yang ada di negara dikarenakan, infrastruktur merupakan aspek penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, tanpa didukung infrastruktur yang memadai pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak akan optimal Suripto dan Lestari, (2019:16). Pada data panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Manado mengalami fluktuasi dari tahun 2001 sampai tahun 2021. Data panjang jalan dalam kondisi baik yang paling rendah berada pada tahun 2006 dan 2007 yaitu sebesar 107.876 Km. dan Panjang jalan dalam kondisi baik yang paling tinggi berada di tahun 2020 yaitu sebesar 503.341 Km. Tetapi, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 panjang jalan dalam kondisi baik menurun dan menjadi 486.910 Km. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan jalan raya yang akan menyebabkan juga penurunan terhadap panjang jalan dalam kondisi baik, yaitu: 1) Dranaise yang tidak berfungsi/ tidak adanya dranaise, 2) Overtonase/overloading kendaraan seperti truk, tronton, dan lain-lain. 3) Kesalahan dalam perencanaan tebal perkerasan jalan, 4) Pelaksanaan lapis pondasi agregat yang tidak padat, 5) Faktor bencana alam, 6) Kondisi konstruksi tanah dasar yang tidak stabil, 7) Pelaksanaan pekerjaan pengaspalan yang tidak baik, dan 8) tidak dilakukan perawatan jalan secara berkala (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, 2020).

Hubungan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi adalah permasalahan kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; indeks pembangunan manusia rendah, meningkatnya jumlah pengangguran, inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah merupakan salah satu yang akan berdampak jika terjadinya peningkatan terhadap kemiskinan, karena dengan adanya peningkatan kemiskinan maka pertumbuhan ekonomi akan rendah dan tidak bisa memperbaiki susunan perekonomian daerah. Dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing – masing wilayah mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. penduduk miskin di Kota Manado mengalami fluktuasi dimana dari tahun 2001 sampai 2021 data penduduk miskin mengalami kenaikan dan juga penurunan dalam 21 tahun. Data persentase penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di tahun 2003 yakni sebesar 9.11% dan pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021 data terus mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kota

Manado menjadi 6.19%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan, beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi yakni: *Faktor Pertama* adalah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang mengalami kontraksi/penurunan, *Faktor Kedua* adalah pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB terkontraksi, *Faktor ketiga* adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami kenaikan. Selanjutnya *Faktor Keempat*, adalah banyaknya penduduk usia kerja yang terdampak Covid 19.

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (pendidikan). Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah, Menurut Meier dan Rauch 2000 dalam Gunandi Brata (2002:115) pendidikan atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, semakin banyak orang yang mengenyam bangku pendidikan maka potensi sumber daya yang diperoleh akan lebih meningkat sehingga, menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Sektor pendidikan dianggap memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan, (Todaro 2006 dalam Budiarti dan Seosaty 2014:1). Data rata – rata lama sekolah di Kota Manado mengalami agak fluktuasi selama tahun 2001 sampai 2021. Pada tahun 2001 rata – rata lama sekolah di Kota Manado sebesar 10,82 tahun. Selanjutnya, pada tahun 2004 turun menjadi 10,40 tahun. Selanjutnya, pada tahun 2010 data menunjukkan adanya penurunan lagi menjadi 10,19 tahun. Akan tetapi, dari tahun 2012 sampai pada tahun 2021 data naik dengan baik sehingga data rata – rata lama sekolah pada tahun 2021 menjadi 11,42 tahun. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya usaha yang di lakukan pemerintah salah satunya yaitu dengan memberikan kesetaraan pendidikan yang adil dalam menyumbangkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan umum, baik paket A yang setara sekolah dasar, paket B setara sekolah menengah pertama, dan paket C setara sekolah menengah atas. Mengingat salah satu visi Kota Manado adalah peningkatan kualitas manusia.

Topik ini menarik untuk di teliti karena dari topik ini bisa di dapatkan dan diketahui secara baik bagaimana dan seberapa penting baik itu keadaan, pengaruh, ataupun fakta yang terjadi tentang pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, kemiskinan dan pendidikan di Kota Manado serta dapat membandingkan dengan upaya pemerintah Kota Manado yang sudah dilakukan. Sehingga, dengan meneliti topik ini diharapkan kedepannya pertumbuhan ekonomi di Kota Manado bisa lebih baik dan maju, serta menunjukkan bahwa mampu merealisasikan visi dan misi Kota Manado.

Maka dari penjelasan latar belakang yang ada di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang dapat memberikan manfaat yang baik untuk Kota Manado dalam menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan setiap rencana pembangunan baik dalam pembangunan infrastruktur, kemiskinan yang akan di lakukan agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat yang kurang mampu. Serta terhadap pendidikan agar tidak terjadi ketidakseimbangan sosial. Dengan begitu, penulis ingin meneliti tentang analisis pengaruh pembangunan infrastruktur, kemiskinan dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh variabel pembangunan infrastruktur (panjang jalan) terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado?
2. Bagaimana pengaruh variabel kemiskinan (penduduk miskin) terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado?
3. Bagaimana pengaruh variabel pendidikan (rata – rata lama sekolah) terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado?
4. Bagaimana pengaruh variabel pembangunan infrastruktur (panjang jalan), kemiskinan (penduduk miskin) dan pendidikan (rata – rata lama sekolah) terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel pembangunan infrastruktur (panjang jalan) terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel kemiskinan (penduduk miskin) terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel pendidikan (rata – rata lama sekolah) terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel pembangunan infrastruktur (panjang jalan), kemiskinan (penduduk miskin), dan pendidikan (rata – rata lama sekolah) terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Manado untuk kebijakan ekonomi dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah suatu pengetahuan umum yang menarik dan dapat bermanfaat terutama dalam pengetahuan terhadap pembangunan infrastruktur, kemiskinan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi serta perkembangannya.

3. Bagi peneliti

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan menambah wawasan yang terupdate tentang kondisi dan situasi pembangunan di Kota Manado, bagaimana melihat dan menilai situasi pembangunan infrastruktur, kemiskinan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Manado dan sebagai refensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Tinjauan Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi ialah suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang. Perhatikan tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses”, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat dan yang sumbernya dari proses intern perekonomian itu sendiri, Budiono (2018:1). Menurut Tarigan (2012:46), Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di suatu wilayah, pertambahan pendapatan tersebut adalah kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi di wilayah tersebut. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (Tanah, Modal, Tenaga kerja, dan Teknologi), hal ini berarti dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga ditentukan oleh seberapa besar terjadi transfer payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah, (Suswita 2020:3).

Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya. Kondisi ini akan memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa dibeli oleh sebagian besar rakyat yang penghasilannya masih rendah (Mesak Iek, 2013:32).

Kemiskinan

Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan adalah ketidakmampuan yang terjadi dimana seseorang tidak terpenuhinya sandang pangan dan papan. Ketidakpunyaan suatu individu untuk terpenuhinya minimum suatu

kebutuhan inti supaya bisa hidup layak, entah itu disebabkan karena minimnya lowongan kerjaan karena keadaan pendidikan rendah, kesehatan kurang baik maupun yang lainnya (Aminah dalam Permatasri 2021:21).

Pendidikan

Menurut Todaro (2006) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan sebagai modal manusia merupakan komponen pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang vital. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas negara karena merupakan sarana masyarakat untuk menjadi lebih cakap dan terampil. Sehingga dengan keterampilan ini, masyarakat dapat menghasilkan output lebih banyak dan memperbaiki perekonomian (Roring 2020:32). Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan pada masyarakat adalah dengan rata – rata lama sekolah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Nugroho, 2012:24). Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindaknya (Hepi, 2018:60).

Penelitian Terdahulu

Ariance Wilar, Paulus Kindangen, dan Een Walewangko (2019) berjudul Analisis Anggaran Dinas Pendidikan Infrastruktur dan Sektor Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sulawesi Utara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis jalur. Hasil penelitian anggaran pendidikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita, anggaran infrastruktur dan anggaran pertanian berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita. Anggaran pendidikan dan anggaran pertanian tidak berpengaruh terhadap IPM, anggaran infrastruktur dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap IPM. Anggaran pendidikan, infrastruktur, dan pertanian secara bersama mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan perkapita dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Fitrah Hardiansyah A. Mohamad, Anderson G. Kumenaung, dan Agnes L.Ch.P. Lapian (2021) berjudul Analisis Pengaruh Pengangguran, Kemiskinan, dan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo. Data yang digunakan adalah data sekunder, dianalisis dengan analisis Regresi Sederhana (OLS) menggunakan program eviews 8. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengangguran dan distribusi pendapatan mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan kemiskinan tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif dengan pengangguran dan distribusi pendapatan. Sedangkan kemiskinan menunjukkan koefisien variabel hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan kemiskinan. Sedangkan secara simultan pengangguran, kemiskinan dan distribusi pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo.

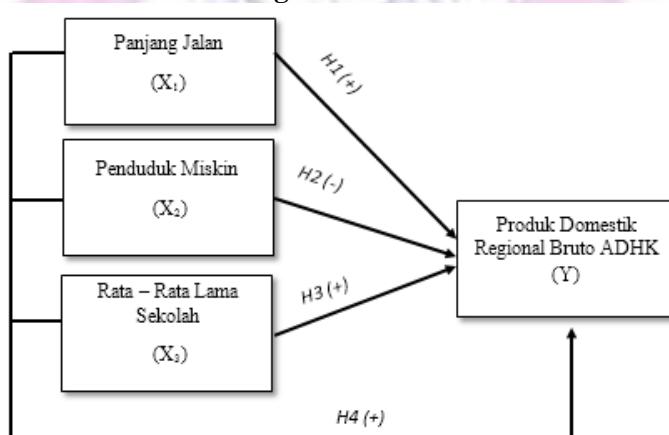
Risky Pratama, Prof. Dr. Paulus Kindangen dan Een N. Walewangko (2017) berjudul Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Path. Hasil analisis menunjukkan investasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi begitu juga dengan tenaga kerja yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pendidikan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan investasi memberikan pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, akan tetapi tenaga kerja secara tidak langsung belum bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Tingkat Pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara.

Paulus Iriyena, Amran T. Naukoko dan Hanly .F. Dj. Siwu (2019) berjudul Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kaimana 2007-2017. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi dan kondisi jalan sebagai variabel dependen dan harus analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sebagai variabel independent. untuk infrastruktur jalan berkorelasi positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan kondisi jalan memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Intan Suswita, Darwin Damanik dan Pauer Darasa Panjaitan (2020) berjudul Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, panjang jalan (X_1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Kedua, jumlah air bersih (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Ketiga, jumlah pelanggan listrik (X_3) di PLN Kabupaten Simalungun berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun.

Kerangka Pemikiran

Gambar 2
Kerangka Pemikiran



Hipotesa penelitian

1. Diduga bahwa variabel pembangunan infrastruktur (panjang jalan) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado.
2. Diduga bahwa variabel kemiskinan (penduduk miskin) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado.
3. Diduga bahwa variabel pendidikan (rata – rata lama sekolah) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado.
4. Diduga bahwa variabel pembangunan infrastruktur (panjang jalan), kemiskinan (penduduk miskin), dan pendidikan (rata – rata lama sekolah) secara bersama – sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series, dengan periode pengamatan tahun 2001-2021 (dua puluh satu tahun). Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama melainkan diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Biasanya data tersebut telah digunakan oleh peneliti sebelumnya atau dikumpulkan oleh instansi terkait Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung fenomena yang sedang diteliti, tetapi mendapatkan

informasinya dari sumber-sumber primer lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pembangunan infrastruktur, kemiskinan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Manado yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Pembangunan Infrastruktur (X_1). Pembangunan Infrastruktur dalam penelitian ini adalah panjang jalan menurut kondisi jalan baik di Kota Manado yang diukur dalam bentuk satuan Km.
2. Kemiskinan (X_2). Kemiskinan dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin di Kota Manado yang diukur dalam bentuk satuan persen.
3. Pendidikan (X_3). Pendidikan dalam penelitian ini adalah rata – rata lama sekolah di Kota Manado yang diukur dalam bentuk satuan tahun.
4. Pertumbuhan ekonomi (Y). Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut lapangan usaha di Kota Manado dalam miliaran rupiah.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan di penelitian ini adalah Metode Analisis Regresi Linier Berganda (*multiple linear regression*) untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap dependen. Prinsip – prinsip dasar pemodelan regresi berganda/majemuk tidak berbeda dengan analisis regresi sederhana. Hanya saja, jika pada regresi sederhana digunakan sebuah variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat, maka pada regresi majemuk digunakan lebih dari sebuah/satu variabel bebas. Analisis ini dilakukan dengan program *SPSS 25*. Model persamaan dalam penelitian ini, dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$PE_t = \beta_0 + \beta_1 PJ_t + \beta_2 PM_t + \beta_3 RLS_t + e_t$$

Keterangan:

PE = Pertumbuhan Ekonomi (Variabel terikat/dependen)

PJ = Panjang Jalan (Variabel bebas atau independen 1)

PM = Penduduk Miskin (Variabel bebas atau independen 2)

RLS = Rata – rata Lama Sekolah (Variabel bebas atau independen 3)

β_0 = Konstanta/Intersep

β_1 dan β_2 = Koefisien regresi parsial

e = Variabel Gangguan atau Error

t = Dalam data time series subskrip t menunjukkan waktu

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji Signifikansi

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk uji signifikan model. Uji F ini bisa dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance* = ANOVA). Pada uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, nilai F hitung dilihat pada tabel hasil output uji f yaitu tabel ANOVA. F tabel dihitung dengan menggunakan rumus $[F \text{ tabel} = F (k ; n-k)]$. Apabila $F \text{ hitung} \geq F \text{ tabel}$, maka dikatakan pengaruhnya signifikan dan apabila $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$ maka pengaruhnya tidak signifikan.

Uji t (Parsial)

Uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol (H_0) sebuah pendekatan alternatif, namun juga sebagai pelengkap untuk metode interval kepercayaan dari pengujian hipotesis statistik merupakan pendekatan pengujian signifikansi yang dibangun, Menurut Widarjono (2018: 42). Pada uji t dinilai dari seberapa besar nilai signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$, maka bisa disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya apabila $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$, maka dikatakan pengaruhnya signifikan yaitu H_a diterima.

Koefisien Determinasi R^2

Dalam mengukur seberapa baik garis regresi cocok dengan datanya atau mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi digunakan konsep koefisien determinasi (R^2). Untuk menilai Uji R^2 sendiri dapat dilihat pada tabel hasil output uji R^2 yaitu tabel Model Summary pada kolom R Square, nilai itulah yang akan menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan seberapa besar pengaruh variabel independen yang dimiliki nilai R Square tersebut terhadap variabel dependen.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, Widodo (2019:80). Dalam uji normalitas ada 2 metode yaitu: (1) melalui histogram, dan (2) uji yang dikembangkan oleh Jarque-Bera (J-B). Cara menilai dan mengetahui hasil uji normalitas, yaitu dengan melihat gambar hasil output uji normalitas dimana jika titik – titik mengikuti garis diagonal artinya berdistribusi normal, jika titik – titik tidak mengikuti garis diagonal artinya tidak terdistribusi normal (Widarjono 2018:49).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, Widodo (2019:78). Cara melihat multikolinieritas ialah dengan melihat tabel Collinearity Statistic pada kolom VIF, dimana jika Nilai VIF tidak melebihi angka 10, hal ini berarti tidak terjadinya multikolinieritas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, Widodo (2019:80). Cara untuk memprediksi, mengetahui atau menilai Uji Heteroskedastisitas yaitu dengan melihat titik – titik scatterplot pada gambar hasil output uji heteroskedastisitas, jika titik – titik berbentuk pola seperti bergelombang, melebar itu artinya tidak adanya heteroskedastisitas. Begitu sebaliknya, jika titik – titik tidak berbentuk maka terjadinya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), Widodo (2019:79). Dalam mendekripsi masalah autokorelasi banyak metode yang bisa digunakan. Salah satunya uji yang populer digunakan di dalam ekonometrika adalah metode yang dikemukakan oleh Durbin-Watson (d)². Cara untuk melihat hasil output uji autokorelasi yaitu dalam tabel model summary pada nilai Durbin-Watson, lalu melihat nilai dalam tabel distribusi durbin – watson sesuai jumlah sampel (n) dan jumlah variabel independen (k). Dengan begitu, bisa disimpulkan atau dikategorikan bahwa model regresi berada di daerah menolak hipotesis nol, daerah keragu-raguan, ataupun berada di daerah gagal menolak hipotesis nol.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel coefficients adalah hasil Pengujian regresi linier berganda yang dilakukan dengan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen (3 variabel independen) dengan persamaan regresi linier berganda.

Tabel 1
Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-203980365.824	45399294.050		-4.493	.000
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	13582437.165	8225699.766	.263	1.651	.117
Penduduk Miskin	-1654465.763	1134718.393	-.195	-1.458	.163
Rata - Rata Lama Sekolah	17791026.460	4740420.027	.588	3.753	.002

a. Dependent Variable: PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Berikut adalah hasil regresi berganda berdasarkan hasil output tabel diatas diperoleh persamaan:

$$PE = -203,824 + 135,165PJ_1 - 165.763PM_2 + 177,460RLS_3 + \varepsilon_t$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai signifikan menyatakan bahwa nilai panjang jalan (X1), penduduk miskin (X2), dan rata – rata lama sekolah (X3) berpengaruh terhadap PDRB (pertumbuhan ekonomi) (Y).
2. Secara parsial, infrastruktur (panjang jalan) berpengaruh positif terhadap PDRB (pertumbuhan ekonomi) tetapi pengaruh ini tidak signifikan. Ketika, infrastruktur yang diwakili oleh panjang jalan meningkat, maka PDRB (pertumbuhan ekonomi) akan cenderung meningkat.
3. Secara parsial, kemiskinan (penduduk miskin) berpengaruh negatif terhadap PDRB (pertumbuhan ekonomi) tetapi pengaruh ini tidak signifikan. Ketika, kemiskinan yang diwakili oleh penduduk miskin meningkat, maka PDRB (pertumbuhan ekonomi) akan cenderung menurun.
4. Secara parsial, pendidikan (rata – rata lama sekolah) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB (pertumbuhan ekonomi) Artinya, rata – rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap PDRB (pertumbuhan ekonomi). Ketika tingkat pendidikan yang diwakili oleh rata – rata lama sekolah meningkat, maka PDRB (pertumbuhan ekonomi) akan cenderung meningkat.
5. Secara simultan, panjang jalan, penduduk miskin dan rata – rata lama sekolah berpengaruh terhadap PDRB (pertumbuhan ekonomi).
6. Berdasarkan hasil penelitian, panjang jalan, penduduk miskin dan rata – rata lama sekolah mampu menjelaskan atau mempengaruhi PDRB (pertumbuhan ekonomi) sebagaimana yang ditunjukkan oleh R^2 sebesar 0.732.

Hasil Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) dapat dilihat pada hasil output tabel analisis regresi berganda ketentuannya adalah jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka H_a diterima, jika nilai signifikan $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

1. t hitung variabel panjang jalan

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,117 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,651 < t$ tabel 2,110, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti X1 tidak berpengaruh terhadap Y.

2. t hitung variabel penduduk miskin

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,163 > 0,05$ dan nilai t hitung $-1,458 < t$ tabel 2,110, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti X2 tidak berpengaruh terhadap Y.

3. t hitung variabel rata – rata lama sekolah

Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,753 > t$ tabel 2,110, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang berarti X3 berpengaruh secara signifikan terhadap Y.

Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 2
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression 380.200	3	433311404162126.75 0	15.443	.000 ^b	
	Residual 03.300	17	28058706632011.960			
	Total 583.500	20				

a. Dependent Variable: PDRB Atas Dasar Harga Konstan
b. Predictors: (Constant), Rata - Rata Lama Sekolah, Penduduk Miskin, Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Berdasarkan hasil output pada tabel diatas nilai F hitung adalah 15,443. Nilai F tabel untuk 3 variabel bebas adalah 3,16%. Nilai F hitung (15,443) > Nilai F tabel (3,16). Nilai Sig (0,000) < (0,05), maka dapat disimpulkan X₁, X₂, dan X₃ secara bersama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Y.

Koefisien Determinasi R²

Tabel 3
Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.855 ^a	.732	.684	5297046.973	1.345

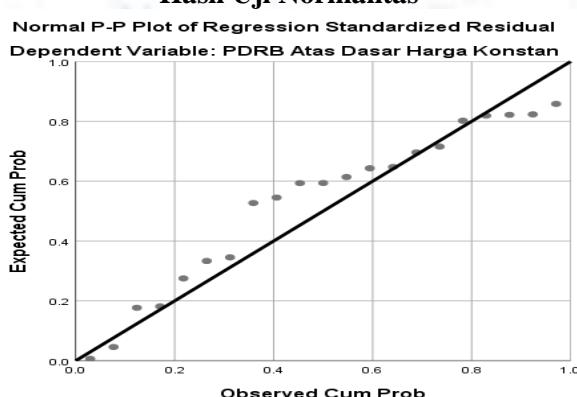
a. Predictors: (Constant), Rata - Rata Lama Sekolah, Penduduk Miskin, Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
b. Dependent Variable: PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R² = 0,732. Hal ini berarti 73,2% variasi dalam Y ditentukan oleh variasi X₁, X₂, X₃. Sedangkan sisanya sebesar 26,8% (100% - 73,2%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas

Gambar 3
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Terlihat dari gambar diatas ini, dimana titik - titik mengikuti garis diagonal sehingga model regresi berdistribusi normal yang artinya adanya Normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

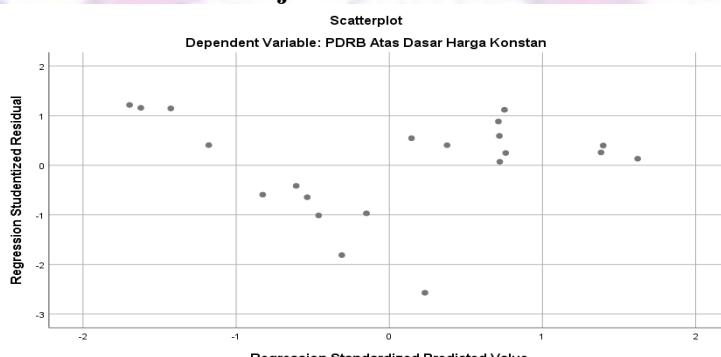
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Baik	.620	1.612
Percentase Penduduk Miskin Kab/Kota	.887	1.128
Rata - Rata Lama Sekolah	.642	1.557

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Dapat dilihat tabel diatas hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF tidak ada yang melebihi angka 10. Hal ini berarti bahwa Variabel X1 Panjang Jalan (1,612), X2 Penduduk Miskin (1,128), X3 Rata – Rata Lama Sekolah (1,557) maka menunjukkan tidak adanya terjadi Multikolinieritas dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Hasil dari uji heteroskedastisitas terlihat dari hasil yang di dapatkan, bahwa titik – titik yang terletak pada posisinya adalah secara acak dan tidak berbentuk pola seperti bergelombang, melebar serta kemudian menyempit. Pada scatterplotnya juga titik – titik yang terletak terlihat menyebar di atas dan dibawah 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dari gambar di atas bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.855 ^a	.732	.684	5297046.973	1.345
a. Predictors: (Constant), Rata - Rata Lama Sekolah, Penduduk Miskin, Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik					
b. Dependent Variable: PDRB Atas Dasar Harga Konstan					

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Berdasarkan nilai durbin-watson pada tabel model summary diatas, yaitu:

$$d = 1,345$$

dan berdasarkan tabel distribusi Durbin-Watson $n = 21$, $k = 3$, yaitu:

$$d_L = 1,026$$

$$d_U = 1,669$$

Karena nilai d berada diantara dl dan du ($1,026 < 1,345 < 1,669$) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berada di daerah keragu-raguan ($dl < d < du$). Maka H_0 (tidak ada autokorelasi) diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi atau tidak ada keputusan.

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel panjang jalan berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto, walaupun pengaruh itu tidak signifikan. Tanda positif ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa infrastruktur berpengaruh positif terhadap kemajuan ekonomi, yang ditunjukkan oleh peningkatan produksi, dalam hal ini PDRB. Artinya, panjang jalan (infrastruktur) yang lebih meningkat akan mendorong ekonomi untuk bertumbuh. Teori dalam ekonomi publik yang menjelaskan bahwa barang publik merupakan barang – barang yang tidak bisa dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut dan barang publik bersifat non rivalry (dapat dikonsumsi bersama pada waktu yang sama tanpa saling meniadakan manfaat) dan bersifat non eksklusif (dimana semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut). Teori Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang dimana pengecualian tidak dapat ditentukan. Jadi sekali suatu barang publik sudah tersedia maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut. Salah satu contoh dari barang publik adalah jalan. Dalam esensi ekonomi publik juga, Adam Smith memberikan pandangan bahwa tugas dan peran yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti halnya dengan jalan, jembatan, pelabuhan dan infrastruktur dasar lainnya. Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah karena dengan adanya jalan dapat mempermudah mobilitas barang maupun orang dari satu daerah ke daerah lain dengan begitu akan berakibat baik terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto) yang semakin meningkat. Jalan adalah barang publik, yang setiap orang dapat memanfaatkannya. Ketersediaan jalan memberikan kesempatan bagi banyak orang dan berbagai kegiatan bisnis untuk melakukan berbagai aktifitas terutama transportasi dengan lebih mudah dan efisien. Ketika semakin banyak orang dan bisnis beraktifitas sebagai hasil dari tersedianya infrastruktur jalan apalagi jalannya makin panjang dalam kondisi baik maka aktifitas ekonomi terus meningkat dan produksi bertambah, sehingga ekonomi tumbuh. Sehingga naik dan turunnya pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu infrastruktur jalan. Pengaruh positif panjang jalan terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto) disebabkan karena selama periode 2001-2021 panjang jalan cenderung mengalami berfluktuasi. Dikarenakan juga, pada tahun 2019 – 2020 adanya peningkatan yang cukup baik dalam proses pembangunan panjang jalan dengan begitu banyak jalan yang membaik di Kota Manado. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Suswita, Darwin Damanik, Pawer Darasa Panjaitan, tahun 2020 yang menunjukkan bahwa variabel panjang jalan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto) di Kabupaten Simalungun. Juga penelitian yang dilakukan oleh Aldi Parintak, tahun 2016 yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto) di Kota Palopo. Penelitian yang dilakukan tersebut memperkuat temuan penelitian – penelitian sebelumnya dan penilitian ini tentang pengaruh panjang jalan terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto) di Kota Manado.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap produk domestik regional bruto dan tidak signifikan. Tanda negatif ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap kemajuan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini PDRB. Penduduk miskin adalah orang yang kurang produktif. Jika orang yang kurang produktif meningkat, maka produksi total cenderung menurun atau relatif menurun. Kemiskinan menunjukkan kurangnya/rendahnya produksi, semakin banyak orang miskin maka semakin besar penurunan produksi yang disebabkan oleh kurang produktif orang miskin atau pengangguran orang miskin atau setengah pengangguran orang miskin. Menurut teori, orang miskin adalah mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri bahkan kebutuhan dasar sekalipun. Karena itu, semakin banyak orang miskin semakin menurunnya tingkat produksi dengan begitu penduduk miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak serta kesulitan untuk bersaing dalam hal mendapatkan pekerjaan dengan masyarakat yang berkecukupan. Kemiskinan (penduduk miskin) yang tinggi juga akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Teori

Myrdal berpendapat bahwa pembangunan cenderung lebih banyak menekan pada aspek sosial, yang mana betapa pentingnya mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan harus ditujukan kepada perluasan kesempatan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan. Myrdal mengatakan dalam proses pembangunan terdapat faktor – faktor yang berpotensi perbedaan tingkat pembangunan diantara berbagai daerah dalam sebuah negara. Menurut Myrdal terdapat 2 akibat yang ditimbulkan sehubungan dengan pembangunan yang dilakukan negara maju yaitu *backwash effect* dan *spread effect*. Dari kedua efek tersebut Myrdal berpendapat bahwa efek yang paling kuat adalah backwash effect yang mana pembangunan di daerah kaya lebih banyak menghambat daerah miskin untuk dapat berkembang atau dengan kata lain, akibat pembangunan di daerah kaya daerah miskin semakin miskin. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya jurang yang lebar dalam pembangunan antar daerah kaya dengan miskin yang makin lama semakin besar. Hal ini jelas kurang menguntungkan bagi suatu negara, sebab jurang perbedaan yang semakin lebar sangat rawan untuk terjadinya kecemburuhan sosial yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil. Jika penduduk miskin meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kemiskinan dapat menjadikan efek yang sangat serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan. Dan jika penduduk miskin makin meningkat akan ada pengaruh yang tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto) seperti, daya beli masyarakat akan kurang akibatnya perusahaan atau produsen tidak dapat menjual banyak barang dan jasa dalam suatu wilayah atau kota maupun dalam cakupan negeri sehingga akan berdampak dan meningkatnya angka pengangguran, banyaknya kasus putus sekolah, munculnya berbagai masalah kesehatan di masyarakat, dan menurunnya kualitas generasi penerus. Pengaruh negatif penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto) disebabkan karena selama periode 2001 – 2021 penduduk miskin di Kota Manado cenderung mengalami fluktuasi dengan data penduduk miskin di Kota Manado yang paling tinggi berada di tahun 2003. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitrah Hardiansyah A. Mohamad, Anderson G. Kumenaung, dan Agnes L.Ch.P. Lapian, tahun 2021 yang menunjukkan bahwa kemiskinan (penduduk miskin) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo. Dan penelitian yang dilakukan oleh Widya Permatasari, tahun 2021 yang menunjukkan bahwa pengujian hasil memaparkan kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat periode tahun 2014-2019. Juga penelitian yang dilakukan Amita Prameswari, Sri Muljaningsih, dan Kiki Asmara, tahun 2021 yang menunjukkan bahwa kemiskinan (penduduk miskin) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto) di Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan tersebut memperkuat temuan penelitian – penelitian sebelumnya dan penelitian ini tentang pengaruh penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto) di Kota Manado.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel rata – rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto) dan nilainya signifikan. Tanda positif ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa apabila pendidikan (rata – rata lama sekolah) mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto) akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya, apabila rata – rata lama sekolah turun maka pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDRB akan mengalami penurunan. Pendidikan yang meningkat berarti pengetahuan, keahlian akan meningkat. Jika orang yang berpendidikan/terampil itu meningkat, maka mereka lebih mampu untuk mengidentifikasi masalah, mengatasi, membuat/mengambil keputusan yang lebih baik dan berkualitas tentang apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah, mampu bekerja lebih baik, mampu untuk melakukan pekerjaan yang produktif karena memiliki pengetahuan dan keahlian, mampu berpikir tentang masa depan dan bagaimana menghadapi masa depan dengan kesiapan yang lebih baik sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Sehingga orang yang memiliki pendidikan akan lebih meningkat produksinya. Teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang utama adalah hasil dari kekuatan endogen, bukan eksternal (eksogen). Teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa investasi

dalam sumber daya manusia, inovasi, dan pengetahuan merupakan contributor signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini juga berfokus pada eksternalitas positif dan efek limpahan ekonomi berbasis pengetahuan yang akan mengarah pada pembangunan ekonomi. Teori pertumbuhan endogen pada dasarnya berpendapat bahwa tingkat pertumbuhan jangka panjang suatu ekonomi tergantung pada langkah – langkah kebijakan. Misalnya, subsidi untuk penelitian dan pengembangan atau pendidikan untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan. Jika rata – rata lama sekolah meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan, dikarenakan rata – rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang di jalani. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan dapat diperoleh sesuai dengan tingkat pendidikan seseorang yang nantinya akan mendorong setiap orang untuk memberikan kontribusi aktif dalam pembangunan melalui produktivitas yang akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jika pendidikan (rata – rata lama sekolah) menurun akan terjadinya pengaruh yang tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado, yaitu akan munculnya ketidakmerataan pembangunan pendidikan dan berkurangnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat yang akan memicu kemiskinan lebih tinggi. Pengaruh positif rata – rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto) disebabkan karena selama periode 2001 – 2021 rata – rata lama sekolah di Kota Manado cenderung mengalami kenaikan tetapi, data yang ditunjukkan pada tahun 2010 adalah data yang paling rendah. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hedi dan Wiwin Zakiah, tahun 2018 yang menunjukkan bahwa rata – rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2015. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Octavia Giri Putri, Putu Ngurah Suyatna Yasa dan A.A. Ketut Jayawarsa, tahun 2022 yang menunjukkan bahwa rata – rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Bali. Juga penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Kurniawan, tahun 2019 yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel rata-rata lama sekolah (RLS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten/kota Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah Tahun 2010- 2015. Penelitian yang dilakukan tersebut memperkuat temuan penelitian – penelitian sebelumnya dan penelitian ini tentang pengaruh rata – rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto) di Kota Manado.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel pembangunan infrastruktur (panjang jalan) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado.
2. Variabel kemiskinan (penduduk miskin) berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado.
3. Variabel pendidikan (rata - rata lama sekolah) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado.
4. Variabel pembangunan infrastruktur (panjang jalan), kemiskinan (penduduk miskin) dan pendidikan (rata – rata lama sekolah) secara bersama – sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto ADHK) di Kota Manado.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan oleh penulis dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Manado sangat di harapkan bisa lebih meningkatkan kebijakan dalam pembangunan infrastruktur jalan agar kondisi jalan di Kota Manado makin lebih baik, agar dapat membantu proses akses produksi barang maupun jasa yang ada di Kota Manado. Bisa dilakukan perbaikan atau menambah akses jalan yang sangat strategis karena melihat kendaraan di Kota Manado lebih hari makin banyak dan jalan utama Kota Manado peningkatannya hanya kecil sehingga bisa memperkecil arus kemacetan di Kota Manado. Selain itu, akan sangat meningkatkan PDRB dalam proses tingkat produktivitas ekonomi, sehingga bisa mencapai kesejahteraan masyarakat di Kota Manado.
2. Pemerintah Kota Manado diharapkan bisa memaksimalkan lagi kebijakan dalam segi kemiskinan, mengingat penduduk miskin di Kota Manado masih banyak dan bertambah. Maka dari itu, perlu adanya bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu, seperti bisa membuka lapangan pekerjaan yang sesuai, memberikan beasiswa maupun modal untuk masyarakat bisa membuka bisnis untuk bisa mencukupi kebutuhan mereka masing – masing, agar bisa membawa perubahan yang baik bagi penduduk miskin di Kota Manado dan menjadi masyarakat yang mandiri. Dengan begitu akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi (produk domestik regional bruto) baik penggunaan dan penyaluran kepada masyarakat yang ada di Kota Manado.
3. Pemerintah Kota Manado diharapkan bisa membantu dan memfokuskan lagi program peningkatan terhadap pendidikan, mengingat angka rata – rata lama sekolah di Kota Manado hanya 11 tahun dengan demikian dapat dilihat masih banyak masyarakat yang tidak menyelesaikan sekolah nya sampai sekolah menengah atas. Adapun upaya yang bisa dilakukan yaitu mengatur program pembangunan kurikulum, program pengadaan buku ajar atau buku paket untuk siswa, bantuan operasional sekolah yang rata, serta peningkatan program mutu guru, dimana guru juga harus bisa mengajar atau menyampaikan materi dengan berkualitas dan sesuai dengan program ataupun tujuan yang sudah di tetapkan pemerintah. Sehingga peran pemerintah yang akan menjamin kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan juga akan menjadi nyata di Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

Mankiw, N. Gregory. 2003 & 2006. *Teori Makro Ekonomi*, Terjemahan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sukirno, Sudono. 2016. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*”, Kencana: Jakarta, 2016.

Noviya, Reza. 2018. *Analisis Pengaruh Pelanggan Listrik, Sekolah, dan Puskesmas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015*, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30014/1/14810020_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Todaro, Michael. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Mirah, Meyvi Rine. 2020. *Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi. Vol. 21 No.. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32815>

Badan Pusat Statistik – Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha, (2015-2020).

Suripto dan Lestari Eva Dwi. 2019. *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap PDRB di Provinsi Indonesia*. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Volume 21, No. 1, Februari. <http://jurnalwahana.aaykpn.ac.id/index.php/wahana/article/view/146>

Meier, G. M. dan J. E. Rauch. 2000. *Leading Issues in Economic Development (seventh edition)*. New York-Oxford: Oxford University Press.

Gunandi, Brata Aloysius. 2002. *Pembangunan Manusia Dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang Hal: 113 – 122. Vol 7, No. 2. <https://journal.uii.ac.id/JEP/article/view/645/573>

Budiarti, Devi dan Seosatyo, Yoyok. 2014. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan*

Ekonomi Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2000-2011. Ejurnal Universitas Negeri Surabaya. [file:///C:/Users/Windows%208/Downloads/7189-Article%20Text-9791-1-10-20140227%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/Windows%208/Downloads/7189-Article%20Text-9791-1-10-20140227%20(4).pdf)

Budiono. 2018. *Teori Pertumbuhan Ekonomi.* Edisi Pertama, Cetakan Kesembilan, Juli.

Tarigan, Robinson. 2012. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi,* Jakarta :PT. Bumi Aksara,

Suswita, Intan. 2020. *Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun,* EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 2 No.1, Universitas Simalungun. <https://www.neliti.com/id/publications/327976/pengaruh-infrastruktur-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-di-kabupaten-simalungun-the>

Iek, Mesak. 2013. *Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di pedalaman May Brat Provinsi Papua Barat (Studi Kasus di Distrik Ayamaru, Aitinya, dan Aifat,* Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol 6, No. 1, Febuari. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/download/4510/3439>

Permatasari, Widya. 2021. *Analisis Pengaruh Dana Zakat, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Barat dengan Pendapatan Perkapita Sebagai Variabel Intervening Periode Tahun 2014-2019.* Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Salatiga. <http://jurnal.stiemuhcilacap.ac.id/index.php/je511/article/view/137>

Roring, Gaby Dainty Julliet. 2020. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4 Kota di Provinsi Sulawesi Utara..* Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi. Vol.20 No. 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32806>

Nugroho, SBM. 2014. *Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,* Media Ekonomi dan Manajemen Vol. 29 No. 2 Juli. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/view/229>

Hepi, Wiwin Zakiah. 2018. *Pengaruh Angka Harapan Hidup Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap PDRB Perkapita Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015,* Faculty of Economics and Bussines, Palangka Raya University, Volume 4 Nomor 1, Juni. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jgr/article/download/2277/2032/5238>

Wilar, Ariance. 2019. *Analisis Anggaran Dinas Pendidikan Infrastruktur dan Sektor Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sulawesi Utara.* Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi. Vol.20 No.2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32786>

Mohamad, Fitrah Hardiansyah, 2021. *Analisis Pengaruh Pengangguran, Kemiskinan, dan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo,* Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi. Vol. 22 No. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/download/35492/33211>

Pratama, Risky . 2017 . *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Propinsi Sulawesi Utara,* Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi. Vol 18 No. 7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/download/17665/17193>

Iriyena Paulus, Amran T. Naukoko , Hanly .F. Dj. Siwu. 2019. *Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kaimana 2007-2017.* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 19 No. 02. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/24861/24567>

Widodo, 2019. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis.* Edisi Pertama. Cetakan Ketiga, Januari.

Widarjono, Agus, 2018. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* Edisi Kelima. Cetakan pertama, Oktober.

Prameswari, Amita dkk. 2021. *Analisis Pengaruh Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur.* Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, No. 2. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/article/download/909/491>

Putri, Ni Komang Octavia Giri. 2022. *Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan manusia Terhadap Pertumbuhan ekonomi Kabupaten / Kota di Bali Tahun 2012-2019.* Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ) 5 (2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali-Indonesia. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wedj/article/view/5655/3919>

Kurniawan, Wahyu. 2019. *Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Tenaga Kerja Dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah Tahun 2010-2015.* Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49720>



ANALISIS EKSPOR DI MASA PANDEMI COVID-19 DAN SEBELUM PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Indra Andika Lantemona¹, Vecky A. J. Masinambow², Een Novritha Walewangko³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email: vajmasinambow@unsrat.ac.id, eenwalewangko@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksport di masa pandemic covid-19 dan sebelum masa pandemic covid-19 terhadap Produk Domestik Regional Brutodi Sulawesi Utara. Salah satu gambaran perkembangan perekonomian daerah biasanya di ukur dari perkembangan dan peningkatan produk domestic regional bruto.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara yaitu Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dan Ekspor dari 2017'1-2022'1. Dengan metode analisis regresi dummy variabel. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa eksport pada masa sebelum pandemic covid-19 berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto sementara pada masa pandemic covid-19 tidak berpengaruh.

Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) dan Ekspor

ABSTRACT

This studt attempts to analysis export on pandemic civid and before pandemic covid-10 to Product Domestic Regional Bruto the constant price in North Sulawesi. Basic problem occuring in the economy at the mommen is because covid-19 that interferes with the virus and the economu both at the center and the area.

As the data use in research Product domestic bruto the constant price and export in 2017'1-2022'1 years in North Sulawesi with the method analysis of regression variable dummy. The research finding indicate than export pandemic covid-19 to exert anproduct domestic regional bruto, but export on pandemic covid-19 not will exert to product domestic regional bruto.

Keyword: Product domestic regional bruto the constant price and export

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

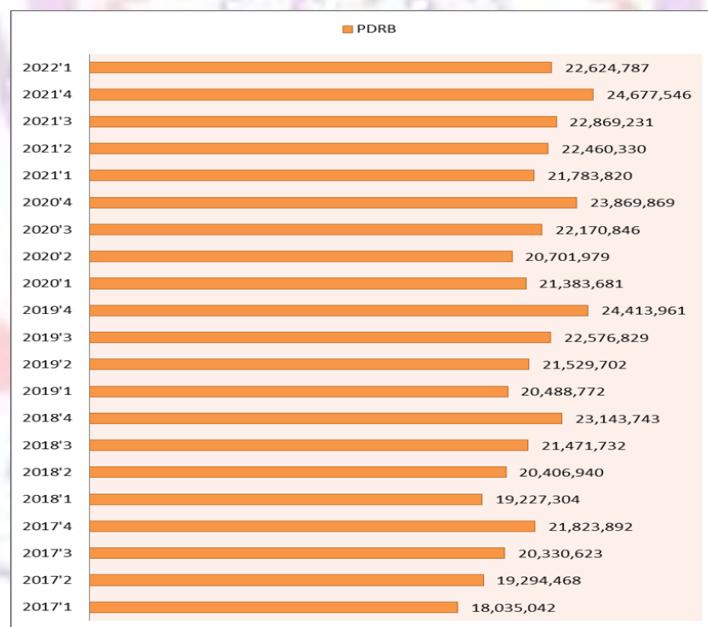
Pembangunan ekonomi adalah faktor paling penting dalam setiap usaha untuk memecahkan permasalahan kependudukan dan masalah-masalah yang terkait dengan yang harus diberi perioritas dalam setiap usaha nasional maupun internasional untuk melaksanakan program - program kependudukan dan pembangunan secara terpadu, dan proses pembangunan ekonomi menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan-perubahan yang signifikan dari indicator-indikator ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka mencapai kemakmuran, yang ditunjukkan peningkatan pendapataan perkapita dalam jangka panjang. Seperti kita ketahui bersama bahwa tingkat kehidupan sebagai besar penduduk di Negara Berkembang relatif masih rendah (Subandi 2012)

Salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ataupun daerah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional bruto dengan pencapaian dan peningkatan sektor- sektor di dalamnya yang mengelolah berbagai macam komoditi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu. Penilaian PDRB ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni atas dasar harga berlaku maupun atas dasar

harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu. PDRB berperan sebagai pengukur tingkat pendapatan bruto yang berada dalam suatu provinsi. PDRB berpengaruh pada perekonomian dengan cara meredistribusi pendapatan bruto dan kekayaan serta menambah tingkat output. PDRB yang selalu menurun menyebabkan ketidakpastian bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di daerah akan menurun jika PDRB selalu menurun tiap tahunnya. Bukan hanya itu, kegiatan perekonomian juga akan menurun dan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami kemunduran serta pengangguran yang semakin bertambah serta semakin merajanya tingkat kemiskinan. Kenyataan tersebut menjadi hal penting sebagai upaya untuk melakukan analisis terkait dengan kondisi perubahan dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). (Gennaioli dan Porta, 2013).

Tujuan Produk Domestik Regional Bruto yaitu untuk meringkas semua aktivitas ekonomi dalam periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah semua nilai yang tidak melihat pemilik faktor produksi muncul dari semua kegiatan ekonomi di suatu daerah (Lestari & Budhi, 2014). Jumlah PDRB yang meningkat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat daerah termasuk di dalamnya Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi produk domestic regional bruto yang terjadi di Sulawesi Utara pada masa pandemic mengalami fluktuasi akibat dari adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang di berlakukan oleh pemerintah, dan untuk perkembangan Produk Domestik Regional Bruto dapat di lihat pada grafik 1 berikut :

Grafik 1
Produk Domestik Regional Bruto (ADHK)
Tahun 2017'1 – 2022'1



Grafik 1 dapat dilihat besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan ini juga terjadi di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kenaikan tersebut di dorong oleh makin tingginya kinerja pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi PDRB suatu daerah seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, budaya dan sumber daya modal. Berdasarkan ruang lingkup ekonomi publik, kegiatan yang dianggap memiliki pengaruh penting terhadap nilai PDRB adalah kegiatan ekspor. Namun sebagai daerah yang masih berkembang Sulawesi Utara masih diperhadapkan dengan begitu banyak fenomena dan permasalahan-permasalahan yang menghambat proses pembangunan ekonomi. Rendahnya akumulasi kapital merupakan hambatan bagi suatu negara untuk melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga harus dicari alternatif penyelesaiannya agar pembangunan bisa dapat terus berjalan yakni dengan meningkatkan aktifitas perdagangan baik internasional maupun domestik.

Perdagangan Internasional ataupun domestik merupakan aspek penting bagi suatu negara atau daerah. Perdagangan Internasional/domestik terjadi karena adanya perbedaan sumber daya manusia, sumber daya alam, seperti iklim dan letak geografis serta perbedaan keadaan ekonomi dan sosial yang tersedia pada suatu negara. Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada masing-masing negara tersebut yang menimbulkan perbedaan barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, serta mutu dan kuantumnya. Perdagangan Internasional/domestik dibagi menjadi dua kategori yaitu perdagangan barang dan perdagangan jasa. Kegiatan perdagangan Internasional dilakukan bertujuan untuk meningkatkan standar hidup negara tersebut (Schumacher, 2013). Salah satu cara suatu negara melakukan perdagangan Internasional adalah dengan cara melakukan kegiatan ekspor (Apridar, 2012).

Suatu negara yang melakukan ekspor akan memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, dan kemandirian mengelola sumber daya alam, kemajuan spesialisasi pada industrialisasi serta tenaga kerja (Perdana, 2010). Keuntungan yang dapat dilihat dari nilai ekspor impor negara terlihat dalam neraca pembayaran. Jika nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan nilai impor menunjukkan majunya perekonomian suatu negara dari segi kegiatan perdagangan Internasional, demikian sebaliknya jika nilai ekspor lebih rendah menunjukkan rendahnya perekonomian negara yang berasal dari kegiatan perdagangan Internasional (Dewi* & Ayu, 2015).

Namun pada Tahun 2020 masa dimana Indonesia bahkan seluruh dunia di terpa dengan permasalahan menyebarluasnya virus covid-19 yang mengakibatkan di tutupnya seluruh akses kegiatan ekonomi terutama ekspor guna memutus mata rantai penyebaran virus, sehingga menghambat akan pergerakan perekonomian negara dan daerah. Pandemi COVID 19 telah memberi dampak yang sangat besar bagi hampir seluruh sektor. Akibat pandemi, terjadi perubahan besar dalam pola perdagangan dunia seperti, adanya sistem lockdown yang diterapkan oleh beberapa negara yang mempengaruhi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman barang, penerapan protokol kesehatan yang mengakibatkan bertambahnya biaya pengiriman logistik, adanya larangan ekspor dan impor beberapa komoditas tertentu seperti pangan dan kesehatan, gangguan yang terjadi pada supply dan demand, juga perubahan pada pusat rantai pasokan global dari beberapa negara seperti, China, Jerman, dan Amerika Serikat. China sendiri merupakan partner dagang terbesar yang menjalin hubungan perdagangan internasional dengan Indonesia.

Dalam usaha menghadapi keadaan perekonomian dunia yang kadang tidak menentu serta untuk meningkatkan ekspor Indonesia, perlu di perhatikan variabel-variabel yang berperan dan berpengaruh serta perubahan-perubahan struktur industri-industri pengolahan di Indonesia. Namun terdapat peluang bagi para pengusaha untuk tetap melakukan ekspor di tengah pandemi. Peningkatan ekspor di masa pandemi COVID 19 didominasi oleh komoditas buah-buahan. Di Indonesia realisasi buah-buahan tahun 2020 mencapai USD 389,9 juta atau meningkat 30,31% disbanding tahun 2019. Negara tujuan utama ekspor adalah China, Hongkong, Malaysia, Arab Saudi dan Pakistan.

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional mendukung peningkatan ekspor nasional di masa pandemi melalui berbagai program. Salah satu program yang sedang menjadi trend dalam dunia ekspor adalah Export Coaching Program (ECP). Melalui Export coaching Program (ECP) diharapkan agar pebisnis Indonesia di 10 (sepuluh) daerah tersebut dapat didampingi guna menjalankan bisnis eksportnya secara efektif dengan menitik beratkan pada semangat untuk memperbaiki usaha dalam upaya peningkatan manajemen, produksi, promosi, dan pemasaran ekspor, dan salah satu daerah yang memiliki peningkatan ekspor walaupun dalam kondisi pandemic adalah Sulawesi Utara

Sulawesi Utara yang merupakan daerah dengan sumber daya alam yang melimpah, pada masa pandemic pemerintah terus mengadakan upaya peningkatan kapasitas ekspor. Nilai ekspor nonmigas Sulawesi Utara (Sulut) pada Juli 2020 dibanding bulan sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 3,01 persen, hal ini menggembirakan di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi. "Pada Juli 2020, ekspor Sulut tercatat sebesar 70,37 juta dolar AS, sementara Juni 2020 senilai 68,32 juta dolar AS, sehingga secara bulanan (m-to-m) naik 3,01 persen, bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2019 (y-on-y), yakni meningkat sebesar 2,04 persen. Pada bulan Juli terjadi kenaikan pangsa ekspor golongan ini menjadi 56,67 persen, dibandingkan bulan yang lalu yang mencapai 43,56 persen dari total ekspor.

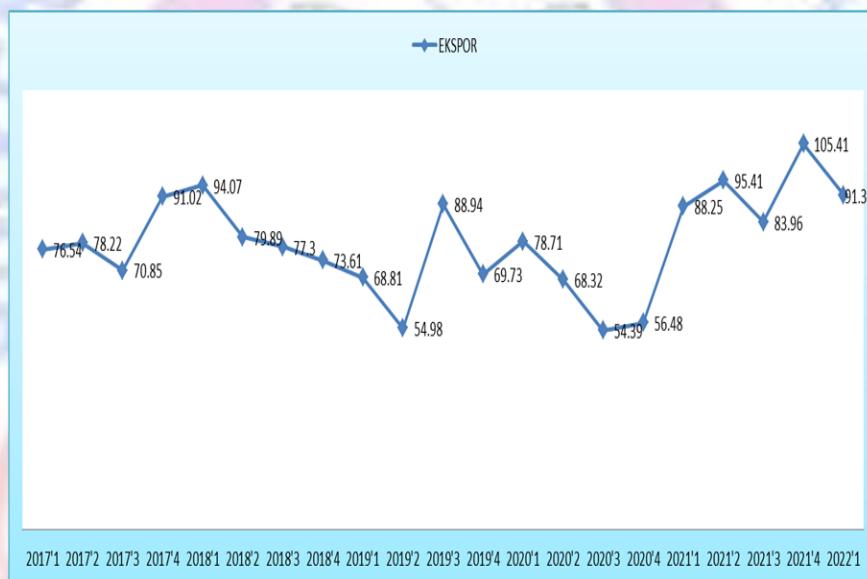
Keenam negara tujuan komoditas ini . yakni berturut-turut dari nilai yang tertinggi: Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Sri Lanka, Jepang, dan Tiongkok. Nilai ekspor dari golongan barang ini mengalami kenaikan nilai FOB sebesar 34,01 persen dari bulan sebelumnya (m-to-m). Sedangkan untuk (y-on-y) juga mengalami kenaikan sebesar 16,36 persen.

Posisi teratas negara tujuan ekspor nonmigas Sulawesi Utara pada Juli 2020 adalah Amerika Serikat, yakni senilai 17,75 juta dolar AS atau 25,23 persen dari total nilai ekspor. Adapun produk yang paling banyak diekspor ke negara tersebut adalah Lemak dan minyak hewan/ nabati /Animal or vegt fats and oils.

Sebagian besar komoditas ekspor nonmigas dikirim melalui beberapa pelabuhan di Sulut, meskipun ada pula yang dikirim melalui pelabuhan di provinsi lain.

Pelabuhan Bitung merupakan pelabuhan laut terbesar di Sulawesi Utara, dan pada bulan Juli 2020 47,08 persen barang ekspor dikirim melalui pelabuhan ini, dan nilai ekspornya mengalami kenaikan sebesar 5,82 persen dibandingkan dengan Juni 2020 (m-to-m), jika dilihat berdasarkan data kuartal nilai ekspor sebelum pandemic bahkan pada saat pandemic berfluktuasi berikut dalam grafik 2

Grafik 2
Perkembangan Ekspor Sulawesi Utara
Tahun 2017'1-2022'1



Berdasarkan grafik ekspor Sulut mengalami penurunan pada saat masa pandemic di tahun 2020-2021 triwulan 1 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 triwulan 2. Nilai ekspor nonmigas Sulawesi Utara pada Desember 2021 tercatat sebesar US\$ 111,75 juta sementara impornya senilai US\$ 24,16 juta. Komoditas ekspor nonmigas terbesar pada Desember 2021 masih didominasi lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15), senilai US\$ 78,11 juta (69,90% dari total ekspor), sedangkan untuk komoditas impor terbesar adalah bahan bakar mineral (HS 27), senilai US\$ 21,48 juta (88,90% dari total impor). Negara tujuan ekspor non migas terbesar Sulawesi Utara pada Desember 2021 adalah Tiongkok sebesar US\$ 26,68 juta (23,88% dari total ekspor). Sedangkan Singapura menjadi negara pemasok terbesar pada bulan Desember 2021 sebesar US\$ 7,66 juta (31,71% dari total impor).

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan maka peneliti dalam hal ini tertarik lebih dalam untuk meneliti dengan mengangkat judul “Analisis Ekspor di Masa Pandemi Covid-19 dan Sebelum Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara”

Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh ekspor dimasa pandemi Covid-19 terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara ?
2. Bagaimanakah pengaruh ekspor sebelum masa pademi Covid-19 terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Utara?

3. Apakah terdapat perbedaan ekspor sebelum pandemi dan dimasa pandemic Covid-19 terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara ?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh ekspor dimasa pandemi Covid-19 terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Mengetahui pengaruh ekspor sebelum masa pandemic Covid-19 terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara
3. Mengetahui ada tidaknya perbedaan ekspor di sebelum pandemi dan masa pandemi terhadap di Provinsi Sulawesi Utara.

Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah provinsi Sulawesi Utara penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang mengarah pada proses pembangunan daerah.
2. Sebagai wahana latihan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai peran ekspor pada pembentukan PDRB.

LANDASAN TEORI

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan (Todaro dan Smith, 2008)

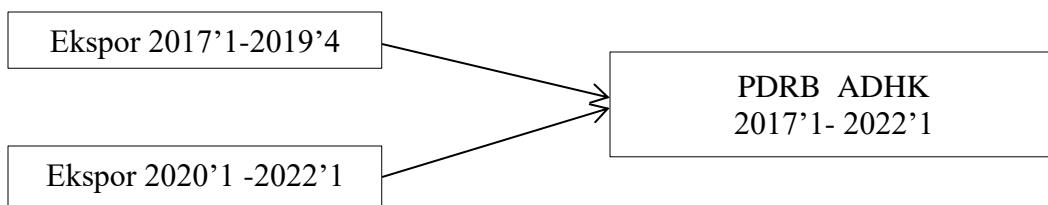
Ekspor

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, di mana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri, sehingga mendorong dalam industri lain, selanjutnya mendorong sektor lainnya dari perekonomian. (Adrian Sutendi 2014).

Penelitian Terdahulu

Nofinawati, Lubis dan Nasution (2017). Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara, tujuan penelitian dengan metode analisis regresi linier berganda dan hasil penelitian Ekspor dan impor berpengaruh signifikan terhadap PDRB dan mampu menjelaskan variasi PDRB sebesar 46,29 persen, dan Karlita dan Yusuf Edi (2013). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Ekspor Terhadap PDRB Sektor Industri di Kota Semarang Tahun 1993-2010, tujuan penelitian Untuk mengetahui pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Ekspor Terhadap PDRB Sektor Industri di Kota Semarang Tahun 1993-2010, metode analisis yang digunakan OLS Regresi Linear Berganda dengan dummy variabel dan hasil penelitian Hanya Investasi yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB sector industri di Kota Semarang. Krisis 1997-1998 dan 2007-2008 tidak mempengaruhi PDRB sector industri di Kota Semarang.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

1. Diduga ekspor pada masa pandemic covid-19 berpengaruh terhadap PDRB di provinsi Sulawesi Utara
2. Diduga ekspor sebelum masa pandemic covid-19 berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara
3. Diduga terdapat perbedaan pengaruh ekspor sebelum dan di masa pandemi terhadap PDRB di provinsi Sulawesi Utara

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data BPS yang diambil melalui website resmi BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2022 Data PDRB ADHK dan data ekspor diambil dalam triwulan (triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV) dan data yang di gunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dan Ekspor.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. PDRB Y : Produk Domestik Bruto yang dihitung atas dasar harga konstan (per-triwulan) di Sulawesi Utara
2. Ekspor X
 - a. Ekspor pada saat pandemi covid-19 adalah nilai ekspor Provinsi Sulawesi Utara diukur dalam satuan dollar pada masa pandemic (per-triwulan) di Sulawesi Utara
 - b. Ekspor pada masa sebelum pademi covid-19 nilai ekspor Provinsi Sulawesi Utara diukur dalam satuan dollar pada masa sebelum pandemic (per-triwulan) di Sulawesi Utara

Metode Analisis

Dummy Variabel

Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif (misal: jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi dan lain-lain). Variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy sering juga disebut variabel boneka, binary, kategorik atau dikotom. Variabel dummy hanya mempunyai 2 (dua) nilai yaitu 1 dan nilai 0, serta diberi simbol D. Dummy memiliki nilai 1 (D=1) untuk salah satu kategori dan nol (D=0) untuk kategori yang lain. Tujuan menggunakan regresi berganda dummy adalah memprediksi besarnya nilai variabel tergantung/dependen atas dasar satu atau lebih variabel bebas/independen, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif (data kualitatif tidak memiliki satuan ukur), agar data kualitatif dapat digunakan dalam analisa regresi maka harus lebih dahulu di transformasikan ke dalam bentuk kuantitatif. (Ghozali, 2013). Adapun formula untuk metode Analisis Regresi dengan Dummy Variabel :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 D_1 + \epsilon$$

Dimana:

Y = PDRB ADHK
 X_1 = Ekspor
 D_1 = Pandemi C12
 b_0 = Konstanta,
 b_{1-2} = Koefisien regresi untuk variabel X_1 , dan D_1
 ε = Standar Error

Pengujian Hipotesis

1. Uji t adalah untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri dengan kriteria pengujian apabila signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak, H_a diterima atau apabila signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak. Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial atau masing-masing dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

Merumuskan Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = 0$, Artinya variabel ekspor tidak berpengaruh terhadap PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Utara.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, Artinya variabel ekspor berpengaruh terhadap PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Utara.

$H_0 : \beta_2 = 0$, Artinya ekspor di masa pandemi tidak memiliki perbedaan pengaruh terhadap PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Utara.

$H_a : \beta_2 \neq 0$, Artinya ekspor di masa pandemi memiliki perbedaan pengaruh terhadap PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Utara

Jika tingkat signifikansi/probabilitas $t_{hitung} \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan jika signifikansi/probabilitas $t_{hitung} \geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

2. Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Langkah-langkah merumuskan hipotesis :

$H_0 : \beta_1, \beta_2, = 0$, Ekspor sebelum pandemi dan dimasa pandemi secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap PDRB ADHK dimasa sebelum pandemi dan dimasa pandemi di Provinsi Sulawesi Utara.

$H_a : \beta_1, \beta_2, \neq 0$ Ekspor sebelum pandemi dan dimasa pandemi secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap PDRB ADHK dimasa sebelum pandemi dan dimasa pandemi di Provinsi Sulawesi Utara.

Jika tingkat signifikansi/probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima dan jika tingkat signifikansi/probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini menggunakan tiga uji asumsi klasik yaitu uji Normalitas, multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas.

Koefisien Determinasi R^2

R^2 adalah suatu besaran yang lazim dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian (*goodness of fit*), yaitu bagaimana garis regresi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Didalam regresi sederhana kita juga akan menggunakan koefisien determinasi untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita punya. Dalam hal ini kita mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Formula untuk menghitung koefisien determinasi (R^2) regresi sederhana :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{TSS - SSR}{TSS}, R^2 = 1 - \frac{\sum \hat{e}^2}{\sum (F_i - Y)^2}$$

(Agus Widarjono hal : 179, 2013).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh ekspor sebelum pandemic covid-19 dan pada masa pandemic covid-19 terhadap PDRB di Sulawesi Utara

Tabel 1
Hasil Regresi Dummy Variabel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3461496.	1867574.	1.853472	0.0779
D19	1600063.	1573135.	1.017117	0.3207
X	2173.477	264.3280	8.222652	0.0000
R-squared	0.796004	Mean dependent var	18970212	
Adjusted R-squared	0.776576	S.D. dependent var	7495476.	
S.E. of regression	3542945.	Akaike info criterion	33.11528	
Sum squared resid	2.64E+14	Schwarz criterion	33.26254	
Log likelihood	-394.3834	Hannan-Quinn criter.	33.15435	
F-statistic	40.97158	Durbin-Watson stat	1.202619	
Prob(F-statistic)	0.000000			

$$Y = 346196 + 1600063d19 + 2173477x$$

Persamaan

1. Masa Sebelum Pandemi Covid-19 $Y = 346196 + 2173.477x$
2. Masa Pandemi Covid-19 $Y = 346196 + 1600063d19(1) + 2173.477x$

$$Y = 194626 + 2173.477x$$

Berdasarkan persamaan sebelum covid maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh dari variabel ekspor adalah sebesar 2173447 terhadap variabel Produk Domestik Regional Bruto yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, sementara untuk persamaan dari hasil sementara covid maka dijelaskan bahwa pengaruh ekspor terhadap Produk Domestik Regional Bruto yang ada di Sulawesi mengalami penurunan yaitu sebesar 194626. Dan berikut di sajikan diagram perbandingan antara ekspor sebelum masa pandemic dan pada masa pandemic covid-19 di Sulawesi Utara

Hasil Uji Parsial t

Hasil uji parsial t Ekspor Sebelum Pandemi Covid-19 (X) Terhadap PDRB di Sulawesi Utara

Nilai t tabel dapat diperoleh dengan rumus :

$t \text{ tabel} : ta : n - k, \alpha = 5\%, = 0,5$

$N = 21$ = Jumlah observasi, $K = 3$ jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka degree of freedom (df) adalah $N - k = 21 - 3 = 18$ lalu lihat tabel t distribution (df,F) $\sim (18 ; 0,5) = 1.734$ dan $t \text{ hitung} = 8.222$

Karena $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a di terima. Berarti secara Parsial variabel independen ekspor sebelum pandemic covid-19 mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap PDRB di Sulawesi Utara (Y). Persamaan regresi menunjukkan angka positif untuk koefisien X dan hal ini sesuai dengan harapan teoritik bahwa ekspor sebelum pandemic covid-19 mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap PDRB.

Hasil uji parsial t Ekspor Pada Masa Pandemi Covid-19 (d19) terhadap PDRB di Sulawesi Utara

Nilai t tabel dapat diperoleh dengan rumus :

$t \text{ tabel} : ta : n - k, \alpha = 5\%, = 0,5$

$N = 21$ = Jumlah observasi, $K = 3$ jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka degree of freedom (df) adalah $N - k = 21 - 3 = 18$ lalu lihat tabel t distribution (df,F) $\sim (18 ; 0,5) = 1.734$ dan $t \text{ hitung} = 1.017$.

Karena t hitung $<$ t tabel, maka H_0 di terima dan H_a ditolak. Berarti secara Parsial variabel independen ekspor pada masa pandemic covid-19 tida memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan PDRB di Sulawesi Utara.

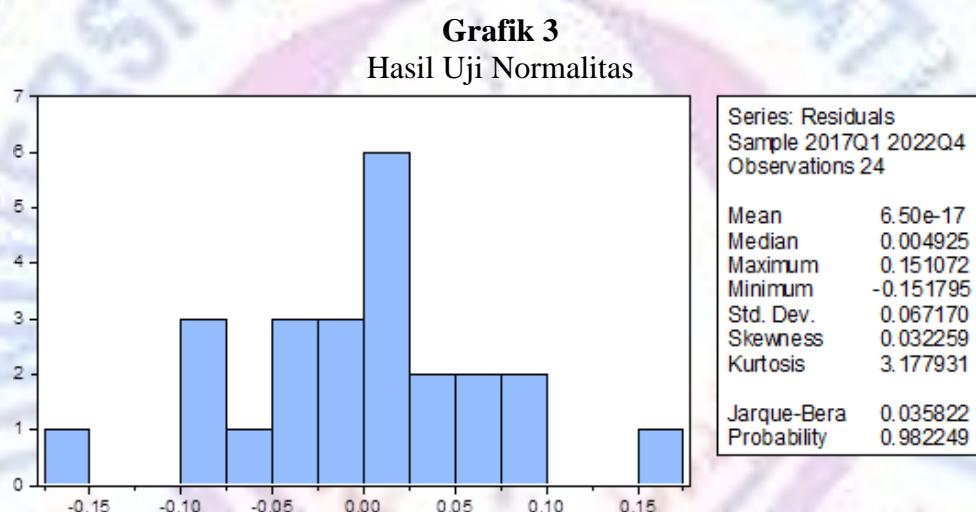
Hasil Uji Slimutan F statistic

$\Omega = 5\%$, $N =$ jumlah observasi, $K = 3$ Jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka degree of freedom (df) adalah $N-k = 21-3=18$ lalu lihat F tabel distiribusi values = $(\Omega = 0,5 : k-1, n-k) = F$ tabel = 3,16 F hitung = 40.97

Karena F hitung $>$ F tabel, maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Berarti secara bersama-sama variabel indenden mempengaruhi PDRB di Sulawesi Utara (Y). (Agus Widarjono, 2013).

Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat bahwa nilai Probability Jarque-Bera sebesar 0,982249 $>$ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah dipenuhi.



Hasil Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel bebas.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.130231	632.5005	NA
D19	0.000854	2.073611	1.036806
X	0.006910	641.2086	1.036806

Sumber : Olahan Eviews 0.8

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel kolom *Centered VIF*. Nilai VIF pada kredit konsumsi dan kredit modal kerja adalah diatas 10. Hal ini menunjukkan Probabilitas > 10 , maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolinearitas pada variabel kredit konsumsi dan kredit modal kerja, sedangkan nilai VIF pada kredit investasi adalah kurang dari 10 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada variabel kredit investasi.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 3
Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	2.372223	Prob. F(2,21)	0.1178
Obs*R-squared	4.422961	Prob. Chi-Square(2)	0.1095
Scaled explained SS	4.612621	Prob. Chi-Square(2)	0.0996

Sumber : Data Olahan eviews 0.8

Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa nilai probability Obs*R squared Prob. Chi- Square 0.1095 > 0.05 berarti model persamaan regresi dalam penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	1.007680	Prob. F(2,19)	0.3838
Obs*R-squared	2.301586	Prob. Chi-Square(2)	0.3164

Sumber : Data Olahan Eviews 0.8

Hasil uji diatas dapat dilihat bahwa nilai probability Obs*R-squared Prob. Chi- Square sebesar 0.1177 > 0,10. Berdasarkan hasil tersebut maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Hasil Koefisien Determinasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis, yang ditujukan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 . Berdasarkan hasil estimasi di dapat nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0.796 yang menunjukkan bahwa variabel independen eksport sebelum masa pandemic dan pada masa pandemic mampu menjelaskan atau mempengaruhi 0.796 % dan sisanya 0,214 % di pengaruh oleh variabel di luar variabel variabel independen eksport.

Pembahasan

Kondisi pandemi Covid-19 yang tidak kunjung menurun memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi di Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktifitas ekonomi. Regulasi pengetatan diberbagai sektor dari aturan PPKM memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan terobosan untuk dapat memberikan solusi agar kemampuan daya beli masyarakat tetap dapat bertahan.

Dampak kedua yang sangat terlihat yang tidak dapat di pisahkan dari kegiatan ekonomi baik daerah maupun ekonomi nasional adalah menurunnya angka Investasi diberbagai sektor usaha. Ketidakpastian akibat pandemic mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi, pengusaha pun demikian. Ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Keraguan berinvestasi mengakibatkan dunia usaha

tidak bergerak seperti yang diharapkan. Investasi di sektor pariwisata, hiburan, seni budaya, travel, transportasi kuliner yang dahulu cukup ramai diminati di Sulawesi Utara saat ini turun sangat drastis. Di tambah PPKM yang membatasi pergerakan di berbagai destinasi wisata. Sebagai contoh kecil runtuhnya investasi usaha dikala pandemik.

Dampak ketiga adalah pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional dikala pandemic. Tekanan penerimaan sektor pajak mempengaruhi pendapatan yang diterima pemerintah sehingga cukup menghampat pendanaan program yang sudah direncanakan. Kondisi pandemic yang menuntut adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas mendorong juga adanya realokasi anggaran dan refocusing anggaran selain didasari adanya tekanan pendapatan yang tidak sesuai dengan proyeksi sebelumnya.

Dampak keempat adalah pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk bertemu dalam berbagai kegiatan termasuk didalamnya kegiatan bisnis/ekonomi mengakibatkan tumbuhnya pergeseran bisnis model yang ada saat ini. Shifting ekonomi konvensional yang dahulu diprediksikan masih membutuhkan waktu untuk implementasi dimasyarakat ternyata dalam kondisi pandemik seperti saat ini, semua pihak dituntut untuk beradaptasi dengan bisnis model yang baru.

Dampak kelima yang cukup signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemik covid-19 mendorong semua orang untuk tidak lagi beraktivitas secara konvensional. Pembatasan pertemuan, pembatasan aktivitas berkerumun menjadi pemicu perlu adanya inovasi dengan pemanfaatan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi jembatan bagi semua pihak untuk terus dapat bertahan dalam berbagai kondisi. Adaptasi dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di sektor ekonomi sudah tidak bisa dihindari. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak hanya dimonopoli oleh kalangan tertentu atau pengusaha kelas atas, namun sudah menjadi kebutuhan semua kalangan saat ini.

Namun demikian, menjadi hambatan bagi para pelaku bisnis yang belum mampu beradaptasi dan mengimplementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis nya. Hambatan secara teknis maupun hal lain menjadi tantangan bagi setiap pelaku bisnis disetiap level untuk tetap bertahan dalam kondisi pandemik.

Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat perlu menyadari kondisi real yang terjadi di masyarakat. Pemerintah perlu hadir dan memberikan terobosan dan bantuan agar dampak effect pandemik covid-19 di sektor ekonomi tidak terus berlanjuta dan semakin mempengaruhi secara negatif kehidupan masyarakat secara luas. Regulasi yang memudahkan dan membuka kesempatan yang luas dibutuhkan masyarakat. Secara umum dengan mewabahnya pandemic covid-19 di Sulawesi Utara maka sistem perekonomian yang di gambarkan pada PDRB juga mengalami penurunan. Di karenakan adanya pembatasan kegiatan perekonomian diantaranya ekspor. Dan berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini menjelaskan bahwa dimana pada masa sebelum mewabahnya pandemic covid-19 ekspor mampu memberikan pengaruh terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto yang ada di Sulawesi Utara, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofinawati, Lubis dan Nasution (2017) tentang Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Menurut teori yang dikemukakan oleh Sadono Sukirno, dalam buku yang berjudul "Makro Ekonomi Teori Pengantar" ekspor akan secara langsung mempengaruhi pendapatan nasional. Akan tetapi, hubungan yang sebaliknya tidak selalu berlaku, yaitu kenaikan pendapatan nasional belum tentu menaikkan ekspor oleh karena pendapatan nasional dapat mengalami kenaikan sebagai akibat dari kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah dan penggantian barang impor dengan barang buatan dalam negeri. Namun pada masa pandemic terjadi guncangan terhadap perekonomian di Sulawesi Utara sehingga berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor tidak memberikan pengaruh terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto yang ada di Sulawesi Utara. Didalam

meningkatkan kembali nilai ekspor guna menunjang perekonomian daerah, berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah dalam menstabilkan sistem perekonomian di Sulawesi Utara yakni dengan berusaha keras memutus mata rantai penyebaran covid-19 dengan menyarankan masyarakat untuk tetap mematuhi protikol kesehatan yang telah ditetapkan di selingi dengan upaya lain dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana tepat didalam memacu kembali peningkatan ekonomi di Sulawesi utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil uji statistic menunjukkan bahwa ekspor pada masa pandemic covid-19 mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan produk domestic regional bruto di Sulawesi Utara
2. Hasil Uji statistic pada masa pandemic covid-19 ekspor tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan produk domestic regional bruto.
3. Hasil penelitian menunjukkan nilai perbandingan dimana masa sebelum covid-19 dampak ekspor terhadap produk domestic regional bruto lebih besar di bandingkan dengan pencapaian pada masa covid-19.

Saran

1. Untuk Pemerintah

Pada masa pandemic maka disarankan untuk pemerintah agar lebih giat lagi megupayakan dan memberantas bahwa memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 salah satunya dengan memberikan bantuan masker secara gratis ke kalangan masyarakat, menyediakan obat-obatan yang dapat digunakan masyarakat dalam mengobati dan mencegah penyebaran virus covid dan yang paling penting berkaitan dengan penelitian ini pemerintah perlu adanya kebijakan-kebijakan terutama pada bidang perdagangan internasional dalam hal ini kegiatan ekspor dengan mendukung dan melaksanakan program-program dari pemerintah pusat Untuk mendukung kesehatan dan kehidupan masyarakat, diperlukan kelancaran aliran peralatan-peralatan medis, produk-produk penting pertanian, dan produk lainnya serta jasa-jasa lintas negara. Selain itu, diperlukan upaya konkret untuk menyelesaikan gangguan/disrupsi pada rantai pasokan global, melanjutkan kerjasama dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan mengkoordinasikan kebijakan sehingga menghindari campur tangan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Tindakan darurat untuk melindungi kesehatan masyarakat akan dilakukan secara proporsional, transparan, dan temporer. Serta mendukung perdagangan dan investasi dunia sebagai respon atas pandemi COVID-19. Rencana aksi tersebut dirancang untuk mengurangi dampak pandemi dalam jangka pendek, mendukung reformasi sistem perdagangan multilateral, membangun ketahanan dalam 4 rantai pasokan global, dan memperkuat investasi internasional dalam jangka panjang. Memberikan kontribusi dalam perdagangan dan investasi sebagai dasar yang kokoh bagi pemulihan ekonomi daerah berdasarkan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif disertai dengan terus memantau situasi dengan cermat serta menilai dampak pandemi pada perdagangan internasional

2. Untuk peneliti selanjutnya

Kiranya dapat memberikan kontibusi dan dapat di jadikan bahan acuan didalam meneliti masalah perekonomian seperti ekspor dan PDRB di masa pandemic covid-19

DAFTAR PUSTAKA

Agus Widarjono, 2013. Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya, Ekonosia, Jakarta.

Apridar, 2012. Ekonomi Internasional, Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan Dalam Aplikasinya. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adrian Sutendi, 2014. Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Jakarta, Penerbit Ghalia, 2009. Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta

Dewi*, A. A, & Ayu, A. S, 2015. Pengaruh Jumlah Produksi, Kurs Dollar Amerika Serikat Dan Luas Areal Lahan Terhadap Ekspor Karet Indonesia Tahun 1993-2013. E-Jurnal EP Unud, 4 [2]: 80 - 89.

Gennaioli dan Porta, 2013. Human capital and regional development. Quarterly Journal of economics. 128(1).

Karlita dan Yusuf Edi, 2013. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Ekspor Terhadap PDRB Sektor Industri di Kota Semarang Tahun 1993-2010. Jurnal Iesp. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro

Nofinawati, Lubis dan Nasution, 2017. Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara. <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/>

Subandi, 2014. Ekonomi Pembangunan, Bandung: Alfabeta

Todaro, M.P. 2008. Economic Development. Seventh Edition, New York, Addition Wesley Longman, Inc.



FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Pra Sugiarto Hadi Yunus¹, Anderson G. Kumenanug², Ita Pingkan F. Rorong³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email : atoxp0745@gmail.com, andersongkumenaung@unsrat.ac.id, itarorong@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kotamobagu Menggunakan data sekunder berupa realisasi pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta data Kemandirian Fiskal Kota Kotamobagu periode tahun 2018-2021. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda time series.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB_P2, BPHTB secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan diperoleh bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB_P2, BPHTB dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Kata kunci : Kemandirian Fiskal Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence regional fiscal independence. This research was conducted in the City of Kotamobagu Using secondary data in the form of realization of income from Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, Rural and Urban Land and Building Tax and Fees for Acquisition of Land and Building Rights as well as Kotamobagu City Fiscal Independence data for the period 2018-2021. The analytical method used is multiple time series regression.

Based on the results of the study, it was found that Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, PBB_P2, BPHTB jointly had a significant influence on Local Own Revenue and it was obtained that Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertisement Tax, PBB_P2, BPHTB and Local Own Revenue collectively have a significant influence on Regional Fiscal Independence.

Keywords: *Regional Fiscal Independence, Regional Original Revenue, Tax.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui kreativitas masyarakat dan menikmati hasil dari potensi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu dengan adanya otonomi daerah, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat berkurang, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dengan mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Kustianingsih, dkk., 2018).

Namun demikian, meskipun telah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah sendiri, nyatanya masih terdapat beberapa daerah yang belum bisa dikatakan sebagai daerah yang mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang merupakan gambaran kemampuan masing-masing daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah (PMK No. 120, 2020). Indeks Kapasitas Fiskal selalu mengalami perubahan setiap tahunnya sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Tabel 1
Total Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Kotamobagu
Tahun 2018-2021

Tahun	Indeks KFD	Kategori KFD
2018	0,39	Sangat Rendah
2019	0,36	Sangat Rendah
2020	0,44	Sangat Rendah
2021	0,51	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kota Kotamobagu berada pada angka 0,39, pada tahun 2019 berada pada angka 0,36, tahun 2020 sebesar 0,44, dan pada tahun 2021 adalah sebesar 0,51. Meskipun Indeks Kapasitas Fiskal Daerah periode 2018 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan sehingga kategori Indeks Kapasitas Daerah (KFD) masih berada pada kategori Sangat Rendah selama 4 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kotamobagu belum dapat dikatakan sebagai Kota dengan Kota yang mandiri.

Terdapat beberapa indikator dalam mengukur kemampuan finansial Pemerintah Daerah, salah satunya adalah dengan mengukur tingkat kemandirian keuangannya (Mbipi, dkk., 2020). Tingkat kemandirian adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya (Orocomna, dkk., 2017). Lestari, dkk. (2016) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 33, 2004).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah, diantaranya Prasetyo dan Rahayu (2019), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, penilitan juga dilakukan oleh Bella, dkk. (2022) yang mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja modal secara parsial dan secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sumatera Barat. Lebih lanjut lagi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Bukit (2022) menyatakan bahwa Pendapatan Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) melalui kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2019.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan masih banyaknya daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang belum dapat mencapai indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) dengan kategori Sangat Tinggi, menggambarkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri yang menyebabkan daerah tersebut masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kemandirian fiskal daerah. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini menggabungkan tujuh variabel dalam satu kerangka penelitian, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai variabel independen, kemandirian fiskal daerah sebagai variabel dependen serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel *intervening*.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah?
2. Apakah secara parsial Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB-P2 dan BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Apakah secara parsial pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB-P2 dan BPHTB secara langsung berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah
2. Untuk mengetahui apakah secara parsial Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB-P2 dan BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Untuk mengetahui apakah secara parsial pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB-P2 dan BPHTB secara langsung berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat secara teori mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal daerah, serta manfaat teori mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal daerah.

2. Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi instansi pemerintah daerah sebagai objek penelitian untuk menilai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah, sehingga dapat membantu instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Lebih lanjut lagi, dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global, untuk itu pemerintah diberikan hak dan kewenangan atas daerahnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi dilakukan dengan pelaksanaan penataan daerah yang ditunjukan dengan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah (UU No. 23 Tahun 2014).

Kemandirian Fiskal Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, keuangan daerah merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah (Sumardjoko, 2019). Kemampuan daerah yang

dimaksud adalah seberapa jauh kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangannya sendiri guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat daerah tanpa harus bergantung kepada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat (Rante, dkk., 2017).

Pendapatan Asli Daerah

Jejen (2022) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah keuangan daerah yang diperoleh dari potensi dan sumber daya yang digali dan dikelola di wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 1 (2022).

Baharuddin (2022) berpendapat bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berupaya memberdayakan sektor swasta untuk membiayai kegiatan pembangunan secara optimal. Upaya-upaya peningkatan PAD ini tidak lepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar kepala daerah dengan dewan perwakilan daerah. Potensi-potensi yang dimiliki masing-masing daerah yang telah dikelola dengan baik diharapkan dapat meningkatkan sumber keuangan dari pendapatan asli daerah. Jika sumber keuangan dapat dimanfaat dan dikelola dengan baik maka dapat memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah (Taras dan Artini, 2017).

Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontrobusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No. 28, 2009).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel
- b. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
- c. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
- d. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
- e. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan, baik sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Fiskal Daerah.

Kasih dan Sulistyowati (2022) , membuktikan bahwa Pajak Daerah dan retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilaksanakan di

kota Surabaya dengan variable dependen adalah Pendapatan Asli Daerah dan Variabel independent adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder dari Laporan realisasi Pendapatan dengan alat analisis Regresi Linear Berganda.

Ginting, dkk. (2019) dengan judul Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan menggunakan data kluster Kabupaten/Kota dari kluster I sampai dengan IV pada tahun 2013-2018 dengan metode analisis regresi panel data model menyatakan bahwa Variabel dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada Kabupaten/Kota di Kluster I, III, dan IV terhadap kemandirian keuangan daerah serta Variabel dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Musfirati dan Sugiyanto (2021), dengan menggunakan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan dana keistimewaan membuktikan bahwa Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan keistimewaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan analisis Regresi Linear Berganda. Penelitian ini berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Sauyai, dkk. (2022) , dengan judul penelitian Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun 2014 – 2019, memperoleh hasil penelitian bahwa Tingkat efektivitas pajak daerah Kota Sorong berada pada kriteria sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 109,77 persen; Tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Sorong berada pada kriteria kurang efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 60,88 persen; Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong dinilai cukup baik dengan rata-rata kontribusi sebesar 30,68 persen; dan Kontribusi dRetribusi aerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong dinilai kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,75 persen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis efektivitas dan kontribusi dengan menggunakan data sekunder berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Ramadhan (2019), dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara membuktikan bahwa Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Audited pada 33 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Dengan analisis regresi linear berganda, penelitian ini menggunakan variable dependen Pendapatan Asli daerah serta variable independent Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Bella, dkk. (2022), dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran pada 78 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan analisis regresi model data panel menemukan bahwa Variabel PAD dan belanja modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota se Sumatera Barat; Variabel DAU secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota se Sumatera Barat; dan Variabel PAD, DAU dan belanja modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota se Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan tingkat kemandirian keuangan sebagai variable dependen dan Variabel Independennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana alokasi umum serta Belanja modal.

Iqbal dan Sunardika (2018) , dengan judul penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung dengan variable dependen Pendapatan Asli Daerah dan variable independent Pajak dan retribusi Daerah menemukan bahwa Secara parsial pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD; Secara parsial retribusi daerah tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak dan retribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Bandung.

Mulyana dan Budianingsih (2019), membuktikan bahwa Secara simultan pajak hotel dan pajak restoran terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta Secara

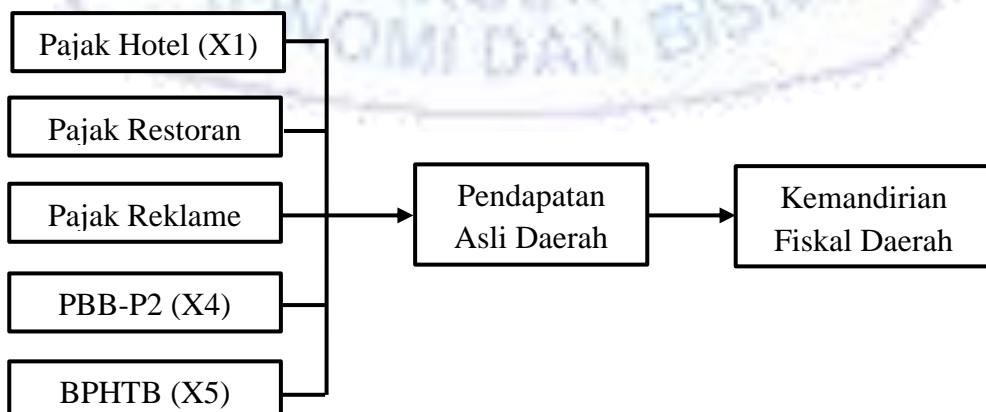
parsial pajak hotel dan pajak restoran terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini merupakan hasil penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variable dependen, Pajak hotel dan pajak restoran sebagai variable independent dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Biringkanae dan Tammu (2021), melalui penelitian berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja menggunakan metode kuantitatif dan alat analisis regresi linear berganda membuktikan bahwa Secara parsial pajak hotel dan pajak hiburan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Secara simultan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Samosir (2020) , menggunakan pendapatan asli daerah sebagai variable dependen dengan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sebagai variable independent, menemukan bahwa Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran dikategorikan kurang mempunyai kontribusi, sedangkan pajak hiburan dikategorikan relatif tidak mempunyai kontribusi; Hasil analisis efektivitas dapat menggambarkan kemampuan Pemda Kabupaten Sikka dalam merealisasikan pajak hotel dan restoran, sedangkan pajak hiburan menunjukkan ketidakmampuan Pemda Kabupaten Sikka dalam merealisasikan pajak hiburan; Secara simultan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan Secara parsial pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan analisis kontribusi dan efektivitas uji f dan uji t.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih banyak digunakan sebagai variabel independen ataupun variabel dependen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum pernah digunakan sebagai variabel *intervening*. Selain itu, belum terdapat penelitian yang menggunakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea hak atas perolehan tanah dan bangunan sebagai variabel independen. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tujuh variabel sekaligus yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai variabel independen kemudain Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel *intervening*, dan kemandirian fiskal daerah sebagai variabel dependen. Pada tahap pertama pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan akan diuji apakah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan diuji apakah berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah.

Kerangka Berpikir



Berdasarkan gambar di atas, penelitian ini akan menguji pengaruh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan selanjutnya akan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal daerah.

Pengembangan Hipotesis

H₁ : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah

H₂ : Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H₃ : Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

H₄ : pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H₅ : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

H₆ : BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada penafsiran angka-angka statistik dimana tujuan akhirnya adalah menguji teori, menguji pengaruh dan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik dan kemudian meramalkan hasilnya (Siregar, 2019).

Data dan Sumber Data

Objek penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2018 sampai dengan 2021.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk *time series* dimana data yang digunakan adalah data keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 sampai dengan 2021 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional atas variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak Hotel (X1) sebagai variabel independen adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan satuan yang digunakan adalah Rupiah (Rp);
2. Pajak Restoran (X2) sebagai variabel independen adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dengan satuan Rupiah (Rp);
3. Pajak Reklame (X3) sebagai variabel independen adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, dengan satuan yang digunakan adalah Rupiah (Rp);
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di singkat PBB-P2 (X4) sebagai variabel independen adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dengan satuan Rupiah (Rp);
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di singkat BPHTB (X5) sebagai variabel independen adalah pajak atas perolehan ha katas tanah dan/atau bangunan dengan satuan Rupiah (Rp);
6. Pendapatan Asli Daerah disingkat PAD sebagai variable intervening (Z) adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan satuan Rupiah (Rp); dan
7. Kemandirian Fiskal Daerah sebagai variable dependen adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperoleh daerah, dengan satuan Indeks.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisa Data adalah tahap yang tidak boleh dihindari dan wajib untuk diselesaikan dengan baik. Pada tahap ini kalian akan menentukan teknik analisis apa yang akan

kalian gunakan untuk mengolah data yang sudah kalian dapatkan dari lapangan. Biasanya pada tahap ini peneliti mulai mencari beberapa sumber referensi agar mereka tidak salah pilih. Hal tersebut sangatlah wajar karena hasil dari pengolahan data mereka akan menentukan kesimpulan yang akan mereka ambil atau menentukan kebenaran dari teori yang sedang mereka buktikan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid. Sebelum melakukan analisa regresi berganda dan pengujian hipotesis, maka harus melakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan linier yang baik. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J-B) Basuki dan Prawoto (2016) .

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Model regresi dinyatakan bebas multikolinieritas apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau $VIF \geq 0,10$ (Ghozali, 2018) .

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah objek yang diteliti mempunyai varian yang berbeda. Jika variance dari residual satu pengalaman ke pengalaman lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas (Ghozali, 2018) .

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah hubungan antara anggota seri dari observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (data time series) atau tempat (data cross section) (Gujarati, 2013) . Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Metode Analisis

Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data sekunder yang diperoleh diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Metode metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu metode pengolahan data dengan menggunakan teknik statistic, yang terdiri dari:

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018) . Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel indpenden dan variabel *intervening* yang terdiri pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal daerah sebagai variabel dependen. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + \beta_5.X_5 + e$$

Keterangan:

Y Kemandirian fiskal daerah
 α Konstanta

X1 Pajak Hotel
X2 Pajak Restoran

β	Koefisien Regresi	X3	Pajak Reklame
Z	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	X4	PBB-P2
e	Error terms	X5	BPHTB

Uji t

Menurut (Ghozali, 2018) , uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria uji statistik t adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 ($\leq 0,05$) maka hipotesis diterima.
- Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($> 0,05$) maka hipotesis ditolak.

Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05% (Ghozali, 2018). Kriteria uji F adalah jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengujian lebih kecil dari 0,05 ($< 0,05$), maka variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen (Siregar, 2019). Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur kekuatan model penelitian dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel amat terbatas. Sedangkan, nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

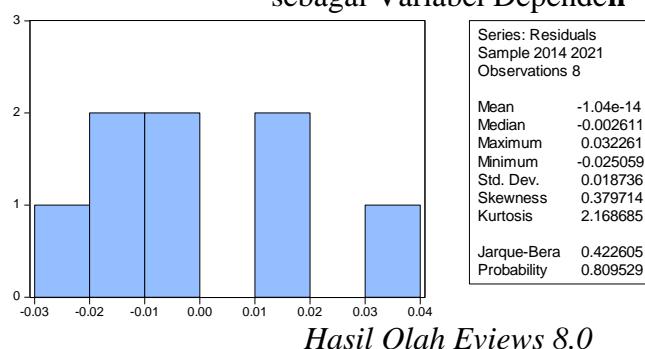
Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen dengan variabel dependen maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu periode 2018 sampai dengan 2021. Data sekunder tersebut diestimasikan dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) analisis regresi berganda dan diolah menggunakan program *Eviews 8.0*.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

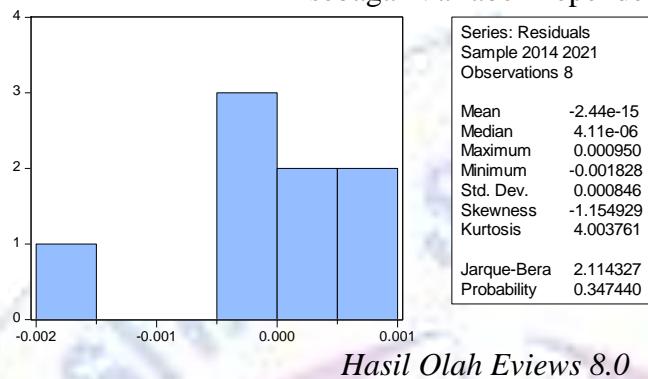
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J-B).

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas dengan Pendapatan Asli Daerah
sebagai Variabel Dependen



Hasil yang diperoleh dari uji normalitas dengan nilai Jarque-Bera (J-B) adalah nilai probabilitas sebesar $0,809529 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas dengan Kemandirian Fiskal Daerah
sebagai Variabel Dependen



Hasil Olah Eviews 8.0

Hasil yang diperoleh dari uji normalitas dengan nilai Jarque-Bera (J-B) adalah nilai probabilitas sebesar $0,34744 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan besarnya *tolerance value* dan besarnya *variance inflating factor* (VIF). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah nilai *tolerance* haruslah $\geq 0,10$ dan nilai VIF haruslah ≤ 10 .

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas dengan Pendapatan Asli Daerahb
sebagai Variabel Dependen

Variance Inflation Factors
Date: 12/30/22 Time: 12:25
Sample: 2014 2021
Included observations: 8

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	15.37857	10013.9	NA
PH_X1	0.145429	76629.69	1.379600
PRS_X2	0.372286	206012.6	1.852059
PRK_X3	0.510448	256926.1	3.793352
PBB_P2_X4	0.155166	92586.23	1.950472
BPHTB_X5	0.023647	12980.06	1.103714

Hasil Olah Eviews 8.0

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$, dan nilai VIF ≤ 10 . Kriteria tersebut telah terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas dengan Kemandirian Fiskal
sebagai Variabel Dependen

Variance Inflation Factors
Date: 12/30/22 Time: 17:23
Sample: 2014 2021
Included observations: 8

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.369782	590121.5	NA
PH_X1	0.001060	136831.0	2.463432
PRS_X2	0.012008	1628553.	1.464074
PRK_X3	0.004710	581065.7	8.579070
PBB_P2_X4	0.003612	528211.2	1.112758
BPHTB_X5	0.000106	14281.25	1.214356
PAD_Y1	0.002040	373777.7	1.138377

Hasil Olah Eviews 8.0

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$, dan nilai VIF ≤ 10 . Kriteria tersebut telah terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi dengan Kemandirian Fiskal sebagai variabel dependen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji gletser, dengan cara meregresikan semua variabel independen dengan nilai absolut residual (abs) sebagai variabel dependennya. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Pendapatan Asli Daerah
sebagai Variabel Dependen

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.384439	Prob. F(5,2)	0.4698
Obs*R-squared	6.206719	Prob. Chi-Square(5)	0.2866
Scaled explained SS	1.271802	Prob. Chi-Square(5)	0.9378

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 12/30/22 Time: 13:18

Sample: 2014 2021

Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.572391	1.013273	0.564893	0.6291
PH_X1	0.155390	0.098536	1.576998	0.2555
PRS_X2	-0.172761	0.157655	-1.095821	0.3875
PRK_X3	-0.120588	0.184605	-0.653223	0.5807
PBB_P2_X4	0.035188	0.101781	0.345722	0.7625
BPHTB_X5	0.039279	0.039734	0.988540	0.4271

Hasil Olah Eviews 8.0

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel independent yang digunakan secara berurutan yaitu 0.2555; 0.3875; 0.5807; 0.7625 dan 0.4271 yang artinya $> 0,05$. Hasil yang demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.

Tabel 7
 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Kemandirian Fiskal Daerah
 sebagai Variabel Dependen

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.813923	Prob. F(6,1)	0.6899
Obs*R-squared	6.640274	Prob. Chi-Square(6)	0.3554
Scaled explained SS	1.497711	Prob. Chi-Square(6)	0.9596

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 12/30/22 Time: 17:40

Sample: 2014 2021

Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.013193	0.203002	-0.064990	0.9587
PH_X1	-0.004085	0.010866	-0.375944	0.7711
PRS_X2	0.005275	0.036581	0.144208	0.9088
PRK_X3	0.008214	0.022911	0.358526	0.7808
PBB_P2_X4	-0.003031	0.020063	-0.151059	0.9046
BPHTB_X5	-0.002452	0.003440	-0.712844	0.6057
PAD_Y1	-0.001767	0.015078	-0.117191	0.9257

Hasil OlahEviews 8.0

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel independen yang digunakan secara berurutan yaitu 0.7711; 0.9088; 0.7808; 0.9046; 0.6057 dan 0.9257 yang artinya > 0.05 . Hasil yang demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dengan Kemandirian Fiskal Daerah sebagai variabel dependen.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah hubungan antara anggota seri dari observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (data time series) atau tempat (data cross section) (Gujarati, 2013). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ berarti terjadi autokorelasi.

Tabel 8
Hasil Uji Autokorelasi dengan Pendapatan Asli Daerah
sebagai Variabel Dependen

Dependent Variable: PAD_Y1

Method: Least Squares

Date: 12/30/22 Time: 13:25

Sample: 2014 2021

Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.26803	3.921552	-3.128361	0.0888
PH_X1	0.478018	0.381351	1.253486	0.3367
PRS_X2	2.267457	0.610153	3.716212	0.0654
PRK_X3	1.134887	0.714456	1.588463	0.2531
PBB_P2_X4	-1.208360	0.393911	-3.067596	0.0919
BPHTB_X5	-0.068856	0.153777	-0.447761	0.6982
R-squared	0.991216	Mean dependent var		10.71329
Adjusted R-squared	0.969254	S.D. dependent var		0.199904
S.E. of regression	0.035052	Akaike info criterion		-3.750265
Sum squared resid	0.002457	Schwarz criterion		-3.690684
Log likelihood	21.00106	Hannan-Quinn criter.		-4.152116
F-statistic	45.13508	Durbin-Watson stat		1.714159
Prob(F-statistic)	0.021817			

Hasil Olah Eviews 8.0

Hasil uji autokorelasi dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen menggunakan uji Durbin Waston (DW). Model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi baik positif maupun negatif, jika nilai $-2 < DW < 2$, maka Pendapatan asli daerah sebagai Variabel Dependen terbebas uji autokolerasi.

Tabel 9
Hasil Uji Autokorelasi dengan Kemandirian Fiskal Daerah
sebagai Variabel Dependen

Dependent Variable: KFD_Y2

Method: Least Squares

Date: 12/30/22 Time: 17:50

Sample: 2014 2021

Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.683537	0.608097	6.057480	0.1042
PH_X1	-2.407933	0.032550	-73.97600	0.0086
PRS_X2	-0.383957	0.109579	-3.503922	0.1770
PRK_X3	2.632722	0.068631	38.36063	0.0166
PBB_P2_X4	0.059439	0.060099	0.989019	0.5035
BPHTB_X5	-0.860252	0.010303	-83.49373	0.0076
PAD_Y1	0.510757	0.045167	11.30821	0.0562
R-squared	0.999984	Mean dependent var		-0.223946
Adjusted R-squared	0.999980	S.D. dependent var		0.213259
S.E. of regression	0.002239	Akaike info criterion		-9.695047
Sum squared resid	5.01E-06	Schwarz criterion		-9.625536
Log likelihood	45.78019	Hannan-Quinn criter.		-10.16387
F-statistic	10584.22	Durbin-Watson stat		1.182436
Prob(F-statistic)	0.007440			

Hasil Olah Eviews 8.0

Hasil uji autokorelasi dengan Kemandirian Fiskal Daerah sebagai Variabel Dependen menggunakan uji durbin waston (DW). Model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi baik positif maupun negatif, jika nilai $-2 < DW < 2$, maka Kemandirian Fiskal Daerah sebagai Variabel Dependen terbebas uji autokolerasi

Hasil Analisis Regresi

Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen dengan variabel dependen maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2014 sampai dengan 2021. Data sekunder tersebut diestimasikan dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) analisis regresi berganda sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program *Eviews 8.0*.

Persamaan Regresi

Hasil analisis jalur dengan menggunakan Eviews 8.0 melalui dua tahap persamaan regresi. Persamaan yang pertama dalam analisis jalur yaitu pengaruh Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4) dan BPHTB (X5) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X1 + \beta_2.X2 + \beta_3.X3 + \beta_4.X4 + \beta_5.X5 + e1$$

$$PAD = C + PH.X1 + PRS.X2 + PRK.X3 + PBB.X4 + BPHTB.X5 + e1$$

Tabel 10
Hasil Uji Regresi Linear Berganda dengan Pendapatan Asli Daerah
sebagai Variabel Dependen

Dependent Variable: PAD_Y1

Method: Least Squares

Date: 12/30/22 Time: 12:19

Sample: 2014 2021

Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.26803	3.921552	-3.128361	0.0888
PH_X1	0.478018	0.381351	1.253486	0.3367
PRS_X2	2.267457	0.610153	3.716212	0.0654
PRK_X3	1.134887	0.714456	1.588463	0.2531
PBB_P2_X4	-1.208360	0.393911	-3.067596	0.0919
BPHTB_X5	-0.068856	0.153777	-0.447761	0.6982
R-squared	0.991216	Mean dependent var	10.71329	
Adjusted R-squared	0.969254	S.D. dependent var	0.199904	
S.E. of regression	0.035052	Akaike info criterion	-3.750265	
Sum squared resid	0.002457	Schwarz criterion	-3.690684	
Log likelihood	21.00106	Hannan-Quinn criter.	-4.152116	
F-statistic	45.13508	Durbin-Watson stat	1.714159	
Prob(F-statistic)	0.021817			

Hasil Olah Eviews 8.0

Persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan Tabel 10 adalah :

$$PAD_Y1 = C + PH_X1 + PRS_X2 + PRK_X3 + PBBP2_X4 + BPHTB_X5 + e1$$

$$PAD_Y1 = -12,26803 + ,4780 PH + 2,2675 PRS + 1,1349 PRK - 1,2084 PBBP2 -0.0689 BPHTB + e1$$

$$\text{Nilai } e1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.991} = \sqrt{0,009} = 0,095$$

Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PAD = -12,26803 + 0,4780 PH + 2,2675 PRS + 1,1349 PRK - 1,2084 PBBP2 -0.0689 BPHTB + 0,095$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi analisis jalur pada tabel *coefficients* di atas menunjukkan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar - 12,26803 menunjukkan bahwa apabila variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4) dan BPHTB (X5) nilainya 0 (nol), maka nilai Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar - 12,26803.

2. Koefisien regresi Pajak Hotel (X1) sebesar 0,4780 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel Pajak Hotel sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,4780 dengan catatan variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi Pajak Restoran (X2) sebesar 2,2675 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel Pajak Restoran sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,2675 dengan catatan variabel lain tetap.
4. Koefisien regresi Pajak Reklame (X3) sebesar 1,1349 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel Pajak Reklame sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,1349 dengan catatan variabel lain tetap.
5. Koefisien regresi PBBP2 (X4) sebesar -1,2084 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel PBBP2 sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -1,2084 dengan catatan variabel lain tetap.
6. Koefisien regresi BPHTB (X5) sebesar -0.0689 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel BPHTB sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -0.0689 dengan catatan variabel lain tetap.
7. Nilai residual (*error*) variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4) dan BPHTB (X5) terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,095 atau 9,5 %. Nilai tersebut merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Persamaan regresi kedua dalam analisis jalur ini adalah Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal daerah (KFD). Persamaan regresi ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + \beta_5.X_5 + \beta_6.Z + e_2$$

$$KFD = C + PH.X_1 + PRS.X_2 + PRK.X_3 + PBB.X_4 + BPHTB.X_5 + PAD.Z + e_2$$

Tabel 11
Hasil Uji Regresi Linear Berganda dengan Kemandirian Fiskal Daerah
sebagai Variabel Dependen

Dependent Variable: KFD_Y2

Method: Least Squares

Date: 12/30/22 Time: 18:00

Sample: 2014 2021

Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.683537	0.608097	6.057480	0.1042
PH_X1	-2.407933	0.032550	-73.97600	0.0086
PRS_X2	-0.383957	0.109579	-3.503922	0.1770
PRK_X3	2.632722	0.068631	38.36063	0.0166
PBB_P2_X4	0.059439	0.060099	0.989019	0.5035
BPHTB_X5	-0.860252	0.010303	-83.49373	0.0076
PAD_Y1	0.510757	0.045167	11.30821	0.0562
R-squared	0.999984	Mean dependent var	-0.223946	
Adjusted R-squared	0.999890	S.D. dependent var	0.213259	
S.E. of regression	0.002239	Akaike info criterion	-9.695047	
Sum squared resid	5.01E-06	Schwarz criterion	-9.625536	
Log likelihood	45.78019	Hannan-Quinn criter.	-10.16387	
F-statistic	10584.22	Durbin-Watson stat	1.182436	
Prob(F-statistic)	0.007440			

Hasil Olah Eviews 8.0

Persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan Tabel 11 adalah:

$$KFD_Y2 = C + PH_X1 + PRS_X2 + PRK_X3 + PBB_P2_X4 + BPHTB_X5 + PAD_Z + e2$$

$$KFD = 3.6835 - 2.4079 PH - 0.3839 PRS + 2.6327 PRK + 0.0594 PBB_P2 - 0.8603 BPHTB + 0.5108 PAD + e2$$

$$\text{Nilai } e2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.999} = \sqrt{0,001} = 0,032$$

Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$KFD = 3.6835 - 2.4079 PH - 0.3839 PRS + 2.6327 PRK + 0.0594 PBB_P2 - 0.8603 BPHTB + 0.5108 PAD + 0,032$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi analisis jalur pada tabel *coefficients* di atas menunjukkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 3.6835 menunjukkan bahwa apabila variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5), dan pendapatan asli daerah (PAD) nilainya 0 (nol), maka nilai Kemandirian Fiskal Daerah adalah sebesar 3.6835.
2. Koefisien regresi Pajak Hotel (X1) sebesar - 2.4079 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel Pajak Hotel sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Kemandirian Fiskal Daerah sebesar - 2.4079 dengan catatan variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi Pajak Restoran (X2) sebesar - 0.3839 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel Pajak Restoran sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Kemandirian Fiskal Daerah sebesar - 0.3839 dengan catatan variabel lain tetap.
4. Koefisien regresi Pajak Reklame (X3) sebesar 2.6327 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel Pajak Reklame sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Kemandirian Fiskal Daerah sebesar 2.6327 dengan catatan variabel lain tetap.
5. Koefisien regresi PBB_P2 (X4) sebesar 0.0594 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel PBB_P2 sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Kemandirian Fiskal Daerah sebesar 0.0594 dengan catatan variabel lain tetap.
6. Koefisien regresi BPHTB (X5) sebesar - 0.8603 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel BPHTB sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Kemandirian Fiskal Daerah sebesar - 0.8603 dengan catatan variabel lain tetap.
7. Koefisien regresi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0.5108 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel pendapatan asli daerah (PAD) sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Kemandirian Fiskal Daerah sebesar 0.5108 dengan catatan variabel lain tetap.
8. Nilai residual (*error*) variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5), dan
9. pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Kemandirian Fiskal Daerah (KFD) sebesar 0,032 atau 3,2 %. Nilai tersebut merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Tabel 12

Hasil Uji t dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

Dependent Variable: PAD_Y1
 Method: Least Squares
 Date: 12/30/22 Time: 12:19
 Sample: 2014 2021
 Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.26803	3.921552	-3.128361	0.0888
PH_X1	0.478018	0.381351	1.253486	0.3367
PRS_X2	2.267457	0.610153	3.716212	0.0654
PRK_X3	1.134887	0.714456	1.588463	0.2531
PBB_P2_X4	-1.208360	0.393911	-3.067596	0.0919
BPHTB_X5	-0.068856	0.153777	-0.447761	0.6982

Hasil Olah Eviews 8.0

Berdasarkan Tabel 12 hasil analisis statistik pada variabel Pajak Hotel diperoleh nilai $t_{statistik} = 1,253486$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($1,253486 < 2,9200$), berarti H1 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Tabel hasil analisis statistik pada variabel Pajak Restoran diperoleh nilai $t_{statistik} = 3.716212$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} > t_{tabel}$ ($3.716212 > 2,9200$), berarti H2 diterima. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Restoran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Tabel hasil analisis statistik pada variabel Pajak Pajak Reklame diperoleh nilai $t_{statistik} = 1.588463$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($1.588463 < 2,9200$), berarti H3 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Reklame secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Tabel hasil analisis statistik pada variabel PBB_P2 diperoleh nilai $t_{statistik} = -3.067596$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ %, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($-3.067596 < 2,9200$), berarti H4 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel PBB_P2 secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Tabel hasil analisis statistik pada variabel BPHTB diperoleh nilai $t_{statistik} = -0.447761$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ %, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($-0.447761 < 2,9200$), berarti H5 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel BPHTB secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD.

Tabel 13

Hasil Uji t dengan Kemandirian Fiskal Daerah
sebagai Variabel Dependen

Dependent Variable: KFD_Y2

Method: Least Squares

Date: 12/30/22 Time: 18:00

Sample: 2014 2021

Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.683537	0.608097	6.057480	0.1042
PH_X1	-2.407933	0.032550	-73.97600	0.0086
PRS_X2	-0.383957	0.109579	-3.503922	0.1770
PRK_X3	2.632722	0.068631	38.36063	0.0166
PBB_P2_X4	0.059439	0.060099	0.989019	0.5035
BPHTB_X5	-0.860252	0.010303	-83.49373	0.0076
PAD_Y1	0.510757	0.045167	11.30821	0.0562

Hasil Olah Eviews 8.0

Berdasarkan Tabel 13 hasil analisis statistik pada variabel Pajak Hotel diperoleh nilai $t_{statistik} = -73.976$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 6,3138. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($-73.976 < 6,3138$), berarti H1 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Berdasarkan Tabel 13 hasil analisis statistik pada variabel Pajak Restoran diperoleh nilai $t_{statistik} = -3.503922$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 6,3138. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($-3.503922 < 6,3138$), berarti H2 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Restoran secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Berdasarkan Tabel hasil analisis statistik pada variabel Pajak Reklame diperoleh nilai $t_{statistik} = 38.36063$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 6,3138. Nilai Absolut $t_{statistik} > t_{tabel}$ ($38.36063 > 6,3138$), berarti H3 diterima. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Reklame secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Berdasarkan Tabel 13 hasil analisis statistik pada variabel PBB_P2 diperoleh nilai $t_{statistik} = 0.989019$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 6,3138. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($0.989019 < 6,3138$), berarti H4 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel PBB_P2 secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Berdasarkan Tabel 13 hasil analisis statistik pada variabel BPHTB diperoleh nilai $t_{statistik} = -83.49373$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 6,3138. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($-83.49373 < 6,3138$), berarti H5 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel BPHTB secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Berdasarkan Tabel 13 hasil analisis statistik pada variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai $t_{statistik} = 11.30821$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 6,3138. Nilai Absolut $t_{statistik} > t_{tabel}$ ($11.30821 > 6,3138$), berarti H6 diterima. Menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 13 dapat dijelaskan pengaruh variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5), secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Nilai F-statistik yang diperoleh 45.13508 sedangkan F-tabel 19.30. Nilai F table berdasarkan besarnya $\alpha 5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator ($k-1/6-1$) = 5 dan df untuk denominator ($n-k/8-6$) = 2. Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2

(X4), BPHTB (X5) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel dapat dijelaskan pengaruh variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5) dan Pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Nilai F-statistik yang diperoleh 10584.22 sedangkan F-tabel 234. Nilai F table berdasarkan besarnya α 5% dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/7-1) = 6$ dan df untuk denominator $(n-k/8-7) = 1$. Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5) dan Pendapatan asli daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Koefisien Determinan (R^2)

Uji ini digunakan untuk melihat kemampuan model yang terdiri Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5) dalam menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah. serta Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5) dan Pendapatan Asli Daerah dalam menjelaskan variasi Kemandirian fiskal daerah. Apabila Koefisien Determinasi R^2 tinggi (mendekati angka 1 menunjukkan kemampuan model sangat baik. Sebaliknya apabila Koefisien Determinasi R^2 sangat rendah atau jauh dari angka 1 maka kemampuan R^2 dianggap rendah, dimana R^2 bergerak dari 0 hingga 1. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Kuncoro,2003;220).

Berdasarkan pengujian data dengan Eviews, maka diperoleh data besarnya R^2 atau koefisien determinasi adalah sebesar 0.991216. Hal tersebut berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0.991216 dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Sedangkan pada data besarnya R^2 atau koefisien determinasi sebesar 0.999984. Hal tersebut berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0.999984 dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian sebagaimana telah diungkapkan di atas telah memberikan bukti empiris bahwa model penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah baik dan dapat diterima. Demikian juga hasil pengujian hipotesis penelitian dalam penelitian ini telah diperoleh hasilnya secara keseluruhan. Berikut adalah pembahasan hasil penelitian dan temuan penelitian yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini.

Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah. Pada hasil perhitungan statistika menunjukkan bahwa hasil analisis pada variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai $t_{statistik} = 11.30821$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 6,3138. Nilai Absolut $t_{statistik} > t_{tabel}$ ($11.30821 > 6,3138$), berarti H6 diterima. Menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Hal ini berarti semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Kotamobagu, begitu pula sebaliknya semakin kecil pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin kecil pula tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan sejalan dengan penelitian yang dilakukan R. Neneng Rina Andriani, Nisa Noor Wahid (2018, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015. Hal ini sama halnya Penelitian yang dilakukan oleh Reza Marizka (2013, bahwa hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah telah diterima. Pada hasil perhitungan statistika menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel diperoleh nilai $t_{statistik} = 1,253486$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($1,253486 < 2,9200$), berarti H1 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Wulandari dan Kartika (2021), Rizqiyah (2013), dan Asriyawati (2014) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Suwendra dan Fridayana Yudiatmaja (2014), Filomena Lumur dan Putu Diah Asrida (2020), Siska Willy (2020), dan Rochana dan Mardianto (2020) yang menemukan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah telah diterima. Pada hasil perhitungan statistika menunjukkan bahwa variabel Pajak Restoran diperoleh nilai $t_{statistik} = 3,716212$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} > t_{tabel}$ ($3,716212 > 2,9200$), berarti H2 diterima. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Restoran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suartini dan Utaa (2012), Rizqiyah (2013), Asriyawati (2014), serta Fikri dan Mardani (2017), yang menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena semakin banyak restoran yang dibangun maka semakin besar bisnis restoran yang berkembang. Dengan demikian pajak restoran terhadap pendapatan daerah juga meningkat.

Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan pajak Reklame berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah telah diterima. Pada hasil perhitungan statistika menunjukkan bahwa variabel Pajak Reklame diperoleh nilai $t_{statistik} = 1,588463$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($1,588463 < 2,9200$), berarti H3 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Reklame secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Somantri (2022) Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya pajak reklame belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang diakukan oleh Iis Anisa Yulia (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak reklame jika dikelolah dengan baik akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah. Namun persentase kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli daerah masih tergolong rendah. Hal tersebut karena belum maksimalnya pemungutan pajak sehingga belum memberikan hasil yang signifikan juga disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menaati pajak.

Pengaruh Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapantan Asli Daerah

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan PBB_P2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah telah diterima. Pada hasil perhitungan statistika menunjukkan bahwa variabel PBB_P2 diperoleh nilai $t_{statistik} = -3,067596$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ %, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($-3,067596 < 2,9200$), berarti H4 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel PBB_P2 secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendri Saputra (2022), bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Pekanbaru tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswandi (2020), yang mendapatkan hasil bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare. Hasil yang sama juga diperoleh Setiawati (2021), yang mendapatkan hasil bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rossela Nur Dukalang (2020) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo.

Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah telah diterima. Pada hasil perhitungan statistika menunjukkan bahwa variabel BPHTB diperoleh nilai $t_{statistik} = -0,447761$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($-0,447761 < 2,9200$), berarti H_5 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel BPHTB secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal tersebut dipengaruhi adanya wajib pajak yang memanipulasi pembayaran pajak untuk menghindari tarif pajak yang tinggi atau masih adanya wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak tersebut. Kemudian juga bisa disebabkan kurangnya pembangunan property dan kurangnya minat masyarakat untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang tentunya akan berdampak bagi besarnya BPHTB yang sejalan dengan meningkatnya penerimaan PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2020), bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. Lain halnya penelitian ini yang dilakukan oleh Meliyana dan Efendi bahwa BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Batam. Hal ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Alfatarisya (2022), bahwa hasil penelitian ini menunjukkan variabel BPHTB berpengaruh signifikansi terhadap PAD Kabupaten Tangerang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah;
2. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB_P2, BPHTB secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB_P2, BPHTB dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.
4. Secara parsial, Pajak Hotel, Pajak Reklame, PBB_P2 dan BPHTB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Secara parsial, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak reklame, PBB_P2 dan BPHTB tidak berpengaruh positif terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Saran

1. Bagi Pemerintah hendaknya lebih baik lagi dengan intensifikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepatuhan membayar pajak, sentralisasi program aplikasi perpajakan, dan peningkatan koordinasi terkait efisiensi administrasi. Selanjutnya ekstensifikasi melalui penambahan wajib pajak baru seperti pendataan potensi

masyarakat khususnya para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah, untuk itu dilakukan pengawasan dan pembinaan sampai dapat menjadi wajib pajak.

2. Bagi masyarakat sebagai wajib pajak agar meningkatkan kesadaran dalam menjalankan hak dan kewajiban pajak agar penerimanya semakin meningkat. Sehingga dari penerimaan tersebut digunakan untuk kemandirian daerah dan kesejahteraan bersama.
3. Bagi peneliti selanjutnya perlu menambah atau mengganti variabel-variabel bebas pada penelitian ini dengan variabel-variabel lain yang memungkinkan relevan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Fiskal Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Azis, R. F., dan Husna, N. (2021). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018-2020. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 9(03), 241.

Baharuddin, D. (2022). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 131–145.

Bella, S., Sari, F., dan Aswin, U. R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformstion*, 3(5).

Biringkanae, A., dan Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Public Administration Journal*, 4(1), 19–25.

Bukit, P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 325–334.

Christia, A. M., dan Ispriyarno, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.

Dick-Sagoe, C. (2020). Decentralization for Improving the Provision of Public Services in Developing Countries: A Critical Review. *Cogent Economics and Finance*, 8(1).

Ghozali, I. H. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Sembilan). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., dan Sofilda, E. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perpendidaraan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105–127.

Hardiana, R. D., Tanuatmodjo, H., dan Kurniati, F. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 197–210.

Iqbal, M., dan Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 10–35.

Jejen, L. (2022). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Politeknik Baubau*, 1(1), 36–42.

Kasih, M. W. R., dan Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11869–11876.

Kustianingsih, N., Muslimin, dan Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6), 82–91.

Lestari, A., Dali, N., dan Abdullah, M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal*

Progres Ekonomi Pembangunan, 1(2), 44–55.

Mbipi, S. D., Assih, P., dan Sumtaky, M. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 152–158.

Mulyana, A., dan Budianingsih, R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1371–1382.

Musfirati, A., dan Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36.

Orocomna, M., Bharanti, B. E., dan Layuk, P. K. A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. *Jurnal Kedua*, 2(3).

Pamungkas, S. (2018). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 46–56.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.07/2020 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A.

Prasetyo, A., dan Rahayu, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Fiscal Stress Terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 872–881.

Rahman, F. A. (2017). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dikota Makasar. *Jurnal Economix*, 5(2), 104–115.

Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 81–87.

Rante, A., Mire, M. S., dan Paminto, A. (2017). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. *INOVASI*, 13(2), 78–89.

Samosir, M. S. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 35–43.

Sauyai, A., Rotinsulu, D. C., dan Tolosang, K. D. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun 2014-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(1), 131–143.

Sihombing, H., dan Tambunan, B. H. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economics and Business*, 01(02), 65–75.

Siregar, S. (2019). *Statistik Parameter Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17* (F. Hutari (Ed.); Satu). Bumi Askara.

Sumardjoko, I. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Wilayah Kepulauan dan Implikasinya Terhadap Perubahan Fundamental Ekonomi Regional. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 5(5), 1–23.

Taras, T., dan Artini, L. G. S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360–2387.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Widodo, I. (2017). Dana Desa dan Demokrasi Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 65–85.



ANALISA PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO

Iwan Susanto, Agnes L.Ch. P. Lapian, Mauna Th. B. Maramis

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: iwan.susanto007@gmail.com, agneslapian@unsrat.ac.id, maunamaramis@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan lelang (laku/ tidak laku) untuk objek lelang property riil yang berasal dari lelang eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Manado. Penelitian ini dilakukan karena masih rendahnya tingkat keberhasilan lelang eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Manado, yaitu sekitar 10% - 13%. Adanya keberhasilan pelaksanaan lelang, akan meningkatkan pengembalian kepada negara yang berasal dari hasil penjualan lelang serta penerimaan negara dalam bentuk bea lelang, pajak penghasilan yang berasal dari pasal 25 dan BPHTB. Data pendukung penelitian berupa laporan risalah lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL Manado. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, faktor lokasi, aksesibilitas, penyelenggaran pra lelang dan cara penawaran lelang secara bersama – sama berpengaruh terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado. Sedangkan secara parsial, aksesibilitas dan cara penawaran lelang berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif dengan keberhasilan lelang.

Kata kunci: keberhasilan pelaksanaan lelang eksekusi hak, properti riil, hasil lelang, lokasi, aksesibilitas, penyelenggaran pra lelang dan cara penawaran lelang

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the success of auction implementation (sellable / unsellable) for real property auction objects derived from Mortgage execution auctions at KPKNL Manado. This research was conducted because of the low success rate of the Mortgage Rights execution auction at KPKNL Manado, which is around 10% - 13%. Successful implementation of the auction, it will increase the return to the state derived from the proceeds of the auction sale as well as state revenue in the form of auction fees, income tax derived from article 25 and BPHTB. The supporting data of the research is the report of the minutes of the auction of the execution of mortgage rights at KPKNL Manado. The analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that simultaneously the factors of location, accessibility, pre-auction organizing and auction bidding methods jointly influenced the success of the auction at KPKNL Manado. Meanwhile, partially, accessibility and method of auction bidding have a significant effect and have a positive relationship with auction success.

Keywords : successful implementation of auction execution of mortgage rights, real property, auction results, location, accessibility, pre-auction organizing and auction bidding methods.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, perlu menggalakan kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang secara tidak langsung akan mendukung pembangunan ekonomi. Salah satu komponen yang mendukung pembangunan ekonomi adalah kontribusi para pelaku usaha dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi selain didukung dengan strategi pasar yang bagus, perlu didukung juga dengan kemampuan keuangan yang kuat untuk menjalankan kegiatan usaha. Sumber keuangan para pelaku usaha berasal dari modal sendiri maupun pembiayaan dari lembaga keuangan. Bentuk pembiayaan dari lembaga keuangan dapat berupa pembiayaan modal

kerja atau pembiayaan investasi. Sesuai dengan Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.03/2018 Tahun 2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, proses pemberian fasilitas pinjaman kredit oleh perbankan kepada pelaku usaha dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) melalui analisis mendalam terhadap usaha, karakter dan termasuk objek jaminan yang diberikan.

Sekitar bulan Maret tahun 2020, *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)* mulai masuk ke Indonesia dan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain memberikan dampak secara langsung terhadap kesehatan dengan timbulnya korban jiwa berupa kematian, dampak pandemi ini secara tidak langsung turut mempengaruhi sektor perekonomian. Adanya penurunan kegiatan perekonomian tersebut, secara tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan pengembalian fasilitas pinjaman kredit dari pelaku usaha yang sebagian modalnya berasal dari pembiayaan perbankan. Beberapa diantaranya mengalami kesulitan sehingga masuk dalam kriteria wanprestasi/gagal bayar. Perbankan telah melakukan langkah-langkah mitigasi risiko terhadap pengembalian dana pihak ketiga yang macet dalam pemberian fasilitas pinjaman kredit berupa restrukturisasi kredit maupun penjualan objek jaminan kredit melalui lelang. Apabila restrukturisasi tidak dapat dilakukan maka kreditor akan menempuh penjualan objek jaminan kredit melalui lelang.

Lelang sebagai salah satu instrumen dalam penjualan di pasar mempunyai fungsi privat dan fungsi publik. Salah satu fungsi publik lelang adalah untuk mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk Bea Lelang dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pemerintah daerah. BPHTB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam APBD Sulut, penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2018, realisasi penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp1.052.296.155.000,00. Sedangkan untuk tahun 2019, realisasi penerimaan sebesar Rp1.050.089.444.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 898.701.050.000,00. Dalam realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara, KPKNL Manado turut memiliki kontribusi melalui penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dipungut dari hasil penjualan objek lelang. Berdasarkan data pelaksanaan lelang KPKNL Manado (diolah), realisasi penerimaan BPHTB dari penjualan objek lelang sebesar Rp1.240.718.660,00 di tahun 2018, Rp1.914.782.975,00 di tahun 2019 dan Rp1.579.236.081,00 di tahun 2020.

Pelaksanaan lelang eksekusi harus dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL merupakan institusi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Manado merupakan kantor pelayanan di bidang lelang di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2020, total pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan sebanyak 1.789 frekuensi dengan frekuensi laku sebanyak 192 frekuensi atau hanya sekitar 10,73%.

Rumusan Masalah

Rendahnya jumlah lelang yang berhasil (laku) menimbulkan masalah penelitian yang menarik untuk dikaji yang dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah pengaruh lokasi obyek properti riil yang terletak dekat dengan pusat wilayah kegiatan usaha/ *Central Business District (CBD)* terhadap keberhasilan lelang, bagaimana pengaruh aksesibilitas berupa lebar jalan menuju lokasi properti riil terhadap keberhasilan lelang, bagaimana pengaruh penyelenggara pralelang oleh balai lelang terhadap keberhasilan lelang, bagaimana pengaruh cara penawaran lelang melalui internet terhadap keberhasilan lelang, bagaimanakah pengaruh secara simultan lokasi obyek properti riil yang terletak dekat dengan CBD, aksesibilitas berupa lebar jalan menuju lokasi properti riil, penyelenggara pralelang oleh balai lelang dan cara penawaran lelang melalui internet terhadap keberhasilan lelang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil lelang eksekusi sesuai pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pada KPKNL Manado.

Manfaat Penelitian :

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dominan mempengaruhi hasil lelang properti riil eksekusi hak tanggungan di KPKNL Manado;
2. Untuk menjadikan masukan pihak yang terkait dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan (kreditor/bank, balai lelang, KPKNL) dalam rangka meningkatkan keberhasilan lelang eksekusi hak tanggungan;
3. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama mengenai alternatif transaksi jual beli properti riil;
4. Untuk memberikan gambaran bagi masyarakat luas mengenai penjualan properti riil jaminan hutang melalui mekanisme lelang eksekusi hak tanggungan.

Tinjauan Pustaka**Teori Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Untuk mencapai peningkatan pembangunan ekonomi, senantiasa dibutuhkan inovasi-inovasi, inisiatif, kreativitas dan sikap kritis dari masyarakat/ pelaku usaha sehingga arah kebijakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan secara tepat dan akurat. Berdasarkan sudut pandang ekonomi, pembangunan dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan pengertian tersebut, untuk mencapai peningkatan pembangunan ekonomi perlu adanya sinergi antara pemerintah selaku regulator dan masyarakat selaku pelaku dalam kegiatan pembangunan. Adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, maka tercipta sebuah kesejahteraan bagi masyarakat yang dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk. (Todaro & Smith, 2011: 209). Pembangunan wilayah (*regional*) merupakan fungsi potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu dengan yang lain. (Adisasmita, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Halim (2012) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teori Properti

Terdapat perbedaan pengertian antara real estat dan properti riil. Sesuai Standar Penilaian Indonesia 2007 (KPUP butir 3.1), real estat adalah benda fisik berwujud yang dapat dilihat dan disentuh, bersama-sama dengan segala sesuatu yang didirikan pada tanah yang bersangkutan, di atas atau di bawah tanah. Properti riil merupakan penguasaan yuridis atas tanah yang mencakup semua hak atas tanah, semua kepentingan, dan manfaat, yang berkaitan dengan kepemilikan real estat.

Sesuai definisi di atas, barang atau hak (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai) yang menjadi obyek hak tanggungan termasuk dalam pengertian properti riil. Obyek hak tanggungan yang diharapkan laku terjual lelang tentunya mempunyai nilai. Nilai adalah konsep ekonomi yang merujuk kepada harga yang sangat mungkin disepakati oleh pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa yang tersedia untuk dibeli (SPI 2007:KPUP butir 4.5).

Faktor utama berkaitan dengan nilai ekonomi meliputi *demand, utility, scarcity, transferability* (Eldred, 1987: 4). *Demand* merupakan seseorang yang mau dan mampu untuk

membeli, menyewa suatu obyek properti. *Utility* adalah manfaat yang dapat dihasilkan oleh obyek properti untuk memuaskan *demand*. *Scarcity* menunjukkan kuantitas dan kualitas properti lain yang bersaing dengan obyek properti. *Transferability* adalah suatu proses peralihan hak properti melalui penjualan atau berbagai kontrak perjanjian.

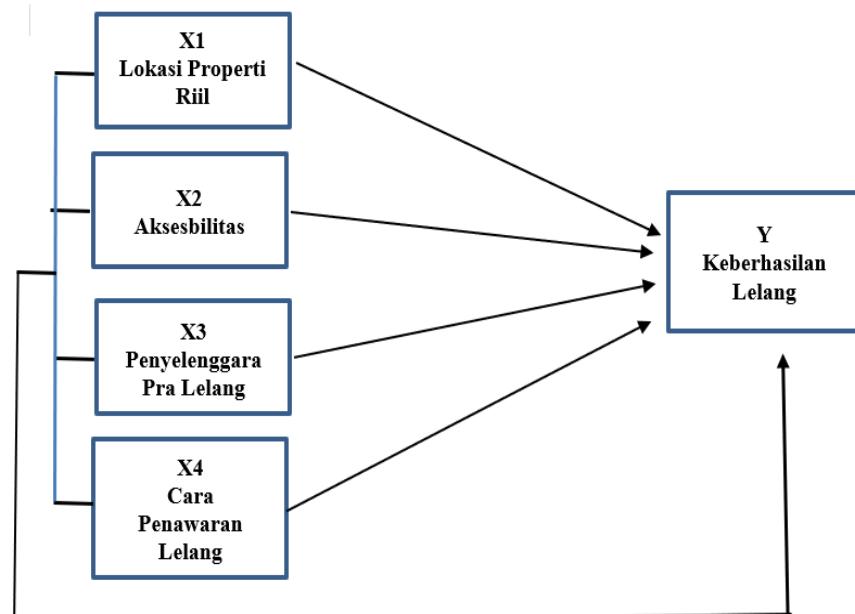
Hidayati dan Harjanto dalam Susanto (2003: 19-23) menyatakan secara garis besar nilai suatu properti dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran, fisik, faktor lokasi dan perletakan, dan faktor kebangsaan/politik. Pertama, faktor permintaan dan penawaran dianggap sebagai satu faktor yang sangat luas dan menyeluruh dampaknya karena faktor ini meliputi faktor-faktor lainnya juga. Jika penawaran properti di pasaran tetap sedangkan permintaan bertambah, maka nilai properti akan naik, begitu pula sebaliknya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu kota atau wilayah secara otomatis akan menyebabkan bertambahnya permintaan properti. Faktor kedua yaitu faktor fisik properti meliputi jenis dan kegunaan properti, ukuran dan bentuk, serta desain dan konstruksi bangunan. Bentuk fisik properti juga tidak kurang peranannya dalam menentukan nilai sebuah properti, terutama sekali untuk tanah-tanah kosong dan tanah-tanah yang berpotensi dibangun. Desain dan konstruksi bangunan, desain bangunan lebih ditentukan oleh jenis kegunaan bangunan dan selera dari masyarakat yang menggunakan. Ketidaksesuaian dari keduanya akan menyebabkan nilai sebuah bangunan akan menjadi turun, demikian juga sebaliknya. Faktor ketiga yaitu perletakan dan lokasi. Faktor lokasi dapat dianggap sebagai faktor terkuat pengaruhnya terhadap nilai suatu properti. Secara umum “Teori Lokasi” menyatakan bahwa semakin jauh dari pusat kota maka nilainya akan semakin rendah. Hal tersebut karena kota merupakan pusat segala aktivitas manusia. Faktor lokasi seterusnya menentukan apakah sebuah properti tersebut mudah atau sulit dicapai. Properti yang mempunyai lokasi di kawasan kota mempunyai infrastruktur dan sarana yang lebih baik dan lengkap serta dapat dicapai dengan mudah karena terdapat sistem pengangkutan dan perhubungan yang baik dibandingkan dengan kawasan luar kota. Kemudian yang terakhir yaitu faktor politik/kenegaraan, maksudnya adalah faktor ekonomi sosial dan politik negara, dimana secara tidak langsung akan mempengaruhi nilai properti.

Lelang di Indonesia

Pengertian lelang yang dipakai saat ini di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*) stb. 1908 Nomor 189 dan Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*) stb. 1908 Nomor 190. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/MK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, definisi lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Lelang memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi privat dan fungsi publik. Dalam fungsi privat, lelang merupakan sarana transaksi jual beli barang yang memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang, karena lelang merupakan suatu instrumen pasar yang mengakomodir keinginan pasar dalam melakukan jual beli.

Kerangka Pemikiran Penelitian



2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder yang diperoleh dari laporan berdasarkan jenis lelang dan Minuta Risalah Lelang pada KPKNL Manado untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dalam penelitian ini dibatasi cakupan analisis terhadap pelaksanaan lelang Hak Tanggungan properti riil yang terletak di wilayah kerja KPKNL Manado.

Metode Pengumpulan Data

1. Studi dokumen, peneliti mengumpulkan Laporan KPKNL Manado kepada Kanwil DJKN Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara berupa data lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL Manado untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, juga risalah lelang atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan pada KPKNL Manado untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.
2. Studi kepustakaan terutama yang berhubungan dengan teori, pengertian yang bersumber dari buku-buku atau literatur, jurnal-jurnal, serta publikasi lainnya yang terkait dengan penelitian dan penulisan ini.

Metode Analisis

Alat analisis yang dipakai untuk mengetahui ada tidaknya paradoks pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah salah satu teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen yang bersifat linier terhadap satu variabel dependen. Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Gujarati, 2012).

Model Persamaan

Persamaan matematis untuk model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

Y = Keberhasilan Lelang

X1	= Lokasi Obyek Properti riil
X2	= Aksesibilitas
X3	= Penyelenggara Pra Lelang
X4	= Cara penawaran lelang
e	= Error term
β_0	= Intersep
$\beta_1 - \beta_4$	= koefisien regresi

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)*. Model persamaan terdiri atas variabel bebas atau X_1, X_2, X_3 dan X_4 sementara variabel Y adalah variabel terikat. Dengan demikian persamaan model ini dituliskan sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Tabel 1. Hasil Regresi

Dependent Variable: Y1
 Method: Least Squares
 Date: 12/10/22 Time: 13:45
 Sample: 1 36
 Included observations: 36

Variable	Coefficien	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.715203	2.540968	3.036324	0.0048	
X1	-1.662379	5.426016	-0.306372	0.7614	
X2	1.752100	2.540968	3.036324	0.0048	
X3	-0.943094	2.915645	-0.323460	0.7485	
X4	0.032833	0.554436	1.883392	0.0691	
R-squared	0.270723	Mean dependent var	9.833333		
Adjusted R-squared	0.176623	S.D. dependent var	6.801260		
S.E. of regression	7.073248	Akaike info criterion	6.878763		
Sum squared resid	1550.956	Schwarz criterion	7.098696		
		Hannan-Quinn			
Log likelihood	-118.8177	criter.		6.955525	
F-statistic	2.876970	Durbin-Watson stat		1.878828	
Prob(F-statistic)	0.038951				

Sumber: Hasil Olahan Eviews

Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil pengolahan data menggunakan EViews adalah sebagai berikut :

$$Y = 7,715203 - 1,662379 X_1 + 1,752100 X_2 - 0,943094 X_3 + 0,032833 X_4 + e$$

a. Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R^2) sebesar 0.176623 atau 17,66 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel – variabel independent lokasi obyek properti riil yang terletak dekat CBD (X_1), Aksesibilitas menuju lokasi (X_2), penyelenggara pra lelang (X_3) dan cara penawaran lelang (X_4) secara bersama – sama memiliki pengaruh 17,66% terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

b. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variable tetap. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan eviews dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,038991. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, Prob (F-statistik) $0,038991 > \alpha = 0,05$,

Ha: $b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$

Yang artinya semua variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 dan X_4) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

c. Uji Statistik t

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda dengan aplikasi eviews menunjukkan adanya tingkat signifikansi variabel bebas terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado.

1. Variabel Lokasi obyek property riil (X_1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7614. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, Nilai probabilitas $X_1 0,7614 > 0,05$, berarti H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Lokasi obyek property riil (X_1) tidak berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado.
2. Variabel Aksesibilitas menuju lokasi properti riil (X_2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0048 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, Nilai probabilitas $X_2 0,0048 < 0,05$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Aksesibilitas menuju lokasi properti riil (X_2) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado.
3. Variabel penyelenggara pra lelang (X_3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7485. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, nilai probabilitas $X_3 0,7485 > 0,05$, berarti H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel penyelenggara pra lelang (X_3) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado.
4. Variabel cara penawaran lelang (X_4) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0691. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, nilai probabilitas $X_4 0,0691 > 0,05$, berarti H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel cara penawaran lelang (X_4) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado.

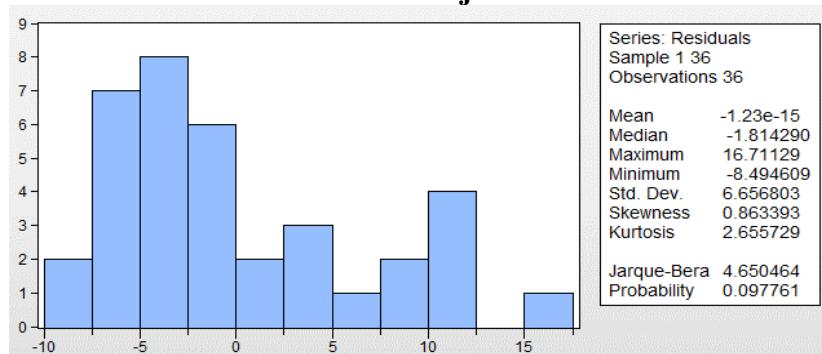
Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

Untuk menguji data pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque Bera test (J-B).

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan Gambar 1 uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (0,097761) $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 12/10/22 Time: 17:21
Sample: 1 36
Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.456518	4.645827	NA
X1	29.44165	6.217775	1.451167
X2	17.73500	2.968462	6.96.721
X3	8.500988	1.529235	1.146926
X4	10.10490	2.343356	5.477446

Sumber : Hasil olah data Eviews

Untuk melihat apakah model mengalami multikolinearitas, jika nilai varian inflation faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas. Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, inflation faktor (VIF) pada X_1 , X_2 , X_3 dan $X_4 < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Tabel 3. Uji White

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.212109	Prob. F(12,23)	0.9961
Obs*R-squared	3.587010	Prob. Chi-Square(12)	0.9898
Scaled explained SS	2.201964	Prob. Chi-Square(12)	0.9990

Sumber : Hasil olah data Eviews

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas dengan uji white menggunakan Eviews dapat dilihat bahwa nilai probabilitas observasi R^2 sebesar 0,9898 jika dibandingkan dengan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), $0,9898 > 0,05$ artinya residual digolongkan homoskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dengan cara membandingkan antara nilai Durbin Watson statistic dengan nilai Durbin Watson hitung.

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat nilai Durbin Watson Statistik adalah 1,878828 atau lebih kecil dari 2 artinya model regresi ini dinyatakan tidak terdapat autokorelasi.

Berdasarkan persamaan dan hasil pengujian-pengujian diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Secara parsial, lokasi obyek property riil dan penyelenggara pra lelang berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado. Nilai koefisien

regresi obyek property riil (1,662379) lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien regresi penyelenggara pra lelang (-0,943094).

2. Secara parsial, aksesibilitas menuju lokasi properti riil berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado. Nilai koefisien regresi aksesibilitas menuju lokasi properti riil (1,752100) lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien regresi cara penawaran lelang (0,032833) artinya pengaruh aksesibilitas lebih dominan daripada cara penawaran lelang.
3. Secara simultan, dapat dilihat nilai Prob (F-statistik) $0,038951 < \alpha = 0,05$ yang berarti faktor lokasi, aksesibilitas, penyelenggaran pra lelang dan cara penawaran lelang secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado.
4. Faktor lokasi, aksesibilitas, penyelenggaran pra lelang dan cara penawaran lelang mampu mempengaruhi keberhasilan lelang di KPKNL Manado sebesar 17,6623% sedangkan sisanya sebesar dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Hasil Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh aksesibilitas yang lebih mudah akan meningkatkan keberhasilan lelang di KPKNL Manado. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprapno (2006), Novrizal (2007), Widodo (2008), Istina (2009) dan Susanto (2017). Hal tersebut sesuai dengan hasil uji t untuk variabel aksesibilitas menuju lokasi properti riil (X_2) yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0048. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, Nilai probabilitas X_2 $0,0048 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas menuju lokasi properti riil (X_2) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado. Berdasarkan hasil uji tersebut, masyarakat yang akan mengikuti lelang akan mempertimbangkan terkait aksesibilitas menuju objek lelang yang ditawarkan. Mereka beranggapan, bahwa semakin baik aksesibilitasnya maka semakin bagus nilai objek lelang tersebut di masa yang akan datang. Hal tersebut dimaklumi, karena tidak semua peserta lelang membeli objek lelang untuk investasi, namun ada juga yang berperan sebagai *reseller property* yang diperoleh dari hasil pembelian lelang.

Hasil penelitian terhadap variable aksesibilitas (X_2) sesuai dengan teori situs yang disampaikan oleh Fanning et. al. (1994: 54-59), yaitu tingkat kemudahan dalam perpindahan orang, barang, dan jasa diantara pusat-pusat aktivitas (*loci*) menyebabkan waktu dan biaya dalam beraktivitas semakin rendah, ini berarti *utility* dan nilai tapak yang semakin tinggi.

Untuk variabel lokasi obyek property riil (X_1) yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7614. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, Nilai probabilitas X_1 $0,7614 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel lokasi obyek property riil (X_1) tidak berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado. Hal ini tidak berarti membuktikan bahwa lokasi objek property riil tidak menjadi pertimbangan bagi masyarakat pada saat akan mengikuti lelang, namun masyarakat lebih cenderung realistik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang dimiliki. Pada masa pandemi ini, masyarakat menjadi lebih selektif ketika akan membelanjakan uang yang bernilai cukup besar, sehingga mereka tetap akan mengikuti lelang namun dengan mencari pilihan lain yang tetap memiliki nilai investasi sepadan.

Variabel penyelenggara pra lelang (X_3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7485 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, nilai probabilitas X_3 $0,7485 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel penyelenggara pra lelang (X_3) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado. Pada umumnya, *stakeholder* yang mengajukan permohonan lelang lebih memilih menggunakan jasa pra lelang dari Balai Lelang dengan beberapa pertimbangan, diantaranya terkait efektivitas pemasaran. Untuk *Stakeholder* yang merasa masih mampu untuk melakukan pemasaran sendiri, maka tidak perlu menggunakan jasa pra lelang dari Balai Lelang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Lokasi obyek property riil tidak berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado.
2. Aksesibilitas menuju lokasi properti riil berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado.
3. Penyelenggara pra lelang tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado.
4. Cara penawaran lelang tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado.
5. Secara simultan, faktor lokasi, aksesibilitas, penyelenggaran pra lelang dan cara penawaran lelang secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan lelang di KPKNL Manado.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut kami menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. DJKN selaku penyelenggara lelang harus senantiasa melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan lelang kepada seluruh masyarakat sehingga lelang menjadi semakin dikenal dan masyarakat memiliki animo untuk mengikuti lelang.
2. DJKN selaku pembuat peraturan menteri di bidang pelaksanaan lelang senantiasa melakukan inovasi terhadap penyelenggaraan lelang melalui mekanisme lelang internet, sehingga lebih mudah dan lebih *familiar* untuk digunakan oleh seluruh masyarakat, baik yang sering mengikuti lelang maupun yang sedang mencoba untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan lelang.
3. *Stakeholder* dalam mengajukan permohonan lelang, tidak harus selalu berpatokan pada lokasi objek lelang, namun perlu memperhatikan potensi lelang.
4. *Stakeholder* dapat memilih objek lelang yang memiliki aksesibilitas yang bagus untuk diajukan lelang, mengingat masyarakat yang berminat terhadap objek lelang sangat memperhatikan masalah aksesibilitas ke lokasi

DAFTAR PUSTAKA

BULETIN PENELITIAN MAPPI : https://mappi.or.id/mobile/files/1595602104-bulpenKPSPI_EdisiI_Juli2020_r2.pdf

Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Utara <https://sulut.bps.go.id/pressrelease/2019/02/06/469/pertumbuhan-ekonomi-sulawesi-utara-2018-.html>

Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Utara, <https://sulut.bps.go.id/indicator/13/622/1/realisasi-pendapatan-daerah-pemerintah-provinsi-sulawesi-utara-menurut-jenis-pendapatan.html>

Ginting, Josep May Hardi, Vekie A. Rumate dan Debby Ch. Rotinsulu, 2017, Determinan Keberhasilan Lelang Hak Tanggungan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi.

Hanavia, Evie dan Widodo Tresno Novianto, Januari-Juni 2017, Jurnal Repertorium, Vol. IV No.1. KUHPerdata: <https://kejari-sukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>

Marziah, Ainon, Sri Walny Rahayu dan Iman Jauhari, Agustus 2019, Jurnal IUS Vol.7, No.2

Nugrohandhini, Dwi dan Etty Mulyati, September 2019, Vol.4, Nomor 1, *Jurnal Bina Mulia Hukum.*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku

Pada Kementerian Keuangan j.o Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 Tentang Pejabat Lelang Kelas I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Setiawan, Nafiantoro Agus, 2005, “Analisa Faktor yang Mempengaruhi Hasil Lelang Property : Studi Kasus Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutan Negara (PUPN) di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta II” , *Tesis S-2, PPS-UGM, Yogyakarta* (tidak dipublikasikan).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Susanto, Agus, 2017, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu tahun 2015-2016” , *Tesis S-2, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi*.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Vendu Reglement : <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1908/189-1908-VR.htm>

Vendu Instructie : <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1908/4-1908-VI.htm>



ANALISIS JUMLAH PENDUDUK, PERTUMBUHAN EKONOMI, BI RATE DAN INFLASI TERHADAP KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DAN KREDIT PEMILIKAN APARTEMEN (KPA)
(STUDI KASUS PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK)

Indri Winda Mentang¹, Agnes L. Ch. P. Lapian², George M.V. Kawung³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado

E-mail: indriwindamentang@gmail.com, agneslapian@unsrat.ac.id, georgekawung@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan perumahan ini diperuntukkan memenuhi kebutuhan penduduk terhadap perumahan dan permukiman. Pemukiman sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia. Program KPR dan KPA merupakan bagian upaya pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, BI Rate dan Inflasi terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.

Data yang digunakan adalah data sekunder tahunan mulai dari tahun 2011 – 2021. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Variabel yang digunakan antara lain Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, BI Rate, Inflasi serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia. Sedangkan BI Rate dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia. Namun secara bersama-sama Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, BI Rate dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, BI Rate, Inflasi, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)

ABSTRACT

The housing development is intended to meet the needs of the population for housing and settlements. Settlement as a primary need that must be met by humans. The KPR and KPA programs are part of the government's efforts to be able to meet people's housing needs in order to improve their quality of life.

The purpose of this study is to determine the effect of Total Population, Economic Growth, BI Rate and Inflation on Housing Loans (KPR) and Apartment Ownership Loans (KPA) in Indonesia.

The data used is annual secondary data starting from 2011 – 2021. The analytical method used is multiple regression analysis. The variables used include Population, Economic Growth, BI Rate, Inflation and Housing Loans (KPR) and Apartment Ownership Loans (KPA). The results showed that partially Population and Economic Growth had a positive and significant effect on Housing Loans (KPR) and Apartment Ownership Loans (KPA) in Indonesia. Meanwhile, the BI Rate and Inflation have no significant effect on Housing Loans (KPR) and Apartment Ownership Loans (KPA) in Indonesia. However, together the population, economic growth, BI rate and inflation have a significant effect on housing loans (KPR) and apartment ownership loans (KPA) in Indonesia.

Keywords: Total Population, Economic Growth, BI Rate, Inflation, Housing Loans (KPR) and Apartment Ownership Loans (KPA)

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Jumlah penduduk yang besar bagi suatu negara merupakan suatu hal yang positif dan bisa dijadikan sebuah potensi dalam hal penggunaan tenaga kerja untuk mendukung pembangunan negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat menjadi cerminan atas kemajuan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Rapanna Et al, 2017).

Salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat adalah Perumahan. Kebutuhan akan perumahan terus bertambah setiap tahunnya didorong oleh pertumbuhan penduduk dan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat. Di samping itu, faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap properti adalah untuk investasi jangka panjang dimana harga properti yang semakin naik. Seiring dengan banyaknya permintaan masyarakat terhadap properti baik perumahan maupun apartemen, perbankan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh perumahan maupun apartemen melalui fasilitas kredit untuk membantu masyarakat yang tidak mampu melakukan pembiayaan secara tunai.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dapat diartikan bahwa minat masyarakat terhadap sektor properti cenderung semakin meningkat. Berbagai macam fasilitas pembiayaan disediakan oleh lembaga perbankan dalam hal ini Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) yang tiap tahunnya mengalami peningkatan memberi dampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Melalui fasilitas kredit, perbankan yang tergabung dalam HIMBARA, Bank Swasta Nasional/Internasional, Bank Pemerintah Daerah juga turut serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Fungsi perbankan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat yang membutuhkan dana memberikan fasilitas kredit salah satunya Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen. Kedua Jenis Fasilitas Kredit tersebut di berikan oleh bank untuk membantu nasabah melakukan pengangsuran pembiayaan kredit perumahan maupun apartemen.

Permintaan kredit dari masyarakat khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dapat mendorong daya beli masyarakat, investasi jangka panjang, serta pemenuhan kebutuhan primer serta memberi efek domino bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti penyerapan tenaga kerja, permintaan bahan material untuk pembangunan properti, peningkatan pajak dan lainnya. Dengan adanya peningkatan permintaan kredit maka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan.

Suku Bunga tersebut ditetapkan sebagai acuan serta dengan melihat kondisi perekonomian di Indonesia. Fungsi dari BI Rate adalah menjaga kestabilan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, memengaruhi harga saham, mencegah potensi fraud dalam perbankan, dan menjaga kestabilan ekonomi negara. Adapun tujuan BI Rate adalah untuk menjadi standar acuan bunga bank, menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat, meningkatkan nasabah bank, serta mendorong perputaran bisnis.

Bank Tabungan Negara (BTN) Merupakan pelopor perbankan penyaluran kredit perumahan di Indonesia yang ditunjuk pemerintah. Pada Tahun 1974 BTN mulai melayani pembiayaan kredit rumah bagi masyarakat umum. Penugasan ini diberikan langsung oleh pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan nomor B-49/MK/I/1974. BTN berperan sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan.

Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia?

3. Apakah BI Rate berpengaruh terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia?
5. Apakah jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, BI Rate dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh BI Rate terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, BI Rate dan inflasi secara simultan terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. **Manfaat Teoritis**
Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, lebih khusus yang berkaitan dengan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).
2. **Manfaat Praktis**
 - a) Bagi Penulis, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama kuliah dan menambah wawasan penulis yang bekerja di salah satu perbankan BUMN di Indonesia.
 - b) Pembaca, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan acuan untuk peneliti-peneliti lain dalam melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu dapat dijadikan pengetahuan bagi pembaca perihal hubungan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, BI Rate, dan Inflasi terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen.
 - c) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran terkait dengan penyusunan kebijakan makroprudensial yang tepat agar sistem keuangan dan perekonomian Indonesia tetap berada dalam keadaan yang stabil.
 - d) Bagi Pengusaha, dapat memberikan gambaran terkait dengan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, BI Rate dan Inflasi sehingga usaha-usaha di bidang properti atau pemilikan rumah tinggal dapat kembali tumbuh dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan.

Tinjauan Pustaka Ekonomi Moneter

Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari tentang sifat, fungsi dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi moneter terdapat beberapa hal yang dipelajari, seperti pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional (Yudawisastra et al, 2022).

Pengertian Bank

Bank merupakan suatu Lembaga Keuangan yang melakukan berbagai macam aktivitas keuangan seperti investasi, aktivitas penyimpanan dana, pengiriman uang dari suatu daerah ke daerah lainnya, disamping itu bank juga mempunyai peran penting dalam mendorong

pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut. (Ismail 2010)

Bank BUMN

Bank BUMN merupakan badan usaha yang modal dan operasional dimiliki oleh Negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia. Bank BUMN sendiri berada dibawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Bank BUMN terdiri dari PT.(Persero) Bank BRI Tbk, PT.(Persero) Bank BNI Tbk, PT.(Persero) Bank BTN Tbk, PT.(Persero) Bank Mandiri Tbk.

Kredit

Menurut (Andrianto 2019) Kredit merupakan kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (Pemberi Kredit) kepada pihak lainnya (Penerima Kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut.

KPR

Kredit Pemilikan Rumah adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa Rumah.

KPA

KPA adalah fasilitas kredit perbankan yang ditujukan bagi nasabah perorangan untuk melakukan pembelian unit apartemen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama KPR dan KPA terdapat pada objek, dimana KPR untuk rumah tapak sedangkan KPA untuk apartemen.

Teori Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menurut Lincoln akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas (Arsyad, 2004).

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat.

Suku Bunga (BI Rate)

Pelaksanaan kegiatan perkreditan semua bank yang beroperasi di Indonesia harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengawas bank. Salah satunya mengenai penetapan suku bunga, dimana pelaksanaan kredit perbankan didasarkan oleh tingkat suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Rate. Suku bunga acuan pada umumnya akan naik apabila diperkirakan bahwa inflasi di masa mendatang akan melewati target yang telah ditetapkan, sementara apabila inflasi diperkirakan akan berada di bawah target justru suku bunga acuan akan diturunkan. (Bank Indonesia, 2016).

Inflasi

Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2014).

Penelitian Terdahulu

Penelitian Epril Maruli Tua Purba, M. Komri Yusuf dan Anna Yulianita (2012)

Hasil dari Penelitian bahwa sebesar 95.5 persen variabel Permintaan Kredit KPR (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh variabel suku bunga Bank Indonesia dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel bebasnya. Sementara sisanya 0.5 persen dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model yang dianggap tetap (ceterisparibus).

Penelitian Nadya Lani Lengkong, Vekie A. Rumate, Daisy S.M Engka (2018)

PDRB mempunyai pengaruh terhadap tingkat tabungan masyarakat Sulawesi Utara, sedangkan Inflasi dan Suku Bunga secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat tabungan masyarakat di Sulawesi Utara.

Penelitian Stefano Rahadian Rama Djati dan Mustafa Kamal (2017)

Variabel ROA dan pertumbuhan kredit (GDP) berpengaruh secara negatif, sedangkan variabel Non Performing Loan (NPL) dan variabel BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap Kredit KPR. Variabel ROA merupakan variabel paling dominan (-0.495) dalam mempengaruhi Kredit KPR.

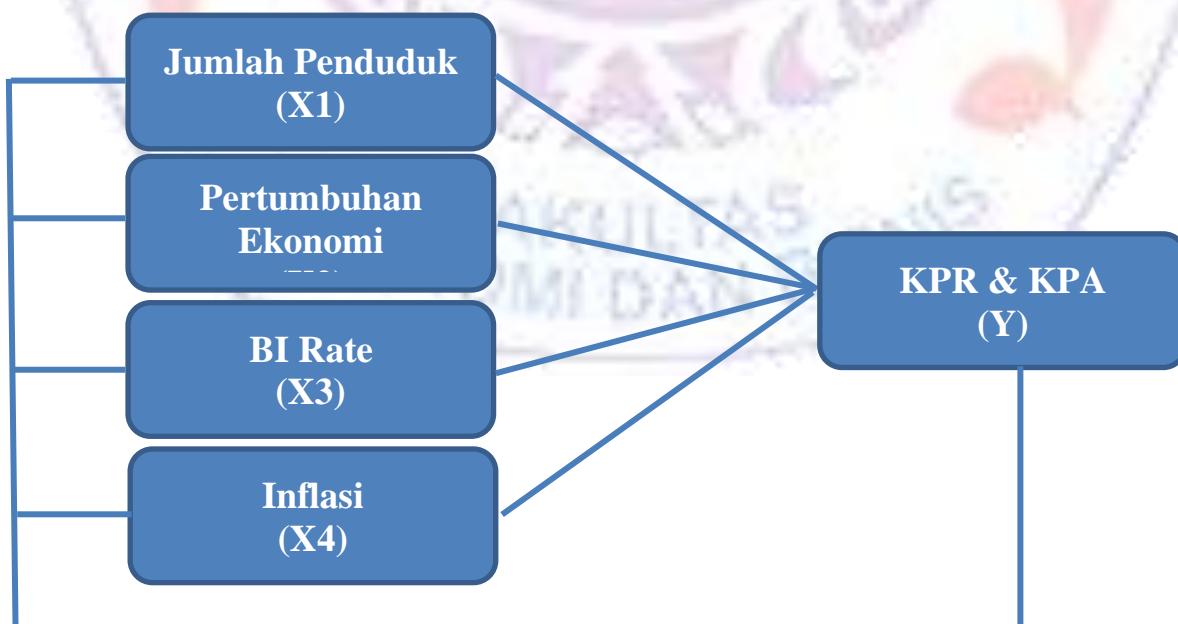
Penelitian Anisa Nurpita dan Rina Oktavia (2021)

Pertumbuhan kredit untuk jenis KPR dan KPA di Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan hingga akhir tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan penurunan pertumbuhan kredit dari ketiga jenis kredit properti yang ada di Indonesia. Kedua, terkait dengan hubungan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap KPR dan KPA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Jumlah Penduduk dengan KPR dan KPA. Lalu, antara variabel Pertumbuhan Ekonomi dengan variabel KPR dan KPA terdapat hubungan negatif dan signifikan. Sedangkan untuk variabel inflasi dengan KPR dan KPA tidak terdapat hubungan/korelasi. Maka, dapat diinterpretasikan bahwa ketika Jumlah Penduduk mengalami kenaikan maka KPR dan KPA juga akan semakin meningkat, serta Pertumbuhan Ekonomi semakin menurun akan menaikkan KPR dan KPA. Sedangkan untuk Inflasi tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan KPR dan KPA.

Penelitian Joshua B. Rombe, Tri Oldy Rotinsulu dan Mauna Th. B Maramis (2021)

Suku Bunga KPR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyaluran KPR. Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran KPR, Hasil Uji F menunjukkan, Suku Bunga KPR, Produk Domestik Bruto secara simultan berpengaruh atau secara bersama-sama signifikan terhadap Penyaluran KPR di Indonesia.

Kerangka Konseptual Penelitian



Hipotesis Penelitian

1. Diduga jumlah penduduk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.
2. Diduga pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.

3. Diduga BI Rate secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.
4. Diduga inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.
5. Diduga jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, BI Rate dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana peneliti menggunakan data sekunder kurun waktu (time series) dari tahun 2011-2021. Jenis data yang dikumpulkan berupa data jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, BI rate, inflasi dan data penyaluran KPR dan KPA pada PT. Bank Tabungan Negara, (Persero) Tbk.

Model Penelitian

Model dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Model dasar ini dibentuk dengan maksud untuk melihat pengaruh variabel Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, BI Rate, dan Inflasi terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) pada PT Bank Tabungan Negara, (Persero) Tbk.

Dimana:

X_1 : Jumlah Penduduk

X_2 : Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

X_3 : Tingkat Suku Bunga

X_4 : Inflasi di Indonesia

Y : KPR dan KPA PT Bank Tabungan Negara, (Persero) Tbk

Model penelitian ditransformasikan dalam bentuk semi-log sebagai berikut:

$$\text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log } X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Metode Analisis

Metode Analisis Tabel, bertujuan untuk melihat perkembangan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, BI Rate, Inflasi serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) pada PT Bank Tabungan Negara, (Persero) Tbk.

Metode Analisis Regresi Berganda, bertujuan untuk melihat pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, BI Rate dan Inflasi terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dengan rumus (Sumodiningrat, 1996) dengan menggunakan metode pengujian klasik didalamnya Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas Uji Heteroskedasitas dan Uji Autokorelasi. Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Uji Multikolinearitas menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang perfect atau exact di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Uji Heteroskedasitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedasitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas (Y_i) meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas (X_i), maka varian dari Y_i adalah tidak sama. Gejala heteroskedasitas lebih sering dalam data cross section dari pada time series. Sedangkan Uji Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Dalam data time series observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penelitian

Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jumlah Penduduk pada tahun 2011 sebesar 237 juta jiwa mengalami peningkatan sebesar 7,7 juta jiwa pada tahun selanjutnya yang menjadi jumlah peningkatan penduduk terbanyak dalam periode 2011-2021 berbanding lurus dengan jumlah rumah tangga di Indonesia. Tetapi pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami pertumbuhan paling sedikit sekitar 2,47 juta jiwa.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 6,17%, di tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,03% sampai pada tahun 2015 sebesar 4,88% kemudian pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,03% lalu kembali menurun di tahun 2019 yaitu sebesar 5,02%. Adapun di tahun berikutnya pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 2,97% dan kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 3,69%.

BI Rate

Pada tahun 2011, BI Rate ada pada posisi 6,00% per tahun, yang mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 5,75%, namun di tahun berikutnya pada tahun 2013, BI Rate mengalami kenaikan menjadi 7,50%. Hal ini karena adanya imbas dari krisis ekonomi global khususnya yang terjadi di Amerika Serikat.

Pada tahun 2014, menunjukkan bahwa nilai perkembangan BI Rate mengalami kenaikan menjadi 7,75% lalu turun kembali pada tahun 2015 menjadi 7,52% dan terus mengalami penurunan suku bunga sampai pada 2017 menjadi 4,25%. Tetapi pada tahun 2018, BI Rate mengalami gejolak meningkat secara signifikan 6,00% dan di tahun berikutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali berada pada angka 5,00% dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2021 menjadi 3,50%.

Inflasi

Inflasi di Indonesia mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011, angka inflasi di Indonesia sebesar 3,79% dan pada tahun 2013 mengalami lonjakan yang cukup tajam menjadi 8,38%, tapi di tahun berikutnya 2014 perlahan mengalami penurunan pada angka 8,36% dan terus menurun sampai pada tahun 2021 sebesar 1,87%.

KPR dan KPA PT. Bank Tabungan Negara, (Persero) Tbk

Jumlah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Namun dapat dilihat bahwa peningkatan terbesar jumlah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) terjadi pada tahun 2016-2017 yaitu sebesar 7,5 Triliun Rupiah. Kemudian penurunan terbesar dalam jumlah KPR/KPA terjadi pada tahun 2018-2019 yaitu sebesar 13,4 Triliun Rupiah.

Hasil Penelitian

Tabel 1
Hasil Regresi

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

Date: 03/08/23 Time: 21:24

Sample: 111

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-257.8006	58.69108	-4.392501	0.0046
LOG(X1)	14.78526	3.001109	4.926597	0.0026
X2	0.377124	0.128247	2.940611	0.0259
X3	0.059938	0.075360	0.795355	0.4567
X4	0.003125	0.046593	0.067077	0.9487
R-squared	0.825812	Mean dependent var	30.75271	
Adjusted R-squared	0.709687	S.D. dependent var	0.387587	
S.E. of regression	0.208835	Akaike info criterion	0.008407	
Sum squared resid	0.261672	Schwarz criterion	0.189269	
Log likelihood	4.953759	Hannan-Quinn criter.	-0.105600	
F-statistic	7.111387	Durbin-Watson stat	1.472478	
Prob(F-statistic)	0.018379			

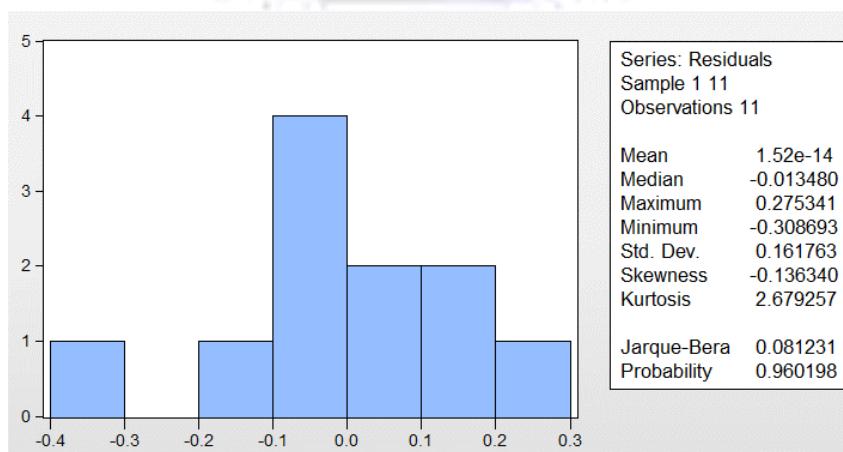
Sumber: Hasil Olahan Eviews 12

1. Variabel Jumlah Penduduk (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0026. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X1 $0,0026 < 0,05$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Jumlah Penduduk (X1) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen di Indonesia.
2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0259. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X2 $0,0259 < 0,05$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X2) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen di Indonesia.
3. Variabel BI Rate (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4567. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, nilai probabilitas X3 $0,4567 > 0,05$, berarti H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel BI Rate (X3) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen di Indonesia.

Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (0,081231) $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 03/08/23 Time: 21:57
Sample: 1 11
Included observations: 11

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3444.643	868823.8	NA
LOG(X1)	9.006657	851992.8	3.761060
X2	0.016447	105.4560	3.249120
X3	0.005679	48.16279	2.994528
X4	0.002171	11.44199	2.597133

Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, inflation faktor (VIF) pada X1, X2 , X3 dan X4 < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak memiliki multikolinearitas.

Uji Heteroskedastitas

Tabel 4
Uji Breusch Pagan Godfrey
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.620257	Prob. F(4,6)	0.1403
Obs*R-squared	6.995395	Prob. Chi-Square(4)	0.1361
Scaled explained SS	1.747497	Prob. Chi-Square(4)	0.7821

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 03/08/23 Time: 22:03

Sample: 1 11

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16.98843	7.077762	-2.400255	0.0533
LOG(X1)	0.870576	0.361914	2.405475	0.0529
X2	0.040451	0.015466	2.615555	0.0398
X3	-0.009864	0.009088	-1.085430	0.3194
X4	0.001791	0.005619	0.318778	0.7607
R-squared	0.635945	Mean dependent var		0.023788
Adjusted R-squared	0.393242	S.D. dependent var		0.032331
S.E. of regression	0.025184	Akaike info criterion		-4.222252
Sum squared resid	0.003805	Schwarz criterion		-4.041391
Log likelihood	28.22239	Hannan-Quinn criter.		-4.336260
F-statistic	2.620257	Durbin-Watson stat		3.038401
Prob(F-statistic)	0.140304			

Sumber : Hasil olah data Eviews

Dari hasil uji Heteroskedastisitas dengan uji Breusch Pagan Godfrey menggunakan Eviews 12 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas observasi R2 sebesar 6,995395 jika

dibandingkan dengan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5 \%$), $6,995395 > 0,05$ artinya residual digolongkan homoskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Durbin Watson
Tabel Durbin-Watson (DW)
 $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198

Dari tabel dapat dilihat untuk $n = 11$ dan $k = 4$, $dL = 0,4441$ dan $dU = 2,2833$.

Jika $d < dL$ atau $d > 4 - dL$ maka H_0 Ditolak,

jika $dU < d < 4 - dU$ maka gagal tolak H_0

jika $dL < d < dU$ atau $4 - dU < d < 4 - dL$ maka inconclusive (ragu – ragu atau tidak ada keputusan)

Pada hasil uji model regresi ini terjadi $d > dL$ atau $1,472478 > 0,4441$ dan $d < dU$ $1,472478 < 2,2833$, ini berarti model regresi ini dinyatakan tidak terdapat autokorelasi.

1. Nilai konstanta sebesar -257,8006 menyatakan bahwa Jika nilai X_1 jumlah penduduk, X_2 pertumbuhan ekonomi, X_3 BI Rate dan X_4 Inflasi adalah konstan (0) maka nilai Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen di Indonesia. (Y) adalah negatif 257,8006.
2. Secara parsial, jumlah penduduk dan Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan. Nilai koefisien regresi jumlah penduduk sebesar 14,78526. Ini berarti kenaikan jumlah penduduk 1 % akan meningkatkan Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen di Indonesia sebesar 14,78526%.
3. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi dan Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0,377124 artinya setiap kenaikan 1 % pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan 0,377124% Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen di Indonesia.
4. Secara parsial, BI Rate dan Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen di Indonesia berpengaruh positif dan tidak signifikan. Nilai koefisien regresi BI Rate sebesar 0,059938.
5. Secara parsial, Inflasi dan Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen di Indonesia berpengaruh positif dan tidak signifikan. Nilai koefisien regresi Inflasi sebesar 0,003125.
6. Secara parsial pengaruh peningkatan jumlah penduduk lebih besar dibandingkan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen di Indonesia.
7. Secara simultan, dapat dilihat nilai Prob (F-statistik) $0,018379 < \alpha = 0,05$ yang berarti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, BI rate dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen di Indonesia.

8. Dari hasil penelitian, naik turunnya Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen di Indonesia sebesar 70,9687% dipengaruhi oleh naik turunnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, BI rate dan inflasi sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk mempengaruhi meningkatnya Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen di Indonesia, Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Anisa N dan Rina O (2021) dan Ariyanti dan Kusumah (2018) Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong semakin bertambahnya kebutuhan rumah maupun apartemen di Indonesia. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, dan harus sehat serta layak huni. Kendala pembangunan perumahan yang berkaitan dengan perkembangan jumlah penduduk adalah terbatasnya lahan yang tersedia. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara jumlah permintaan rumah dan penawaran rumah yang banyak memicu meningkatnya nilai lahan dan rumah. Pertumbuhan penduduk yang bertambah berbanding lurus dengan kebutuhan lahan untuk perumahan.

Wilayah kota mengalami penyempitan lahan dimana lahan pemukiman penduduk akan semakin mengecil akibat dari pembagian lahan karena jumlah keluarga bertambah, dengan demikian daya dukung lahan di kota semakin kecil untuk menampung pertambahan penduduk, baik oleh pertumbuhan penduduk di kota itu sendiri maupun karena adanya urbanisasi.

Adanya pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi dengan kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan apartemen sejalan dengan hasil penelitian Bazilinska dan Panchenko (2015), Iris Shahini (2014), Epril MT Purba (2012), Stefano RR Djati (2017), Anisa N dan Rina O (2021), dan Anggraini (2016), Syahputra dan Ningsi (2020) dan Seila Hardikaningrum (2016). Sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka permintaan KPR akan mengalami kenaikan juga. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan pendapatan nasional sehingga akan mendorong meningkatnya keinginan untuk memiliki atau meningkatkan properti rumah dari masyarakat di Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi yang mempengaruhi permintaan kredit, hal ini lah yang memicu Bank Indonesia melonggarkan aturan Loan to Value mulai pertengahan 2015. Selain itu Bank Indonesia mencatatkan selain perubahan kebijakan LTV, ada juga disinergikan stabilitas nilai tukar, dan stabilitas makroekonomi. Karena pada hasil keterkaitan perubahan yang dilakukan Bank Indonesia berdampak pertumbuhan ekonomi yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan kredit.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap KPR dan KPA, Hasil ini sejalan dengan Stefano (2017). Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Epril Purba (2012), Emily A.A (2014). Secara teori kenaikan suku bunga BI berpotensi meningkatkan nilai suku bunga kredit. Pada pertengahan November 2022 lalu, Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps menjadi 5,25%. Keputusan sejumlah bank besar dalam mempertahankan suku bunga dasar kredit, salah satu pertimbangannya adalah menjaga demand atau permintaan masyarakat terhadap KPR. Sebab apabila bank juga menaikkan suku bunga kredit pemilikan rumah, hal tersebut bisa berdampak pada menurunnya pemintaan pembelian rumah. Seperti diketahui, KPR menjadi skema pembelian rumah yang banyak dipilih oleh masyarakat. Membeli hunian dengan skema mencicil dianggap mudah dan tidak memberatkan secara finansial. Artinya saat suku bunga acuan BI naik, bank tidak akan langsung menaikkan tingkat suku bunga kredit. Terutama untuk suku bunga KPR seperti yang dilakukan oleh PT BTN Tbk. BTN masih terus memantau beberapa komponen biaya dana (Cost of Fund) dan persaingan suku bunga di pasar untuk menentukan apakah penyesuaian suku bunga KPR diperlukan. Langkah tersebut juga disesuaikan dengan kemampuan bank serta kondisi pasar ke depan termsuk spread dan profitabilitas yang optimal bagi BTN. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga BI bisa saja tidak berpengaruh terhadap KPR dan KPA.

Inflasi dalam penelitian ini terbukti secara parsial tidak mempengaruhi Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen, hasil ini sejalan dengan Anisa N dan Rina O (2021), Ternyata tidak sejalan dengan hasil penelitian Sam Meng dkk (2011). Kenaikan inflasi akan mendorong bank sentral, termasuk Bank Indonesia, untuk menaikkan suku bunga acuan yang dapat berdampak pada kenaikan biaya kredit, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR),

sehingga mempengaruhi sektor perumahan. Kenaikan suku bunga acuan yang akan berdampak pada biaya pinjaman serta kemampuan masyarakat membeli rumah. Pemerintah telah memberikan dukungan untuk mendorong sektor perumahan. Dukungan diberikan melalui fasilitas likuiditas dalam program FLPP untuk mendukung likuiditas pembiayaan perumahan. Tahun 2022, pemerintah menyediakan anggaran Rp 19,1 triliun dalam APBN untuk program FLPP dengan target 200 ribu unit rumah. Pemerintah juga menyediakan berbagai skema kredit rumah rakyat yang bersubsidi. Karena ada gap affordability, diberikan subsidi selisih bunga (SSB), Hal ini menyebabkan inflasi tidak mempengaruhi KPA dan KPR sesuai hasil penelitian yang diperoleh.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, BI Rate dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di Indonesia.

Saran

1. Pemerintah harus mengoptimalkan peran perbankan umum untuk memberikan berbagai kemudahan untuk mendapatkan KPR dan KPA.
2. Pemerintah mendorong sektor properti untuk lebih berkontribusi meningkatkan produktivitas penjualan produk KPR dan KPA serta memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung produktivitas tersebut.
3. Terdapat kebijakan khusus bagi masyarakat yang mau memiliki rumah pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, 2019, Manajemen Bank. Surabaya: Qiara Media Publishing.

Anggraini Puspa Dewi, 2016, Analisis Permintaan Kredit Pemilikan Rumah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Volume 4 Nomor 2.

Anisa Nurpita, Rina Oktavia, 2021, Analisis Hubungan Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), *Jurnal Gama Societa*, Volume 4, Nomor 2.

Arsyad, Lincoln. 2004. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.

O. Bazilinska, O. Panchenko Mortgage, 2020, *Lending As A Component Of Economic Growth*, НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА. Економічні науки, ISSN 2519-4739.

Bank Indonesia, 2017, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.

Boediono. 2014. Ekonomi Moneter, BPFE, Yogyakarta.

Emily Adhiambo Agao, 2014, *The Effect Of Macroeconomic Variables On The Mortgage Uptake For Mortgage Industry In Kenya*, Erepository University of Nairobi, http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/75052/Agao_The%20effect%20of%20macroeconomic%20variables%20on%20the%20mortgage%20uptake.pdf?sequence=2

Epril Maruli Tua Purba, M. Komri Yusuf dan Anna Yulianita, 2012, Analisis Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Permintaan Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank Tabungan Negara Palembang), *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Univ. Sriwijaya, Palembang.

Iris Shahini, 2014, *The Impact Of Economic Growth In Housing Loans Demand In Albania, European Scientific Journal*, Volume 10. Nomor 19.

Ismail, M.A. 2010. Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Kencana, Jakarta.

Joshua B. Rombe, Tri Oldy Rotinsulu, Mauna Th. B Maramis, 2021, Analisis Pengaruh Suku Bunga KPR Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penyaluran KPR Di Indonesia Tahun 2014:Q1 – 2020:Q4, *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Univ. Sam Ratulangi, Manado.

Nadya Lani Lengkong, Vekie A. Rumate, Daisy S.M Engka, 2018, Pengaruh PDRB, Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap tingkat Tabungan Masyarakat Pada Bank Sulutgo, *Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi*, Univ. Sam Ratulangi, Manado.

Rapanna, P. 2017. Ekonomi pembangunan. CV sah media, Makasar.

Stefano Rahadian Rama Djati dan Mustafa Kamal, 2017, Analisis Pengaruh ROA, NPL, Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate), Dan Pertumbuhan Ekonomi (GDP) Terhadap Penyaluran Kredit KPR (Studi Pada Bank Persero Periode 2011-2015), *Diponegoro Journal of Management*, Volume 6, No 3, pp. 464-470.

Sukirno Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Rajawali Press, Jakarta.

_____, 2015. Makro Ekonomi : Teori Pengantar (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yudawisastra, Helin G, Anwar K, Umiyati H, Priatna I A, Sulaiman S. 2022. EKONOMI MONETER. Edited by Damayanti, Evi, CV WIDINA MEDIA UTAMA.

ANALISIS PENGANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN (PEMELIHARAAN, PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN) TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI KOTA KOTAMOBAGU

Claudy N. Mokodongan¹, Vecky A. J. Masinambow², Agnes L. Ch. P. Lapian³

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado*

Email: claudymokodongan@gmail.com, vecky.masinambow@unsrat.ac.id, agneslapian@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Kota Kotamobagu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Ketersediaan jalan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah karena berhubungan dengan AKSESIBILITAS dan DISTRIBUSI berbagai aktivitas ekonomi para agen ekonomi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penganggaran pada pemeliharaan jalan, peningkatan jalan dan pembangunan jalan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari instansi terkait. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan model semi logaritma.

Hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan penganggaran pada pemeliharaan jalan dan pembangunan jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu. Sedangkan penganggaran peningkatan jalan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu. Secara Bersama-sama dibuktikan bahwa peningkatan penganggaran pada pemeliharaan jalan, peningkatan jalan dan pembangunan jalan berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.

Kata Kunci: Infrastruktur Jalan, pengaruh penganggaran, dan ketimpangan wilayah

ABSTRACT

Kotamobagu City is the center of economic growth in the Bolaang Mongondow Raya. Availability of roads is one of the veins in regional economic growth because it relates to ACCESSIBILITY and DISTRIBUTION of various economic activities of economic agents.

This study aims to determine the effect budgeting of road maintenance, road improvement and road construction on regional inequality in Kotamobagu City. The data used for this research is secondary data sourced from related agencies. The analytical method used is multiple regression with a semi-logarithmic model.

The results of the study prove that the increase in budgeting for road maintenance and road construction partially has a significant effect on reducing regional inequality in Kotamobagu City. Meanwhile, budgeting for road improvement partially has no significant effect on regional inequality in Kotamobagu City. Together it is proved that the increase in budgeting for road maintenance, road improvement and road construction has a significant effect on reducing regional inequality in Kotamobagu City.

Keywords: *Road Infrastructure, Effects of Unemployment and regional inequality*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

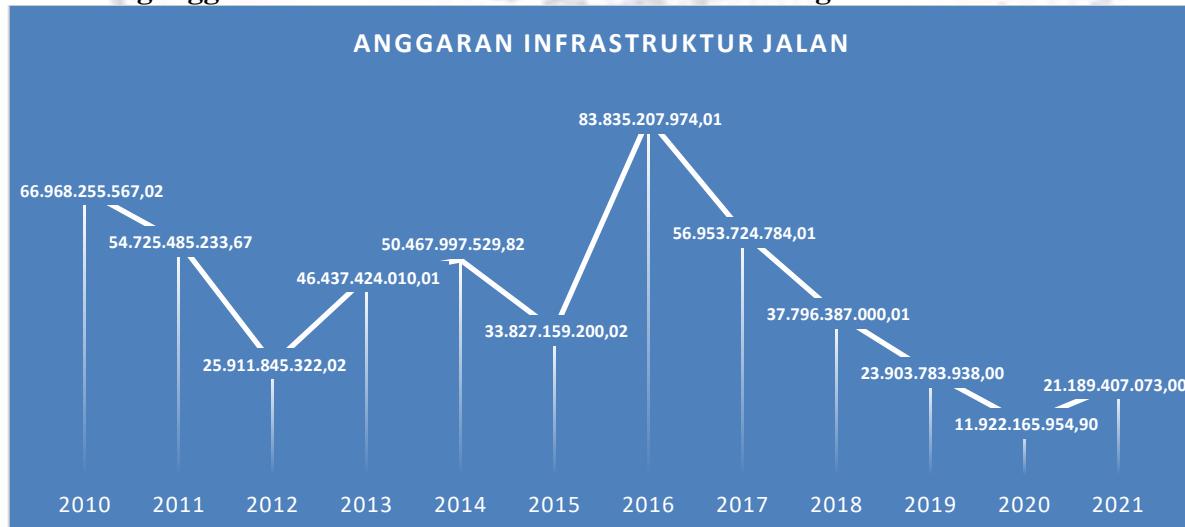
Pelayanan yang ekstra bagi pemenuhan kebutuhan warga menjadi tuntutan utama karena semakin berkembang dan beragamnya kebutuhan seluruh warga terhadap barang dan jasa. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Kotamobagu terletak di Bolaang Mongondow Raya yang menjadi pilihan bagi penduduk sekitar untuk datang baik keperluan bersifat ekonomi dan non ekonomi. Dalam konteks regional, Kota Kotamobagu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh produk jasa khususnya di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Oleh sebab itu, Kota Kotamobagu harus menyiapkan diri menjadi kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan, event-event nasional/

Internasional yang akan dan bisa diselenggarakan di Kota Kotamobagu dengan berbagai fasilitas infrastruktur yang memadai.

Ketersediaan jalan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah karena berhubungan dengan AKSESIBILITAS dan DISTRIBUSI berbagai aktivitas ekonomi para agen ekonomi¹. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan jalan, sehingga dapat mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk Struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional". Jalan mempunyai peranan yang sangat strategis untuk melayani pergerakan arus orang dan barang, sehingga agar prasarana jalan dapat berfungsi dengan baik dalam melayani lalu-lintas, diperlukan penyelenggaraan terhadap jaringan jalan yang ada dengan baik dan benar dalam arti sesuai dengan Norma Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) yang telah ditetapkan. Mengingat bahwa prasarana jalan merupakan barang publik yang harus dapat dirasakan keberadaannya oleh seluruh lapisan masyarakat, maka sebagai konsekuensinya hak penguasaan dan wewenang pengadaan prasarana jalan umumnya dilakukan oleh Pemerintah. Peranan jalan, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tentang Jalan adalah sebagai bagian sarana transportasi mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan².

Pengembangan infrastruktur jalan menjadi strategis di dalam kegiatan pembangunan terutama untuk pembangunan pengembangan wilayah. Terutama dalam menunjang visi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019 – 2023 yaitu "**KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING**"³. Dengan demikian siapakah yang akan memanfaatkan jalan tersebut setelah dibangun?; berapa besar frekuensi masyarakat pengguna jalan pertahunnya setelah dibangun?; berapa kekuatan daya beli masyarakat lokal yang akan memanfaatkan jalan tersebut? (Kasiyanto, 1996). Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis penganggaran di bidang infrastruktur transportasi darat yang diarahkan kepada masyarakat lokal secara keseluruhan khususnya di kota Kotamobagu.

Penganggaran Infrastruktur Jalan di Kota Kotamobagu Tahun 2010 – 2021



Sumber : Dinas PUPR Kota Kotamobagu

¹Dampak Pembangunan Sekitar Jalan Lingkar Selatan Pati Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi.

² UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4444.

³ RPJMD Kota Kotamobagu 2019-2023

Tampak bahwa penganggaran pengembangan infrastruktur jalan mengalami fluktuasi tahun 2016 merupakan angka tertinggi mencapai 83,8 miliar rupiah dan terus menurun sampai nilai terendah pada tahun 2020 hanya mencapai 11,9 miliar rupiah. Salah satu sebabnya di tahun tersebut adalah masa pandemi COVID 19, kebijakan penganggaran nasional sampai kedaerah diberlakukan refocusing anggaran untuk penanganan dampak C19.

Perencanaan pengembangan infrastruktur jalan terdiri atas perencanaan pemeliharaan jalan, peningkatan jalan dan pembangunan jalan. Dengan tersedianya infrastruktur transportasi jalan darat dapat menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi baru di kalangan masyarakat sekitarnya, termasuk aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Kotamobagu.

Guna mengukur dampak pembangunan jalan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rakyat, serta manfaat sosial ekonominya, maka perlu dilakukan kajian komprehensif untuk mengetahui dampak tersebut. Dalam penelitian ini mengangkat fenomena ketimpangan wilayah sebagai salah satu dampak ketidakmerataan penyediaan jalan di suatu daerah.

**Tabel 1. Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Kotamobagu
Tahun 2010 – 2021**

Tahun	IW SULUT	IW KK
2010	0,4537	0,3228
2011	0,4745	0,3405
2012	0,4801	0,3478
2013	0,4847	0,3546
2014	0,4878	0,3581
2015	0,4875	0,3646
2016	0,4951	0,376
2017	0,4981	0,381
2018	0,5027	0,3879
2019	0,5027	0,3926
2020	0,4894	0,3755
2021	0,4896	0,3638
Rata-Rata	0,487158	0,363767

Sumber : Hasil Olahan Data, 2022

Data menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Kotamobagu berada dalam ketimpangan sedang dengan rata-rata Indeks Williamson Provinsi (0,4871) masih lebih tinggi dari Kota Kotamobagu (0,3637). Selang tahun 2010 – 2021 di tingkat provinsi khusus tahun 2018 dan 2019 berada pada posisi ketimpangan tinggi karena di atas 0,5 sedangkan untuk Kota Kotamobagu berada pada posisi ketimpangan sedang. Fenomena peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Utara termasuk di Kota Kotamobagu memberikan peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Todaro (2011) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan transformasi struktural dan kelembagaan masyarakat secara menyeluruh dan cepat yang dilakukan dengan cara paling efisien sehingga menghasilkan kemajuan ekonomi bagi sebagian besar penduduk. Pembangunan ekonomi yang ingin dicapai suatu wilayah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut pada kurun waktu tertentu (Sukirno, 2010). Selain PDRB, indikator lain yang dapat dijadikan tolak ukur pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan relatif PDRB pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menggambarkan bahwa adanya peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat⁴.

⁴ Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur; Martin Luter, Irlan Indrocahyo, Islahwani Loka Vita Resti (Volume 17 (2): 38-48, December 2019)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan menjadi pemabahasan dalam penelitian:

1. Bagaimanakah pengaruh penganggaran pemeliharaan jalan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu?
2. Bagaimanakah pengaruh penganggaran peningkatan Jalan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu?
3. Bagaimanakah pengaruh penganggaran pembangunan jalan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu?
4. Bagaimanakah pengaruh penganggaran pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh penganggaran pemeliharaan jalan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.
2. Untuk mengetahui pengaruh penganggaran peningkatan jalan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.
3. Untuk mengetahui pengaruh penganggaran pembangunan jalan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.
4. Untuk mengetahui pengaruh penganggaran pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah peneliti lain dan bagi masyarakat dimana :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah sebagai pengambil keputusan, terutama untuk menentukan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien dalam pembangunan infrastruktur agar perekonomian Indonesia lebih khususnya Kota Kotamobagu menjadi lebih baik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian lainnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menyuguhkan suatu pengetahuan umum yang menarik, dan dapat dipetik manfaatnya terutama pengetahuan terhadap pengaruh penganggaran infrastruktur dan perkembangannya serta pengaruhnya terhadap ketimpangan wilayah.

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

Teori Perencanaan Pembangunan Wilayah

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan perkataan lain pembangunan ekonomi, tertarik juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi. Perbedaan penting lainnya adalah dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan perkapita terus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan perkapita (Sukirno, 2010).

Proses perencanaan pembangunan wilayah untuk perdesaan dan perkotaan menjadi salah satu dasar pertimbangan permasalahan pokok daerah. Christaller (1983) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Teori Christaller dikenal dengan dengan teori model tempat sentral (*central place model theory*). Pusat kota karena untuk berbagai jasa penting harus disediakan tanah/lingkungan sekitar dan infrastruktur. Secara ideal maka kota merupakan pusat daerah yang produktif. Dengan demikian apa yang disebut tempat sentral adalah pusat kota.

Teori Pengeluaran Pemerintah dan Barang Publik

Berg (2011) menjelaskan, barang publik sangat terkait dengan konsep ekonomi lain seperti eksternalitas, yang mengarah pada biaya dan manfaat yang tercipta di pasar yang bersifat tambahan dan eksternal terhadap produk yang diproduksi dan dibeli dipasaran. Walaupun barang publik merupakan konsep ekonomi, tetapi barang publik dan barang pribadi

dapat diidentifikasi melalui karakteristiknya, *non-rival* dan *non-excludable*, *rival* dan *excludable*. (Varian, 1992) menyebutkan, *goods that are not excludable and are nonrival are called public goods*⁵

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah sudah menetapkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk kebijakan tersebut (Guritno, 2011⁶).

Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*).

Teori Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan secara positif akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2011).

Kuznets (dalam Kuncoro, 2004) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (*an inverse U shaped pattern*). Kuznets menjelaskan lebih lanjut disparitas dalam pembagian pendapatan cenderung bertambah besar selama tahap-tahap awal pembangunan, baru kemudian selama tahap-tahap lebih lanjut dari pembangunan berbalik menjadi lebih kecil.

Syafrizal (2008) menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Indeks Williamson merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah yang semula dipergunakan oleh Jeffrey G. Williamson. Perhitungan indeks Williamson didasarkan pada data PDRB masing-masing daerah digunakan rumus

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana IW = Indeks Williamson ;Y_i = PDRB per kapita (Kabupaten/kota); Y = PDRB per kapita (provinsi); f_i = Jumlah penduduk (Kabupaten/kota), n = jumlah penduduk (Provinsi). Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau 0

⁵ Kebijakan Barang Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat; Lesmana Rian Andhika 30 Juni 2017

⁶ Guritno Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik, Edisi Ketiga, BPFE Jakarta

$< IW < 1$. Jika $IW < 0,3$ artinya ketimpangan ekonomi wilayah terendah; $IW 0,3-0,5$ artinya ketimpangan wilayah sedang, dan $IW > 0,5$ artinya ketimpangan ekonomi wilayah tertinggi.

Teori Infrastruktur

Fox (2004), mendefinisikan infrastruktur sebagai, “*those Services derived from the set of public work traditionally supported by the public sector to enhance private sector production and to allow for household consumption*”. Selanjutnya Vaughn and Pollard (2003), menyatakan infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan telekomunikasi.

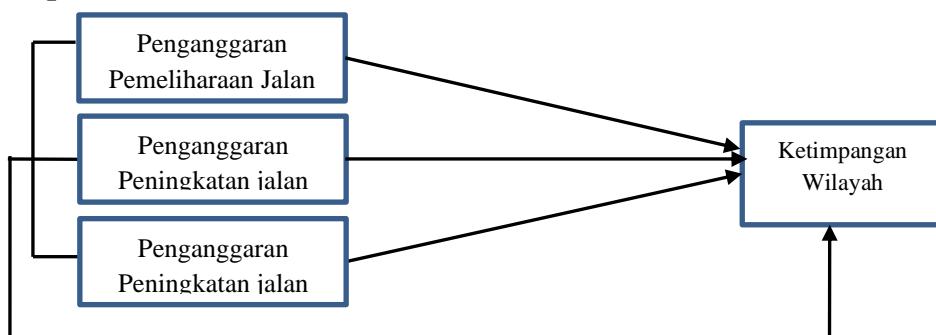
Infrastruktur yang dibutuhkan negara maju tentunya berbeda dengan yang dibutuhkan oleh negara berkembang bahkan terbelakang. Hal yang sama juga untuk wilayah perkotaan dan pedesaan, atau daerah industri dengan wilayah pertanian dan pesisir atau kepulauan. J’afar M. (2007) menyatakan bahwa, infrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait.

Pembangunan infrastruktur dasar membutuhkan modal besar, yang sering tidak selalu diikuti oleh loncatan perolehan nilai tambahnya (*value added*). Namun pemerintah juga perlu menyiapkan infrastruktur yang akan mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang melalui akses ke pasar bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Teori Dorongan Kuat (*Big push theory*) menyatakan bahwa perlu dibangun dulu infrastruktur, semua yang lain berkembang kemudian menetes, (*trickle down effect*). Teori ini selanjutnya menyatakan bahwa untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi negara terbelakang dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan diperlukan suatu “dorongan kuat” atau suatu program besar yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum suatu investasi.

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan atau wilayah terpencil. Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya. *World Development Report* (World Bank, 1994), infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi.

Menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan merupakan prasana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk pembangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada di permukaan tanah dan atau air serta di atas Permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan dalam arti yang luas adalah sepias ruang baik didarat maupun diatas permukaan air atau diudara yang khusus, patut dan dipergunakan untuk perhubungan lalu lintas antara tempat diperlukan bumi (Lubis,1973).

Kerangka Konseptual



Gambar Kerangka Pikir

Hipotesis

1. Diduga terdapat pengaruh penganggaran pemeliharaan jalan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.
2. Diduga terdapat pengaruh penganggaran peningkatan jalan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.
3. Diduga terdapat pengaruh penganggaran pembangunan jalan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.
4. Diduga terdapat pengaruh penganggaran pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, BPS Provinsi Sulawesi Utara dan data belanja infrastruktur jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kotamobagu.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Ketimpangan wilayah (Y) adalah hasil perhitungan indeks Williamson yang dilakukan selang tahun 2010 – 2021 diukur dengan satuan indeks.
2. Penganggaran Pemeliharaan Jalan (X1) adalah alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan di Dinas PUPR Kota Kotamobagu RKA tahun 2010-2021 diukur dalam satuan Rupiah.
3. Penganggaran Peningkatan Jalan (X2) adalah alokasi anggaran untuk peningkatan jalan di Dinas PUPR RKA tahun 2010-2021, diukur dalam satuan Rupiah.
4. Penganggaran Pembangunan Jalan (X3) adalah alokasi anggaran untuk pembangunan jalan di Dinas PUPR Kota Kotamobagu RKA tahun 2010-2021 diukur dalam satuan Rupiah.

Metode Analisa

Alat analisa yang dipakai untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penganggaran infrastruktur jalan (pemeliharaan jalan, peningkatan jalan dan pembangunan jalan) terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Gujarati, 2012).

Model Persamaan

Persamaan matematis untuk model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: $Y = f(X_1, X_2, X_3)$, dimana Y merupakan variabel terikat sedangkan X_1, X_2 , dan X_3 adalah variabel bebas. Secara spesifik model ini menjadi :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas model penelitian ini ditransformasikan dalam bentuk semi log sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 \log X_3 + e$$

Dimana Y = Ketimpangan Wilayah ; X_1 = Penganggaran Pemeliharaan Jalan; X_2 = Penganggaran Peningkatan Jalan; X_3 = Penganggaran Pembangunan Jalan; e = Error term; β_0 = Intersep; dan β_1 - β_4 = koefisien regresi.

Pengujian Hasil Persamaan Regresi

Pendekatan uji signifikansi untuk pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui distribusi sampling atau penarikan sampel. Memilih tingkat signifikansi α untuk menentukan nilai kritis dari statistik uji yang dilakukan. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima⁷.

⁷ Gujarati D.N (2006), Essentials of Econometrics Vol.1, Mc.Graw Hill

Dalam model regresi linier level signifikansi sesuai tabel statistik terdiri atas $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$ dan $\alpha = 10\%$.⁸ Level signifikansi menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis nol. Level signifikansi tingkat kesalahan yang dapat diterima peneliti yang disebabkan kemungkinan adanya kesalahan dalam pengambilan sampel.

Dalam analisis regresi terdapat tiga jenis kriteria ketetapan (*goodness of fit*): (i) koefisien determinasi (ii) uji statistik F, dan (iii) uji statistik t. Dan melakukan pengujian model terhadap asumsi klasik diberlakukan pada persamaan struktural yang meliputi:

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual) dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

Uji Multikolinearitas

Terjadinya multikolinearitas yang rawan pada model regresi bisa dideteksi keberadaannya bila R2 dari auxilary regression melebihi R2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu jika nilai varian inflation faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinearitas.

Uji Heteroskedasitas

Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedasitas digunakan metode grafik scatter plot, uji White, dimana apabila nilai probabilitas n(p value) observasi R2 lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), maka residual digolongkan homoskedasitas.

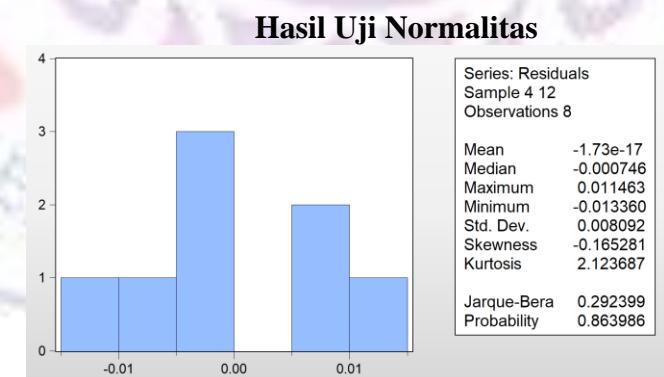
Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM test) dimana apabila probabilitas f hitung $> \alpha$ (5%), maka bebas dari autokorelasi. Pendekslan ada atau tidak adanya autokorelasi dapat juga dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson yaitu dengan cara membandingkan antara nilai Durbin Watson statistik dengan nilai Durbin Watson hitung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (0,863986) $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

⁸ Freund RJ, Wilson WJ & Ping Sa (2006), Regression Analysis, Elsevier Science.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variabel	Koefisien	Centered VIF
C	0.033987	NA
LOG(X1)	1.48E-05	1.179734
LOG(X2)	5.37E-06	1.183737
LOG(X3)	2.30E-05	1.375819

Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, inflation faktor (VIF) pada X_1 , X_2 dan X_3 < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heteroskedastitas

Tabel 3. Uji Breusch Pagan Godfrey

Variabel	Koefisien	Prob
F-statistic	0.439846	0.7371
Obs*R-squared	1.984439	0.5756
Scaled explained SS	0.278736	0.9640

Sumber : Hasil olah data Eviews

Dari hasil uji Heteroskedastisitas dengan uji Breusch Pagan Godfrey menggunakan Eviews 12 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas observasi R-squared sebesar 0,5756 jika dibandingkan dengan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 10\%$), $0,5756 > 0,10$ artinya residual digolongkan homoskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Dari hasil uji dapat dilihat nilai Durbin Watson Statistik adalah 1,821436. Variabel dalam penelitian (k) adalah 3, dan jumlah variabel (n) adalah 12. hasil tersebut kita melihat tabel Durbin Watson pada $\alpha = 5\%$. Dari tabel statistik untuk $n = 12$ dan $k = 3$, $dL = 0,6577$ dan $dU = 1,8640$. Pada hasil uji model regresi ini terjadi $dL < d < dU$ atau $0,6577 < 1,821436 < 1,8640$ sehingga model regresi ini dinyatakan ragu-ragu atau *inconclusive* .

Hasil Estimasi Penelitian

Adapun Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)*. Model persamaan dalam penelitian ini adalah model semi log (model Lin-Log), dimana transformasi hanya dilakukan terhadap variabel bebas saja atau X_1 , X_2 dan X_3 sementara variabel Y tetap dalam bentuk angka indeks. Dengan demikian persamaan model ini dituliskan sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + \beta_3 \text{Log}X_3 + e$$

Tabel 4. Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	Prob
C	-0.014335	0.9418
LOG(X1)	-0.009191	0.0750 *)
LOG(X2)	-0.000438	0.8592
LOG(X3)	-0.008912	0.0630 **)
R	0.395527	
F	0.000115 ***)	

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12

Dimana : ***) signifikan pada $\alpha = 0.01$; **) signifikan pada $\alpha = 0.05$ dan *) signifikan pada $\alpha = 0.01$

Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil pengolahan data menggunakan EViews 12 adalah sebagai berikut :

$$Y = -0,014335 - 0,009191 \text{Log}(X_1) * - 0,000438 \text{Log}(X_2) - 0,008912 \text{Log}(X_3) * + e$$

Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0,395527 atau 39,5527 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel – variabel independent dalam hal ini penganggaran pemeliharaan jalan (X₁), penganggaran peningkatan jalan (X₂) dan penganggaran pembangunan jalan (X₃) secara bersama – sama memiliki pengaruh 39,5527 % terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Statistik F

Dari hasil pengolahan menggunakan eviews 12 dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,0000115. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Prob (F-statistik) $0,0000115 < \alpha = 0.05$, artinya semua variabel bebas (X₁, X₂, X₃) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

Uji Statistik t

1. Variabel Penganggaran Pemeliharaan Jalan (X₁) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0750. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.10$, Nilai probabilitas $X_1 0,0750 < 0,10$, berarti H₀ ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Penganggaran Pemeliharaan Jalan (X₁) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.
2. Variabel Penganggaran Peningkatan Jalan (X₂) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,8592 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.10$, Nilai probabilitas $X_2 0,8592 > 0,10$, berarti H₀ diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Penganggaran Peningkatan Jalan (X₂) tidak berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.
3. Variabel Penganggaran Pembangunan Jalan (X₃) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0630 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.10$, nilai probabilitas $X_3 0,0630 < 0,10$, berarti H₀ ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Penganggaran Pembangunan Jalan (X₃) berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.

Berdasarkan persamaan dan hasil pengujian-pengujian di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar -0,014335 menyatakan bahwa Jika nilai X₁ anggaran pemeliharaan jalan, X₂ anggaran peningkatan jalan, dan X₃ anggaran pembangunan jalan adalah konstan, maka nilai ketimpangan wilayah (Y) di Kota Kotamobagu adalah sebesar -0,014335. Menunjukkan bahwa pentingnya penganggaran infrastruktur jalan untuk mengurangi tingkat ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.
2. Secara parsial, penganggaran pemeliharaan jalan dan ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$. Nilai koefisien regresi penganggaran pemeliharaan jalan sebesar -0,009191. Artinya setiap kenaikan 1 persen anggaran pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu akan menurunkan ketimpangan wilayah sebesar 0,009191 persen.
3. Secara parsial, penganggaran peningkatan jalan dan ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu berpengaruh negatif tapi tidak signifikan. Nilai koefisien regresi penganggaran peningkatan jalan sebesar -0,000438.
4. Secara parsial, penganggaran pembangunan jalan dan ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$. Nilai koefisien regresi penganggaran pembangunan jalan sebesar -0,008912. Artinya setiap kenaikan 1 persen anggaran pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu akan menurunkan ketimpangan wilayah sebesar 0,008912 persen..
5. Secara simultan, dapat dilihat nilai Prob (F-statistik) $0,0000115 > \alpha = 0.01$ yang berarti peningkatan baik pada penganggaran pemeliharaan jalan, penganggaran peningkatan jalan dan penganggaran pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu secara bersama-sama berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.

Pembahasan

Salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan adalah semua yang terkait dengan kesejahteraan rakyat yang merata dengan dicerminkan pada pembangunan yang merata. Bahkan terdapat ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh masyarakat yang disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ruang lingkup SPM ini meliputi 6 (enam) bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, Perumahan dan Permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan sosial.

Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas. Khusus di bidang pekerjaan umum, infrastruktur jalan menentukan tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Dalam teori ekonomi, infrastruktur memiliki sifat sebagai barang publik yang mempunyai dua ciri utama dari sisi penggunaannya (konsumsi barang publik) yaitu tidak bersaing (*non rivalry*) dan tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian (*non excludable*). Barang publik murni adalah barang yang dimana *marginal costs* dalam penyediaannya adalah nol dari pertambahan penggunaan (*Non rivalry*), dan tidak memungkinkannya menghalangi seseorang dalam mengkonsumsi barang tersebut (*non-excludable*) (Stiglitz,2000).

Sesuai dengan sifatnya dimana infrastruktur disediakan oleh pemerintah, maka pihak pengguna infrastruktur tidak memberikan bayaran secara langsung atas penggunaan infrastruktur. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu terdiri atas 3 (tiga) program prioritas yaitu program peningkatan jalan, program pemeliharaan jalan dan program pembangunan jalan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penganggaran infrastruktur jalan (penganggaran peningkatan jalan, penganggaran pemeliharaan jalan dan penganggaran pembangunan jalan) signifikan mempengaruhi penurunan ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu. Hal ini sesuai dengan teori Pollard (2003) yang menyatakan infrastruktur disiapkan pemerintah untuk menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Juga sejalan dengan pendapat Hermanto et al (1995) yang menyatakan pembangunan infrastruktur memberikan nilai tambah pada daerah terpencil. Bahkan Teori Dorongan Kuat (*Big Push Theory*) menyatakan bahwa perlu dibangun terlebih dahulu infrastruktur, maka semua yang lain berkembang dan memberikan dampak (*trickle down effect*).

Secara empiris hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Intan Marlina (2015) di Kabupaten Kutai Timur, Samuel Randy Tapparan (2020) di Kabupaten Tana Toraja, Paulus Iriyena (2019) di Kabupaten Kaimana, Lulus Prapti dkk (2015) di Kota Semarang. Juga penelitian dari Tatan Sutwika (2018) tentang ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia dengan pembangunan infrastruktur. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Cristniati Rahmadani (2018) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan pembangunan infrastruktur jalan terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah.

Secara spesifik, peningkatan penganggaran pemeliharaan jalan dan pembangunan jalan memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan wilayah di kota Kotamobagu. Secara empiris hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lulus Prapti dkk (2015), Handitya Sunugraha yang meneliti dampak pembangunan jalan lingkar selatan di Kabupaten Pati, di Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Uswatun (2017) khusus pembangunan tol Solo Kertosono. Juga Risvita Dewi (2020) yang menganalisis pembangunan infrastruktur jalan terhadap ketimpangan di Kabupaten Beyolali.

Secara parsial penganggaran peningkatan jalan di Kota Kotamobagu tidak mempengaruhi ketimpangan wilayah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kurnia Sukma Tari (2020) di Kabupaten Banyumas yang menganalisis dampak positif pelebaran jalan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Kebijakan pemerintah Kota Kotamobagu menuju Kota Jasa menetapkan salah satu prioritas program adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat menuju peningkatan sektor jasa di semua wilayah. Proporsi anggaran pemeliharaan jalan paling besar sejalan dengan besarnya pengaruh penurunan ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang menopang pemenuhan standar pelayanan minimal. Persentase jalan dalam kondisi mantap merupakan salah satunya dimana sesuai target yang diharapkan tahun 2022 sebesar 81 persen ternyata telah tercapai dengan kinerja capaian sebesar 92,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pemerataan pembangunan jalan yang sangat menopang aksesibilitas masyarakat di dalam Kota Kotamobagu dan dengan kabupaten sekitarnya yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Sesuai dengan kebijakan penataan ruang wilayah Kota Kotamobagu yang berkaitan erat dengan penelitian ini adalah 1) peningkatan akses ke fasilitas pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang merata dan berhierarki; 2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang terpadu, merata dan berkeadilan di seluruh wilayah kota; dan 3) pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional.

Sistem jaringan jalan terdiri atas a) jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Kelurahan Mongkonai Barat – Kelurahan Poyowa Kecil; b) jaringan jalan arteri sekunder; c) jaringan jalan kolektor primer (Ruas Jalan Kelurahan Genggulang-Desa Pontodon, Ruas Jalan Gogagoman-Kelurahan Kotamobagu, Ruas Jalan Kotamobagu-Bungko, Ruas Jalan Kotamobagu- Poyowa Besar, Ruas jalan Molinow – Kobo Kecil) ; dan d) jaringan jalan kolektor sekunder (jaringan jalan local yang menghubungkan pusat-pusat permukiman).

Serta terdapat Rencana pengembangan ruas jalan di wilayah Kotamobagu yaitu ruas jalan lingkar Kota Kotamobagu yang melewati Kelurahan Mongkonai Barat, Molinow, Mogolaing, Gogagoman, Genggulang, Bilalang, Pontodon, Sia, Upai, Biga, Moyag Tampoan, Moyag Todulan, Kobo Besar, Motoboi Besar, Poyowa Besar I, Poyowa Besar II, Tabang, Bungko, Kopandakan.

Terdapat juga rencana jalur evakuasi bencana menuju pada Kawasan evakuasi (jalur 1 terdiri jalan Diponegoro, Jalan Ahmad Yani, Jalan Adampe Dolot, Jalan Gatot Subroto; jalur 2 terdiri jalan S.Parman, jalan Brigjen Katamso dan Jalan DC.Manoppo).

Berbagai upaya peningkatan aksesibilitas melalui penganggaran infrastruktur jalan memberikan berbagai dampak positif terutama dari hasil penelitian ini, dimana pemerataan pembangunan infrastruktur jalan akan mengurangi ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan penganggaran pemeliharaan jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa penganggaran peningkatan jalan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.
3. Hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan penganggaran pembangunan jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.
4. Hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan penganggaran pemeliharaan jalan, penganggaran peningkatan jalan dan penganggaran pembangunan jalan secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan wilayah di Kota Kotamobagu.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Penganggaran SPM Bidang Infrastruktur Jalan lebih merata penggunaannya terutama menuju pusat-pusat produksi daerah.

2. Peningkatan jalan di ruas jalan di Kawasan budidaya menjadi prioritas daerah menopang pemerataan kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad Lincoln, 2016, Ekonomi Pembangunan Edisi 5 . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Barika, 2012, Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009, Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan (JEPP), Volume 04 No. 03, Januari – Juni 2012.

Berg Andrew & Jonathan D.O, 2011, *Inequality and Unsustainable Growth : Two Sides of the Same Coin?*. IMF, Research Departement. SDN/11/08.

Cindy Lovita Almasiyah, 2021, Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Di Wilayah Kenjeran Surabaya.

Christaller Walter, 1983, *Annals of the Association of American Geographers*, JSTOR Vol.73, No,01,

Djoyohadikusumo Sumitro, 2000, Pembangunan Ekonomi Indonesia, Edisi ketiga, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Farris Adiat, 2018, Analisis Kesenjangan Wilayah dan Kesenjangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2015-2018, Agribusiness Journal, Volume 7 Nomor 02.

Fox Julia ,Obinna O & Kara Hanson, 2004, *Inequalities in Purchase of Mosquito Nets and Willingness to Pay for Insecticide Treated Nets in Nigeria*, Malaria Journal, Spinger Link, Vol 3, No.6.

Freund Rudolf J, Wilson William J, Ping Sa, 2006, *Regression Analysis : Statistical Modeling of a Response Variable*, Second Edition, Elsevier Science.

Glasson John, 1974, *An Introduction : Regional Planning : Concepts, Theory and Practice*, Hutchinson Educational.

Gujarati Damodar N, 2012, Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat _____, 2006, *Essentials of Econometrics*, Mc.Graw Hill.

Harry Kurniadi Atmaja dan Kasyful Mahalli, 2015, Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 3 Nomor 4.

Hermanto Dardak, 2009, Pembangunan Infrastruktur, Tantangan Utama Indonesia, SWA Online

Intan Marlina, 2015, Pengaruh Akumulasi Kapital Dan Perkembangan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Eksekutif Volume 12 Nomor 2.

Ilham, 2019, Pengaruh Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan Terhadap Kualitas Infrastruktur Jalan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Cianjur dan Lima Kabupaten di Jawa Barat, Jurnal Momen, Volume 2, Nomor 1.

J'afar Marwan. 2007, Infrastruktur pro Rakyat, Strategi Investasi Infrastruktur Indonesia Abad 21, Pustaka Toko Bangsa.

Jhingan, 2000, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Press.

Kurnia Sukma Tari, 2020, Implikasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi Deskriptif Pelebaran Jalan Di Desa Petir Kecamatan Kalibago Kabupaten Banyumas).

Kuncoro Mudrajad, 2004, Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Kasiyanto M.J, 1996, MASalah dan Strategi Pembangunan Indonesia, Edisi 1, Penerbit Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta.

Ken Martina Kasikoen, 2011, Keterkaitan Antar Wilayah (Studi AKsus Kabupaten Cilacap), Jurnal Planessa Volume 2, Nomor2.

Kneller R, Michael Bleaney & Norman Gemmell,1999, *Fiscal Policy and Growth : Evidence from OECD Countries*, Journal of Public Economics, Volume 74, Issue 02, hlm 171-190.

Martin Luter, Irlan Indrocahyo, Islahwani Loka Vita Resti, 2019, Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 17, Nomor 02, hlm 38-48.

O'sullivan Arthur, 2006, *Urban Economics*, McGraw-Hill Companies.

Paulus Iriyena, Amran T. Naukoko, Hanly F. Dj. Siwu, 2019, Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kaimana, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 19 Nomor 02.

Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, 1997, Makro Ekonomi edisi keempatbelas, Penerbit Erlangga Jakarta

Pindyck S.R & Rubinfeld L.D, 1998, *Econometric Models and Economic Forecast*, Prentice Hall, London

Palilu Aram, 2022, Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap PDRB, Penerbit CV Azka Pustaka, Sumatera Barat.

Rr. Lulus Prapti NSS, Edy Suryawardana dan Dian Triyani, 2015, Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang

Rahmadani, Cristniati, 2018, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 201-2015, <http://ejournal.uajy.ac.id/id/eprint/16466>, UAJY Library.

Risvita Dewi & Eko Prakoso, 2020, Analisis Perbedaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten pada Kondisi Ketimpangan Wilayah di Kabupaten Boyolali, UGM Library.

Sukirno, 2010, Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.

Sjafrizal, 2008, Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi. Padang: Baduose Media.

_____, 2021, Analisis Ekonomi Perkotaan Dan Penerapannya. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Samuel Randy Tapparan , 2020, Analisis Korelasi Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, *Jurnal Ekonomika* Volume 411, Corpus ID : 225899570.

Sri Kurniawati, 2018, Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat, Prosiding SATIESP, FEB Universitas Tanjungpura.

Tanjung Hapsasri, 2011, Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.

Todaro, Michael P. 2011, Pembangunan Ekonomi. Jakarta. Erlangga.

Todaro , M., & Smith, S. 2004. Pembangunan ekonomi didunia ketiga. edisi 2. Jakarta: Erlangga.

Tatan Sutwika, 2018, Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia, *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Volume 6, Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Uswatun Khasanah, Nurhadji Nugraha, Wawan Kokotiasa, 2017, Dampak pembangunan jalan tol solo-kertosono Terhadap hak ekonomi masyarakat desa Kasreman kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 5 Nomor 2.

Varian Hal R, 1992, *Microeconomic Analysis*, Third Edition, W.W.Norton & Company.

Vaughn and Pollard, 2003, *Planning and Management Public Works in the 1980s*, Rebuilding American, Vol.I, Council of State Planning Agencies, Washington DC.